



**HAMBATAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENGATASI
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK**

***CONSTRAINTS OF THAI GOVERNMENT IN OVERCOMING OF
COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan meraih gelar Sarjana Sosial

oleh:
Sheila Febrina Ariyanti
120910101082

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Atas rahmat dan karunia Allah SWT, dengan rasa tulus dan rendah hati, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Pembimbing yang senantiasa membimbing sanubariku dalam *Ilahi Anta Maqsudi Waridhoka Matlubi*;
2. Almarhumah mbah Ruslani tercinta atas keikhlasan doa dan dorongan yang tiada henti-hentinya kepada ananda untuk dapat menyelesaikan skripsi ini ;
3. Papa dan Mama tercinta, Bpk. Joko Mugiyono dan Ibu. Yulis Andarini, SE atas keikhlasan doa dan dorongan baik secara spiritual maupun materiil. Serta kasih sayang sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Saudara-saudaraku Gandhi Sudrajat, Yessi Zahra, dan Jodi Hapro Kelana, S.Ab yang selalu memberi dukungan serta semangat;
5. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bagi semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil, terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
(Terjemahan surat Ar-Ra'd ayat 11)¹



¹Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-Art Anggota Ikapi

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Sheila Febrina Ariyanti

NIM : 120910101082

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Hamabatan Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 November 2016

Yang menyatakan,

Sheila Febrina Ariyanti

NIM. 120910101082

SKRIPSI

**HAMBATAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENGATASI
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK**

***CONSTRAINTS OF THAI GOVERNMENT IN OVERCOMING OF
COMMERCIAL SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN***

Oleh:

Sheila Febrina Ariyanti

NIM 120910101082

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Honest Dody Molasy S.Sos, MA

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hambatan Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak” telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Kamis, 16 Maret 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

jam : 11.00 WIB

Tim Penguji :
Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.Si
195908311989021001

Sekretaris I

Anggota II

Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A
197611122003121002

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D
196802291998031001

Anggota I

Anggota II

Dra. Sri Yuniati, M.Si
196305261989022001

Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS
196010151989031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP.195808101987021002

RINGKASAN

HAMBATAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK; Sheila Febrina Ariyanti, 120910101082; 2017: 167 halaman; Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember

Banyak anak-anak di Thailand yang menjadi pekerja anak khususnya menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Hal ini terjadi salah satu diantaranya disebabkan oleh berkembangnya sektor pariwisata di Thailand. Anak-anak yang bekerja menjadi PSK merupakan salah satu bentuk dari Eksploitasi Komersial Seksual Anak (ESKA). Untuk menanggulangi peningkatan jumlah anak-anak yang menjadi korban ESKA di Thailand, Pemerintah Thailand telah membuat undang-undang *Child Protection Act* dan *The Anti-trafficking in Person Act* sebagai salah bentuk nyata terhadap perlindungan anak. Tetapi nyatanya, meskipun telah ada kebijakan ini, anak-anak yang terjerumus ESKA masih banyak dan meningkat. Dari hal tersebut maka terdapat rumusan masalah, mengapa Pemerintah Thailand mengalami hambatan dalam mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan Pemerintah Thailand dalam mengatasi kasus ESKA.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode *library research*. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui berbagai sumber, yang berasal dari surat kabar, buku, majalah, jurnal, dan informasi dari instansi-instansi terkait peristiwa tersebut. Selain itu juga digunakan sumber-sumber online untuk semakin menunjang data yang didapat. Dalam skripsi ini, setelah memperhatikan teori dan data-data yang didapat kemudian dilakukan interpretasi data. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan argumen utama dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ada beberapa hambatan yang menjadi penyebab ESKA di Thailand susah untuk dihentikan. Beberapa hambatan

tersebut berasal dari dalam domestik Pemerintah Thailand maupun juga karena faktor eksternal. Untuk faktor domestik disebabkan karena di dalam negeri Thailand sendiri, penegakkan hukum mengenai ESKA masih sangat kurang. Banyaknya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan ESKA membawa anak-anak yang rentan terlibat ke dalam ESKA tidak dapat terlindungi.

Kemudian untuk faktor eksternalnya berasal dari masalah migrasi. Thailand memiliki banyak masalah dengan migrasi. Salah satu masalah yang dapat ditimbulkan adalah orang-orang migrasi ini rentan terlibat ke dalam kasus eksploitasi. Di dalam penelitian ini, membuktikan bahwa anak-anak yang menjadi korban eksploitasi biasanya tidak hanya berasal dari dalam Thailand saja, tetapi juga berasal dari negara-negara tetangga. Para imigran ini sangat rentan menjadi korban eksploitasi karena Pemerintah Thailand biasanya sangat ketat untuk memberikan status kewarganegaraan kepada seorang imigran, sehingga menyebabkan para imigran ini menjadi tidak memiliki kewarganegaraan dan sangat mudah untuk masuk ke dalam ESKA.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hambatan Pemerintah Thailand Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada;

1. Honest Dody Molasy S.Sos, MA selaku dosen pembimbing I dan Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam pembimbingan penulisan skripsi ini;
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Sahabat-Sahabati PMII Rayon Fisip Unej yang senantiasa menemani dan membantu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data;
6. Teman-teman Ilmu Hubungan Internasional khususnya angkatan 2012 yang selalu menjadi teman diskusi dan sharing dalam proses penyusunan skripsi;
7. Sahabat-sahabatku tersayang Nurita Wulandari, Viva Virginia Suhartawan, Anggraeni Febrianinda S., Vina Vania Suhartawan, Idzal Dwi Nantyah, Shafira Hasan, Anindita Z. Octaviana, Bella Lubnal Baladani, Jamiliatur Rikzah, Nur Rulita Putri, Miftakhul Khoiriyah, Kholida A'isyah, Aprilia Nurlaily Utami, Moh. Habib Nasrulloh, Geaby Intan, Alvin Rahmadiar Alam, Siska Febri, Mas Ulung, Mbak Aida Mas Nanda dan Mas Angga yang selalu

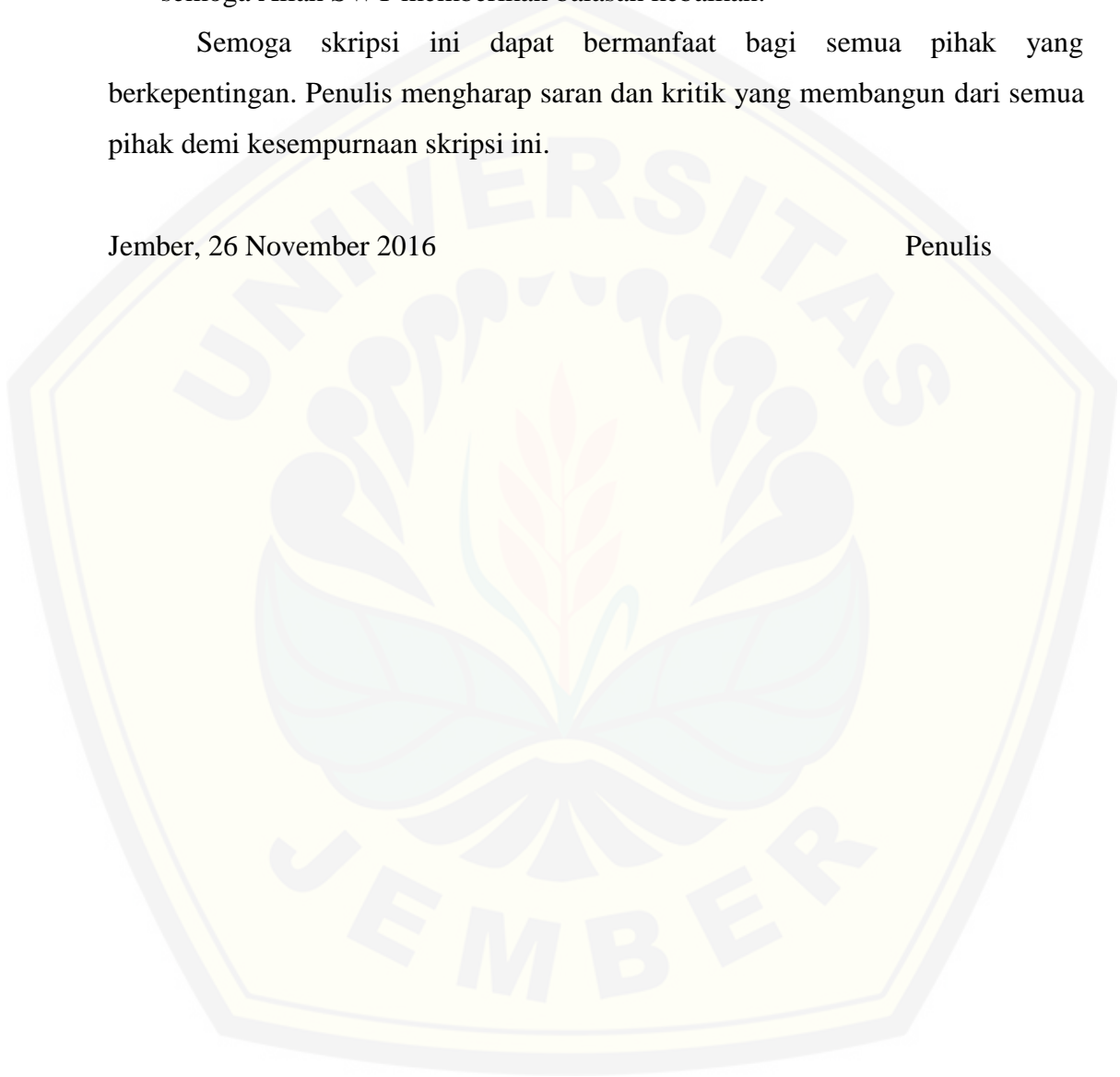
menjadi penyemangat, teman diskusi, dan sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi

8. Bagi semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril dan materiil, terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 26 November 2016

Penulis



DAFTAR ISI

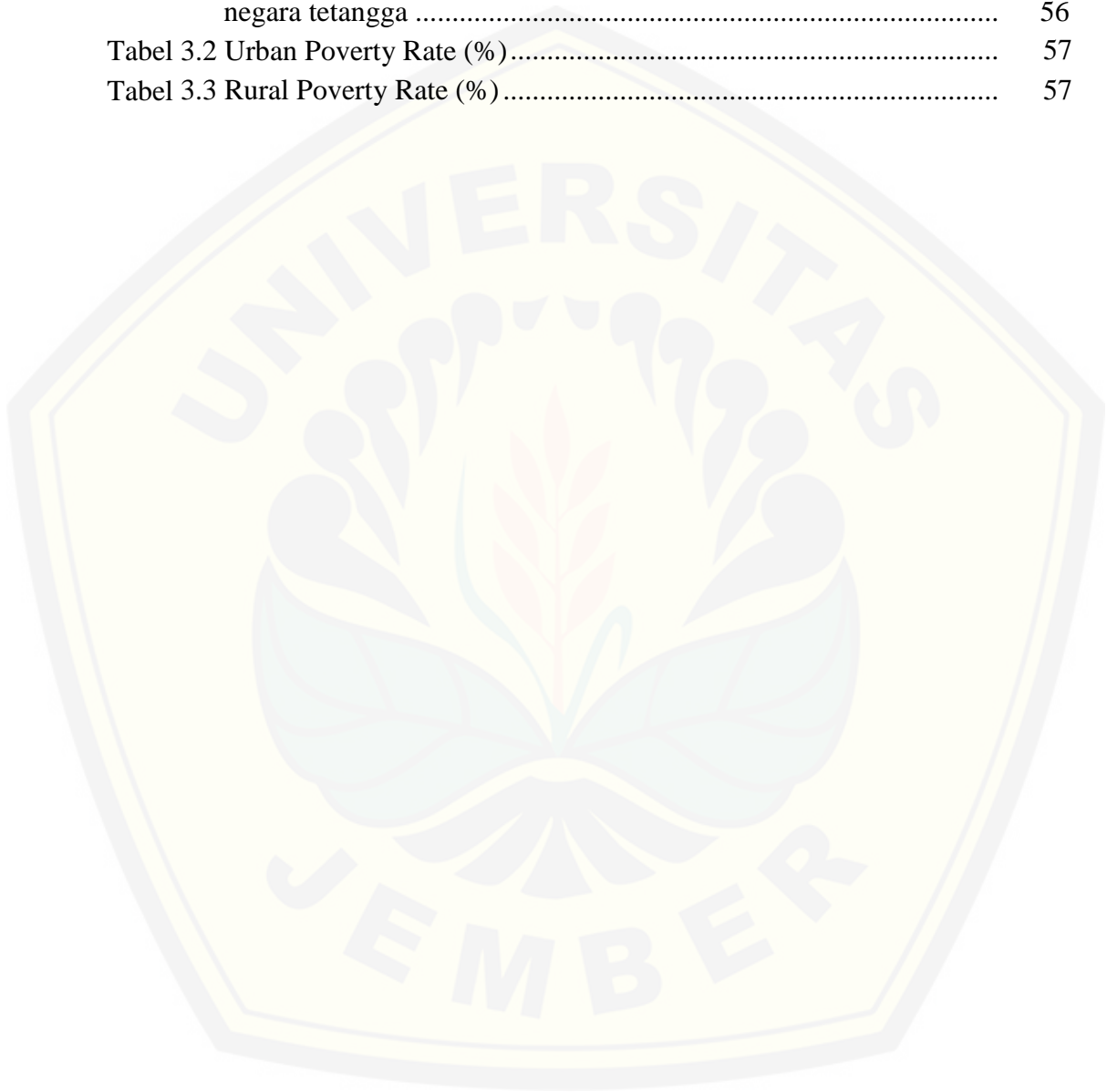
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan	10
1.4.1 Batasan Materi	10
1.4.2 Batasan Waktu	10
1.5 Landasan Konseptual	10
1.5.1 Eksploitasi Seksual Komersial Anak	11
1.5.2 Teori Habitus oleh Pierre Bourdieu	15
1.6 Argumen Utama	19
1.7 Metode Penelitian	19
1.7.1 Metodologi Pengumpulan Data	20
1.7.2 Metode Analisis Data	20
1.8 Sistematika Penulisan	21

BAB 2. Kerangka Hukum dalam Menghadapi Eksploitasi Seksual Komersial Anak	23
2.1 Konvensi Hak-hak Anak atau KHA	24
2.1.1 CRC dan Isu Perdagangan Anak	26
2.1.2 <i>The Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the sale of children, child prostitution, and child pornography (OPSC)</i>	29
2.1.3 ILO (<i>International Labour Organization</i>)	32
2.2 ASEAN dan Hak Anak	36
2.2.1 Deklarasi Komitmen untuk Anak di ASEAN	37
2.2.2 <i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR)</i>	38
2.2.3 <i>The Hanoi Declaration on the Enhancement of Welfare and developmet of ASEAN Women and Children, and The ASEAN Commision for the Protectionand Promotion of the Right of women and Children (ACWC)</i>	41
2.3 Hak-hak Anak dalam Hukum di Thailand	43
2.3.1 Undang-Undang Perlindungan Anak (<i>Child Potection Act 2003</i>)	44
2.3.2 <i>Anti-trafficking in Person Act 2008</i> (Undang-undang Anti Perdagangan Orang 2008)	46
2.3.3 Perjanjian Bilateral dan Multilateral untuk menekan perdagangan manusia	50
BAB 3. Faktor Penyebab ESKA di Thailand	52
3.1 Kemiskinan	52
3.2 Pengaruh Budaya Masyarakat Thailand	66
3.3 Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	76
3.4 Permintaan Wisatawan Asing terhadap Anak-anak untuk dijadikan Objek Seks	85
BAB 4. Upaya dan Hambatan Pemerintah Thailand dalam Mengatasi ESKA	100

4.1 Program Pemerintah dalam Penanganan ESKA	100
4.1.1 Menjalin Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga	101
4.1.2 Melakukan Pencegahan dan Perlindungan Melalui Penguatan Produk Hukum	113
4.2 Capaian yang didapat oleh Pemerintah Thailand dalam mengatasi ESKA di Thailand	118
4.3 Hambatan Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak	123
4.3.1 Adanya Celah Hukum dalam Undang-undang terkait Perlindungan Anak	124
4.3.2 Pelaksanaan undang-undang di tingkat domestik dan lemahnya penegakan hukum.....	128
4.3.3 Korupsi	130
4.3.4 Tidak adanya mekanisme penegakkan hukum	132
4.3.5 Penggunaan dan penyalahgunaan standar internasional	133
4.3.6 Migrasi	136
BAB 5. PENUTUP.....	141
Kesimpulan	141
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Perbandingan tingkat indeks Gini Thailand dengan negara-negara tetangga	56
Tabel 3.2 Urban Poverty Rate (%).....	57
Tabel 3.3 Rural Poverty Rate (%).....	57



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Rumus Teori Habitus	16
Gambar 3.1 Peta Kemiskinan berdasarkan dari pendapatan daerah di Thailand.....	59
Gambar 3.2 Strata Sosial menurut Ajaran Budha Theravada di Thailand	74
Gambar 3.3 Grafik Peningkatan Jumlah Wisatawan Asing di Thailand	87
Gambar 3.4 Grafik Jumlah Kedatangan Pengunjung berdasarkan Asal Negara	88
Gambar 3.5 Grafik Pengaruh GDP Thailand melalui sektor Industri	89
Gambar 3.6 Grafik Dampak Industri kepada Lapangan Pekerjaan di Thailand	90
Gambar 4.1 Jumlah Kasus Perdagangan Manusia	125

DAFTAR SINGKATAN

PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
ILO	: <i>International Labour Government</i> (Organisasi Buruh Internasional)
NGO	: <i>Non-Government Organization</i> (Organisasi Non-Pemerintah)
PSK	: Pekerja Seks Komersial
AS	: Amerika Serikat
ESKA	: Eksploitasi Seksual Komersial Anak
PSA	: Pariwisata Seks Anak
PMS	: Penyakit Menular Seksual
HIV	: <i>Human Immuno Deficiency Virus</i>
AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
SAIS	: <i>School of Advanced International Studies</i> (Sekolah Tinggi Studi Internasional)
KHA	: Konferensi Hak Anak
CRC	: <i>Convention on the Rights of Child</i> (Konvensi Hak-hak Anak)
OPSC	: <i>Operational Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography</i> (Operasional Protokol untuk Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak)
NPA	: <i>The National Plan of Action</i> (Rencana Tindakan Nasional)
UNAIDS	: <i>United Nations Programme on HIV/AIDS</i> (Program PBB mengenai HIV/AIDS)
NASP	: <i>National AIDS Strategic Plan</i> (Rencana Strategis AIDS Nasional)
ATP	: <i>The Anti Trafficking in Person Act</i> (Undang-undang Perdagangan Anak)
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i> (Perkumpulan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)
NCYD	: <i>The National Council for Child and Youth Development</i> (Dewan Nasional untuk Pengembangan Anak-anak dan Remaja)
AICHR	: <i>ASEAN intergovernmental Commission on Human Rights</i> (Komisi ASEAN antar pemerintah tentang Hak Asasi Manusia)
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
HAM	: Hak Asasi Manusia
ACWC	: <i>ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Right of Women and Children</i> (Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak)
ACF	: <i>ASEAN Child Forum</i> (Forum Anak ASEAN)
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NPA	: <i>National Police Agency</i> (Agensi Polisi Nasional)

COMMIT	: <i>The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human Trafficking</i> (Koordinasi Para Menteri Mekong terkait Inisiatif Melawan Perdagangan Anak)
GMS	: <i>Greater mekong Sub-region</i> (Sub-wilayah Mekong Besar)
UNIAP	: <i>United Nation Inter Agency Project against Human Trafficking</i> (Proyek PBB antar Lembaga melawan Perdagangan Manusia)
SPAs	: <i>Sub-regional Plan Action</i> (Rencana Aksi Sub-wilayah)
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
UNWTO	: <i>United Nation World Tourism Organization</i> (Organisasi Pariwisata Dunia PBB)
WTM	: <i>World Travel Market</i> (Pasar Travel Dunia)
YCI	: <i>Youth Career Initiative</i> (Inisiatif Pemuda Karir)
CN	: <i>Childsafe Network</i> (Jaringan Aman Anak)
ECPAT	: <i>End Child Prostitution And Trafficking for Sexual Purposes</i> (Menghentikan Prostitusi Anak dan Perdagangan untuk Tujuan Seksual)
CSO	: <i>Civil Society Organization</i> (Organisasi Masyarakat Sipil)
YPP	: <i>Youth Partnership Project</i> (Proyek Kemitraan Pemuda)
CoC	: <i>Code of Conduct</i> (Kode Etik)
INGO	: <i>International Non-Government Organization</i> (Organisasi Internasional Non-Pemerintah)
UNICEF	: <i>United Nations International Children Emergency's Fund</i> (Dana Darurat Anak Internasional PBB)
TVPA	: <i>Trafficking Victim in Person Act</i> (Undang-undang Korban Perdagangan Anak)
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i> (Produk Domestik Bruto)
RR	: <i>Rest and Recreation</i> (Peristirahatan dan Rekreasi)
PISA	: <i>Programme for International Student Assesment</i> (Program Penilaian Pelajar Internasional)
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization</i> (Pendidikan, Ilmiah, dan Organisasi Budaya PBB)
O-NET	: <i>Ordinary National Education Test</i> (Uji Pendidikan Nasional Biasa)
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i> (Program Pengembangan PBB)
IQ	: <i>Intelligence Qoutient</i> (Kadar Kecerdasan)
STTM	: Sains, Teknologi, Teknik dan Matematika

DAFTAR LAMPIRAN

1. Legal Hukum terkait isu Perlindungan Anak
2. Foto-foto PSK anak di Thailand



BAB 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Human trafficking di dunia sudah terjadi sejak lama dan menjadi masalah yang sampai saat ini masih sulit diselesaikan oleh negara. Penyelesaian masalah *human trafficking* sekarang sudah tidak hanya terbatas oleh suatu negara saja melainkan menjadi tanggung jawab bersama, yang membuat negara sering bekerjasama dalam mengatasi masalah *human trafficking* dan mulai banyak bermunculan NGO's (*Non-Government Organizations*) yang berfokus untuk menghentikan masalah *human trafficking*. PBB telah memberikan definisi tentang terkait *human trafficking* yang tertuang dalam Protokol Palermo yang diadopsi pada tahun 2000. Protokol Palermo membedakan perdagangan manusia dari penyelundupan manusia melalui unsur-unsur eksploitasi, penipuan, dan pemaksaan. Dalam Protokol ini (Pasal 3) dijelaskan bahwa :

“Perdagangan manusia dapat berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyelewengan kekuasaan atau posisi rentan atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi, setidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, atau diambilnya organ tubuh.”²

Perdagangan manusia cenderung lebih bersifat memaksa bagi korbannya. Orang-orang yang terlibat di dalam penyelundupan, biasanya mereka dengan sukarela ikut dalam proses penyelundupan ini. Salah satu faktor yang mendukung

²Andrees, B. 2008. *Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia*. Diakses pada 17 Maret 2016, dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_335667.pdf.

mereka terlibat dalam penyelundupan manusia adalah keinginannya untuk berpindah ke negara lain dikarenakan masalah etnis atau perang yang terjadi di negara asal, tetapi mereka tidak memiliki dokumen resmi untuk masuk ke negara lain secara legal sehingga membuat mereka lebih memilih jalan penyelundupan ini. Sedangkan perdagangan manusia, biasanya korban dibawa secara paksa untuk diperdagangkan, dan kebanyakan dari mereka rata-rata menjadi korban eksploitasi. Contohnya saja banyak kasus perdagangan manusia berawal dari kasus penculikan.

Pada masalah *human trafficking* ini yang paling sering menjadi korban adalah wanita dan anak-anak. Wanita dan anak-anak ini, menjadi korban perdagangan manusia yang kemudian akan diperdagangkan di dalam maupun diluar negeri. Wanita dan anak-anak biasanya dipekerjakan sebagai buruh ataupun pekerja seks komersial (PSK).³ Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM karena di dalam konvensi ILO (*International Labor Organization*) No. 182 tentang Tindakan Segera Untuk Menghapuskan dan Mengurangi Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak, telah sangat jelas disebutkan bahwa aktifitas prostitusi yang melibatkan anak-anak dilarang dan harus dihapuskan.

Di zaman Globalisasi sekarang ini, secara tidak langsung memudahkan bisnis *human trafficking*. Terutama jika yang akan diperdagangkan adalah anak-anak atau yang lebih dikenal dengan *child trafficking*. Hal ini dikarenakan globalisasi secara tidak langsung menghilangkan batas-batas negara. Kemajuan teknologi juga sangat mendukung berkembangnya kasus *child trafficking* karena memudahkan manusia dalam melakukan perpindahan lintas negara. Disisi lain, kasus *child trafficking* dan pelibatan anak perempuan dibawah umur sebagai komoditi yang diperjual-belikan adalah realitas sosial yang berkembang bersamaan dengan globalisasi. Altman, dalam bukunya *Global Sex*, menunjukkan bagaimana hasrat dan kesenangan atas tubuh acapkali dibingkai, dibentuk,

³U.S. Department of State. 2015 Trafficking in Person Report : Thailand Tier 3. Diakses pada 30 Mei 2016, dari <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243547.htm>.

diperdagangkan dan dikomodifikasikan melalui jejaring politik-ekonomi global, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan turisme internasional.⁴

Child trafficking ini paling banyak terjadi di negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia dan hampir tiap tahunnya mengalami penambahan. Banyaknya anak-anak yang menjadi korban eksploitasi di Asia karena didorong oleh permasalahan ekonomi dan karena lemahnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Keadaan ekonomi di negara-negara berkembang biasanya sering tidak stabil, kondisi ini juga seringkali diperparah oleh krisis dunia. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan terbesar berkembangnya bisnis prostitusi, dimana prostitusi ini seringkali menjadi tempat terjadinya segala bentuk eksploitasi seksual.

Hidup dalam kemiskinan menyebabkan seseorang rela melakukan apa saja untuk dapat keluar dari permasalahan tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sedikit banyak juga mempengaruhi berkembangnya bisnis prostitusi, seperti kebijakan yang ditetapkan di Filipina. Kebijakan politik keamanan khususnya kontrak Filipina terhadap Amerika Serikat (AS) dengan mendirikan pangkalan militer di Subic dan Clark di masa lalu telah mengubah kedua wilayah tersebut menjadi daerah yang dinamis dan berkembang ekonominya, akan tetapi bermuculan pula tempat-tempat hiburan yang menyediakan pelacuran anak untuk mencukupi kebutuhan seks para prajurit. Kemudian ada pula kebijakan di Thailand yang memicu terjadinya prostitusi, yaitu kebijakan pemerintah Thailand mengenai pariwisata yang lengkap dengan segala promosi, destinasi wisata dan fasilitas-fasilitas penunjangnya menyebabkan Thailand dikenal dengan *image* negatif yaitu surga seks untuk wisatawan.

Salah satu bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)⁵ yang akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian dunia adalah Pariwisata Seks Anak

⁴Altman, D. 2007. *Global Sex, Politik Seks, Komersialisasi Tubuh dan Hubungan Internasional*. Jakarta: Qalam. Hlm 5

⁵Istilah ESKA berasal dari *Commercial Sexual Exploitation of Children* Hasil dari kongres di Stockholm tahun 1996. Istilah ini dipopulerkan dan dibahasa indonesiakan oleh kalangan LSM di Indonesia menjadi ESKA. Istilah ESKA ditulis dalam Jurnal "Peran ECPAT dalam Menangani CSEC oleh Wisatawan Asing" oleh Eka Mulyani Lestari, Universitas Udayana.

(PSA).⁶ Isu ESKA diangkat ke dalam diskusi internasional oleh kongres dunia pertama melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Stockholm, Swedia pada tanggal 27-31 Agustus 1996 dan kongres tersebut dihadiri oleh 122 negara dan juga di hadiri oleh delegasi lainnya seperti *Non-Governmental Organization (NGO)* dan lembaga antar pemerintah serta dari sektor hiburan. Total jumlah peserta kongres yang hadir saat itu sebanyak 1.300 orang.⁷ PSA ini menjadi suatu kecemasan sendiri bagi masyarakat global karena di dalam PSA terdapat praktik-praktik menjual atau memperdagangkan anak-anak sebagai objek seks.

Adanya Pariwisata Seks Anak memberikan kesempatan bagi kaum *Pedofilia* berkunjung ke suatu negara yang menawarkan PSA. *Pedofilia* merupakan istilah untuk menerangkan salah satu penyimpangan seksual, dimana individu tersebut memiliki ketertarikan abnormal terhadap anak-anak.⁸ Hal tersebut kemudian menjadikan anak-anak sebagai sasaran yang empuk karena anak-anak cenderung mudah untuk didapatkan, murah dan selalu laku dijual. *Sex tourism* merupakan istilah yang digunakan untuk perjalanan dengan maksud untuk terlibat dalam aktifitas seksual. *The United Nation World Tourism Assosiation* mendefinisikan mengenai *sex tourism* dalam *Global Code Ethics for Tourism* atau kode etik pariwisata global mereka sebagai perjalanan yang diselenggarakan dari dalam sektor pariwisata atau dari luar sektor ini, tetapi menggunakan struktur dan jaringan dengan tujuan utama untuk mempengaruhi hubungan seks komersial oleh turis dengan penduduk lokal.⁹ *World Vision Australia* memperkirakan sekitar

⁶Heatwatch. About Commercial Sexual Exploitation of Children.

http://www.heatwatch.org/human_trafficking/aboutcsec. Diakses pada 27 September 2016

⁷ ECPAT International. 1997. *Commercial Sexual Exploitation of Children : A report on the Implementation of the Agenda for Action adopted at the First World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children*. Bangkok : ECPAT International

⁸Beatrice K. *Paedophilia* Antara Dosa dan Kelainan Jiwa. <https://id.scribd.com/doc/68898455/PAEDOPHILIA>. Diakses pada 11 Juni 2016.

⁹Martin, P. 2013. Human Trafficking Stories From Boston to Bangkok. Diakses pada 22 Maret, dari <http://www.schusterinstituteinvestigations.org/#!/human-trafficking-boston-to-bangkok-3/c4jy>.

250.000 turis mengunjungi Asia tiap tahunnya untuk aktivitas seksual dengan anak-anak di bawah umur, dengan 13% turis berasal dari Australia.¹⁰ Pariwisata seks inilah yang membuat semakin berkembangnya bisnis perdagangan anak, karena permintaan jasa seks anak juga semakin besar. Anak-anak yang diperdagangkan biasanya berumur dibawah 18 tahun. Perdagangan anak-anak dibawah umur ini dikarenakan permintaan turis untuk mendapatkan anak-anak yang masih perawan cukup besar¹¹, mereka menganggap jika anak-anak apalagi yang masih perawan tidak memiliki resiko terjangkit penyakit menular seksual. Meningkatnya jumlah permintaan anak-anak sebagai objek seks ini, menimbulkan banyak anak-anak yang terjangkit berbagai macam PMS (Penyakit Menular Seksual) serta virus HIV/AIDS.

Thailand sebagai salah satu area destinasi wisata dunia juga tidak dapat terlepas dari kasus ESKA. Prostitusi di Thailand sudah berkembang sangat besar, terutama prostitusi yang pekerja utamanya adalah anak-anak di bawah umur. Prostitusi di Thailand mulai ramai terjadi semenjak adanya krisis ekonomi 1997, sejak itu Thailand menjadi pusat prostitusi dunia. Anak-anak Thai Dataran Rendah yang tidak memiliki pendidikan susah mencari pekerjaan sehingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam bisnis prostitusi ini. Hingga kini prostitusi yang dilakukan oleh anak-anak kian bertambah jumlahnya. Studi yang dilakukan oleh Simon Baker pada tahun 2000 menemukan bahwa tidak sedikit remaja belia yang masih sekolah bekerja paruh waktu merangkap sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Para pekerja yang merangkap sebagai PSK ini lazimnya disebut dengan istilah *jaitaek*. *Jaitaek* ini merupakan istilah orang Thailand untuk menyebut anak-anak perempuan yang berperilaku buruk dan menyimpang, seperti

¹⁰Carolyn L, Lindsay A and Victor W. Sex Trafficking in the Tourism Industry. *Journal of Tourism and Hospitality*. Vol. 4, (No.4): Hlm 2

¹¹Suyanto, B. 2013. *Child Trafficking dan Industri Seks Global*. *Jurnal UNAIR: Sosiologi*. Vol.7, (No.1): 140

kecanduan narkoba dan terlibat ke dalam pergaulan bebas khususnya melakukan seks bebas.¹²

Sebagian anak-anak di Thailand menjadi korban ESKA didorong oleh keluarganya sendiri dan untuk beberapa kasus persoalan ekonomi bukan menjadi dasar mereka terjun ke dalam bisnis prostitusi ini. Bahkan untuk seorang PSK yang memiliki tingkat pendidikan yang bagus dihargai lebih mahal yang pelanggannya biasanya adalah para politisi atau pengusaha. SAIS *Protection Project*¹³ pada tahun 2002 memperkirakan jumlah anak-anak yang terlibat bisnis prostitusi di Thailand mencapai 50.000-70.000 orang. Bahkan ILO memperkirakan jumlahnya bisa mencapai 100.000-200.000 anak.¹⁴

Thailand sebagai salah satu negara dengan destinasi pariwisata terbesar di Asia Tenggara tidak dapat terlepas dari pengembangan ekonomi yang terfokus pada pengembangan pariwisatanya. Pemerintah Thailand memberlakukan berbagai macam promosi untuk menarik jumlah wisatawan untuk berkunjung ke negaranya. Selain keindahan alamnya yang sangat menarik wisatawan, wisata seks di Thailand juga tidak kalah menarik. Pariwisata seks di Thailand sangat besar, dan ada banyak sekali pria yang datang ke Thailand tiap tahunnya untuk liburan dan menikmati wisata seks disana. Pria yang datang ke Thailand tidak hanya tertarik untuk berhubungan dengan para wanitanya saja melainkan kaum *Lady Boy* atau *Waria (Kathoe)* juga masuk ke dalam jajaran yang terlibat dalam penyuguhan wisata seks di Thailand. Hal ini karena kecantikan *Lady Boy*

¹²Baker, S. 2000. *The Changing Situation of Child Prostitution in Northern Thailand: A Study of Cangwat Chiang Rai*. Bangkok: ECPAT International.

¹³SAIS (*School of Advanced International Studies*) *Protection Project* adalah sebuah lembaga penelitian hak asasi manusia berbasis di *The Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies* di Washington DC. *Protection Project* berfokus kepada mempromosikan nilai-nilai hak manusia dan supremasi hukum di seluruh dunia dengan terlibat dalam penelitian akademik, melakukan pelatihan, dan program *fellowship* berfokus kepada isu-isu perempuan dan hak-hak anak, termasuk perdagangan dan pekerja anak.

¹⁴Taylor, L. 2005. *Dangerous Trade-offs : The Behavioral Ecology of Child Labor and Prostitution in Rural Northern Thailand*. *Journal of Anthropology*. Vol. 46,(No. 03): 411

Thailand sudah sangat terkenal.¹⁵ Wisata seks di Thailand begitu terkenal diakibatkan karena harga yang ditawarkan termasuk murah, seperti pelayanan pijat plus-plus dibandrol dengan harga sekitar 200 Bath (sekitar Rp 60.000) hingga 1000 Bath (sekitar Rp 300.000)¹⁶. Wisata seks di Thailand ini bisa dijumpai di beberapa daerah di Thailand diantaranya di Bangkok, Phuket dan Pattaya.¹⁷ Bisnis prostitusi ini juga salah satu penyokong devisa terbesar untuk Thailand yaitu sekitar US \$4.3 miliar atau setara dengan Rp 57.5 triliun pertahun.¹⁸

Setiap negara menjamin untuk melakukan tindakan untuk memerangi *human trafficking* terutama kegiatan eksploitasi anak, PBB melalui ILO sudah mengeluarkan Konvensi ILO atau *Worst Form of Child Labour Convention* nomor 182 tentang pekerja anak, Konvensi ini memperkuat Konvensi Hak-hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang disetujui melalui *General Assembly resolution* nomor 44/25 tanggal 20 November 1989. Kedua konvensi tersebut diperkuat dengan adanya *Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* yang merupakan salah satu dari tiga protokol yang masih berkaitan dengan CRC. OPSC diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Mei tahun 2000, dan mulai berlaku pada Januari tahun 2002.¹⁹

Thailand melakukan ratifikasi terhadap tiga konvensi PBB tersebut untuk mengurangi jumlah eksploitasi seksual komersial anak. Salah satu bentuk implementasi dari pemerintah Thailand karena telah meratifikasi Konvensi Hak

¹⁵*Thailand Sex Guide Dream Holiday Asia*. Diakses pada 24 Maret 2016, dari <http://dreamholidayasia.com/destination/thailand-guide/thailand-sex-guide/>.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸Sex Laws in Thailand Part 2: Laws Regulating Commercial Sex and Entertainment Places. <http://www.thailawforum.com/sex-crimes-in-thailand-part2.html>. Diakses pada 30 Mei 2016

¹⁹A Future Without Child Labour : Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221124169_EN/lang--en/index.htm. Diakses pada 30 Mei 2016

Anak adalah dengan membuat Undang-undang mengenai anak yang dikenal dengan *Child Protection Act* pada tahun 2003. Undang-undang dalam pasal ini berlandaskan pada pasal-pasal yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak PBB. Selain itu untuk mengurangi jumlah prostitusi anak yang awalnya menjadi korban *trafficking*, pemerintah Thailand merumuskan kebijakan *Anti-Trafficking in Persons Act*. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan perbaikan dari *Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Child Act* tahun 1997 yang dianggap belum dapat mengkoordinir semua keselamatan manusia terhadap *human trafficking* terutama laki-laki.²⁰ Laki-laki biasanya dipekerjakan sebagai buruh di perusahaan perikanan.

Thailand melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya dan mengubahnya menjadi *The Anti-Trafficking in Persons Act* pada tahun 2008. Undang-undang tersebut fokus kepada kasus perdagangan manusia. Kebijakan nasional tersebut meliputi instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang perdagangan manusia seperti protokol perdagangan manusia dari PBB. Pemerintah Thailand terus berusaha membuat kebijakan lanjutan untuk memperbaiki dan menguatkan undang-undang sebelumnya, seperti *The National Plan of Action (NPA) to Eliminate the Worst Forms of Child Labor (2009–2014)*, dan *The National Policy, Strategy, and Measures for the Prevention and Suppression of Trafficking in Persons (2011–2016)*.²¹ Sehubungan dengan itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand disesuaikan dengan substansi protokol perdagangan manusia tersebut.

Meskipun Pemerintah Thailand telah membuat kebijakan-kebijakan di atas, namun jumlah anak yang menjadi korban ESKA di Thailand tetap mengalami kenaikan. Hal ini dibuktikan melalui data dari *Global Witness* yang menunjukkan bahwa jumlah anak-anak yang terlibat dalam prostitusi di Thailand justru mengalami peningkatan dari 100.000-200.000 anak di tahun 2002 menjadi sekitar

²⁰Human Trafficking Report : Thailand. www.humantrafficking.org/countries/thailand. Diakses pada 30 Mei 2016

²¹Thailand: 2014 Findings on the Worst Forms of Child Labor, Significant Advancement. Diakses pada 24 Januari 2016, dari <http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/thailand>.

800.000 anak di tahun 2011.²² Bertambahnya jumlah anak-anak yang terlibat dalam prostitusi memunculkan sejumlah permasalahan lain yaitu banyaknya jumlah anak yang menderita HIV/AIDS. Hampir separuh anak-anak yang bekerja di dunia prostitusi di Thailand sekitar 47% menurut UNAIDS pada tahun 2014 mengidap HIV/AIDS.²³ Untuk mengatasi kasus ini Thailand telah membuat kebijakan yaitu, *National AIDS Strategic Plan (NASP) for 2014-2016*. Selain masalah HIV/AIDS, beberapa program pemerintah yang ditujukan khusus untuk mengatasi masalah prostitusi ini masih belum berjalan dengan baik. Tahun 2013, ada 674 kasus *Human Trafficking* yang tidak dapat diselidiki secara tuntas oleh pemerintah, 520 diantaranya termasuk kasus eksploitasi seksual dan prostitusi.²⁴

Selain permasalahan diatas, Thailand sendiri masuk ke dalam peringkat 10 besar *ranking* dunia dalam *Global Slavery Indeks* tahun 2013-2014 dikarenakan masih banyak terjadi perbudakan modern di Thailand, salah satu bentuk dari perbudakan modern adalah Prostitusi.²⁵ Thailand juga menduduki *Tier three* (Tingkat Ketiga) yang merupakan ranking terburuk dalam laporan tahunan US *Government Trafficking in Persons*, karena aksi pemerintah Thailand yang sangat terbatas dalam menangani semua bentuk perbudakan modern di negaranya.²⁶

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Hambatan Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak”**

²² Widiadana, A.R. 2013, Oktober 22. Pavena Hongsakula: Giant leap against child prostitution. Diakses pada 2 Februari 2016, dari <http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/22/pavena-hongsakula-giant-leap-against-child-prostitution.html>.

²³UNAIDS. Thailand AIDS Response Progress Report. Diakses pada 12 Juni 2016, dari http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/THA_narrative_report_2015.pdf.

²⁴*The Global Slavery Indeks 2014*. Hlm : 92. Diakses pada 12 Juni 2016, dari http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2014/11/GlobalSlavery_2014_LR-FINAL.pdf.

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan ringkasan pertanyaan yang dimunculkan untuk dijawab dalam sebuah penelitian. Dalam skripsi ini permasalahan yang diajukan mengacu pada adanya kesenjangan antara upaya keras yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand untuk mengatasi masalah eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). Fakta yang ada, yakni masih tingginya tingkat eksploitasi seksual komersial anak di Thailand. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut : **“Mengapa Pemerintah Thailand mengalami hambatan dalam mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menentukan tujuan penelitian, kita harus melihat kepada masalah yang diajukan dalam penelitian. Inti dari tujuan penelitian berisi tentang kontribusi hasil penelitian terhadap kepentingan keilmuan atau kepentingan-kepentingan lainnya yang bersifat praktis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan Pemerintah Thailand dalam menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak.

1.4 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, ruang lingkup pembahasan memiliki kedudukan yang cukup penting. Dengan ditetapkannya ruang lingkup pembahasan, penelitian dapat lebih fokus pada kajian yang akan dianalisis. Pembahasan masalah akan berkembang ke arah sasaran yang tepat dan tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan. Ruang lingkup pembahasan terdiri dari dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.4.1 Batasan Materi

Batasan materi berfungsi untuk menunjukkan ruang pembahasan suatu peristiwa atau objek yang dianalisis, yaitu cakupan kawasan atau objek studinya. Batasan materi diperlukan agar masalah yang dibahas dalam penelitian lebih

fokus dan tidak melebar. Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan terhadap hambatan-hambatan Pemerintah Thailand dalam menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA).

1.4.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang dimaksudkan disini adalah mengenai rentangan waktu mulai kapan dan sampai kapan materi kajian ini berlangsung. Penulis memberikan batasan waktu dari tahun 2008, karena pada tahun inilah pertama kali kebijakan *The Anti-Trafficking in Persons Act* pertama kali dikeluarkan hingga pada tahun 2016 ketika Thailand masuk ke dalam peringkat *tier 2 watch list* dalam *Trafficking in Person*. Artinya Pemerintah Thailand meskipun telah mendekati standar minimum dari *Trafficking Victim in Person* tetapi usaha tersebut masih belum cukup untuk menghentikan segala bentuk perbudakan modern sehingga dibutuhkan pengawasan khusus.

1.5 Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan tahapan penting dalam penulisan karya ilmiah. Landasan konseptual menunjukkan posisi penulis dari sudut mana dia melihat apa yang diteliti. Landasan konseptual dapat berisi mengenai konsep-konsep atau teori yang disusun secara sistematis untuk membantu penulisan dan pemahaman analisis yang dilakukan. Menurut Robert K. Yin konsep-konsep dalam suatu kerangka pemikiran dapat menunjukkan atau memuat abstraksi teori yang kemudian dapat menganalisis fenomena yang ada.²⁷ Dengan demikian dalam karya tulis ilmiah ini, adapun landasan konseptual yang digunakan dalam menganalisis fenomena prostitusi anak di Thailand adalah :

²⁷ Yin, K. R. 2011. *Qualitative research from start to finish*. New York : the guilford press. Hal: 93

1.5.1 Eksploitasi Seksual Komersial Anak

ESKA Atau Eksploitasi Seksual Komerisal Anak adalah salah satu jenis pelanggaran terberat yang terjadi pada hak anak. Deklarasi dan rencana aksi menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak mendefinisikan ESKA sebagai segala bentuk kekerasan pada anak terutama dalam bentuk seksual oleh orang dewasa. Selain melakukan tindakan seksual, termasuk memberikan upah kepada anak maupun pihak-pihak lainnya juga terhitung masuk ke dalam ESKA. *“Sexual abuse by the adult and remuneration in cash or kind to the child or a third person or persons.”*²⁸ ESKA merupakan proses dimana anak-anak diposisikan sebagai objek seksual yang diperjual-belikan, *“the child is treated as a sexual object and as a commercial object”* dan juga ESKA merupakan suatu bentuk kerja paksa, *“a form of coercion and violence against children, and amounts to be forced labour and a contemporary form of slavery.”*

ESKA memiliki berbagai macam bentuk. Setiap bentuk tersebut memiliki dampak yang sama terhadap anak itu sendiri maupun masyarakat dimana ESKA tersebut terjadi. Bentuk-bentuk utama dari Eksploitasi Seksual Anak merupakan pelacuran pada anak, pornografi dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Selain bentuk-bentuk utama tersebut, ESKA juga memiliki bentuk-bentuk lainnya. Pariwisata seks anak serta pernikahan pada anak usia dini ialah salah satu bentuk khusus dari pelacuran anak. Ada berbagai macam alasan mengapa ESKA dapat terjadi, diantaranya adalah karena ketidak setaraan gender, tingkat ekonomi masyarakat yang tidak merata, permintaan hubungan sek pada anak, konflik, perilaku konsumtif yang luar biasa. Tidak satupun negara yang mampu mengatasi persoalan ESKA sekalipun berbagai jebis pengalaman dan respon pribadi bisa berbeda antara satu orang dan yang lainnya.

Selama 15 tahun terakhir ini, bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang paling mendapat perhatian publik, baik dari media ataupun dari masyarakat dunia sendiri ialah persoalan PSA atau Pariwisata Seks Anak. PSA biasanya

²⁸ECPAT. *Declaration and Agenda for Action : 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children. Stockholm, Sweden, 27-31 August 1996.* http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/stockholm_declaration_1996.pdf. Diakses pada 16 September 2016

terjadi di beberapa tujuan wisata, bahkan di beberapa tempat yang tidak memiliki prasarana wisata sama sekali. PSA adalah ujian berat bagi dunia dan juga merupakan tantangan bagi para industri perjalanan wisata yang sedang berkembang. PSA kerap kali dilakukan oleh individu maupun kelompok individu yang sedang melakukan perjalanan lintas daerah atau bahkan negara hanya untuk melakukan hubungan seks dengan anak dibawah umur. Wisatawan ini biasanya berasal dari wisatawan domestik maupun internasional.²⁹

Konsumen ESKA terbesar merupakan wisatawan asing. Patricia Green³⁰ seorang pendiri Rahab internasional³¹ Pitchard dan Morgan ahli pariwisata³² dan Heather A. Pieters³³ yang mengulas prostitusi anak dalam dunia pariwisata. Keempat penulis ini memiliki pendapat yang sama bahwa ESKA terjadi karena empat faktor. Meskipun penelitian ini tidak berfokus kepada wisatawan asing saja, tetapi pendapat mereka cukup kuat untuk dijadikan dasar pada penelitian ini. Berikut adalah empat faktor yang menyebabkan terjadinya ESKA:

1. Kemiskinan : Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang membuat banyak sekali orang mencari pekerjaan kemana saja tanpa memperhatikan resiko dari pekerjaan tersebut. Minimnya kesadaran seseorang dalam mencari pekerjaan dan kurangnya pengetahuan serta bahaya dari bisnis prostitusi dan cara yang digunakan dalam perekrutan korbannya membuat seseorang lebih mudah tergiur masuk ke dalam bisnis prostitusi.

²⁹Sofian, A. 2008. *Memerangi Pariwisata Anak*. Bangkok : ECPAT Internasional. Hlm : 6

³⁰Green, P. 2001, Agustus 1. Thailand : Tourism and the Sex Industry. Women Magazine. Diakses pada 16 September 2016, dari <https://www.highbeam.com/doc/1G1-94123246.html>.

³¹ Seperti kelompok pendukung bagi perempuan-perempuan yang ingin keluar dari prostitusi, mereka memberikan dukungan dengan mengenalkan ajaran agama kristen

³²Pitchard, A., dan Morgan, J. N. 2000. Privileging The Male Gaze : Gender Tourism Landscape. *Journal of Tourism*. Vol. 27, (No.24): 04

³³ Peters, A. H. 2006. Sex, Sun and Heritages Tourism Threats and Opportunities : Report on Best "Practices" on Tourism and Trafficking for UNIAP and World Vision. Diakses pada 27 September 2016, dari <http://www.notip.org.cn/UserImages/00001903.pdf>.

Seperti juga di jelaskan oleh Erika Wright dalam tulisannya di *BorgenMagazine* bahwa kemiskinan merupakan alasan utama seseorang masuk ke dalam bisnis prostitusi. Kemiskinan inilah yang membuat mereka mudah sekali untuk dijadikan korban eksploitasi,

*“poverty is the primary driving force behind woman becoming prostitutes. Prostitution is a repression of women and children, and utilizes the vulnerability of poverty to further exploit them”*³⁴

Erika juga mengatakan alasan mengapa korban mudah sekali masuk ke dalam prostitusi dikarenakan prostitusi merupakan suatu bentuk pekerjaan yang tidak memiliki persyaratan khusus sehingga akan sangat mudah merekrut mereka yang miskin dan tidak memiliki keahlian khusus untuk masuk ke dalam prostitusi. Selain itu, sekitar satu juta anak-anak di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan hal ini secara tersirat juga menjelaskan mengapa ESKA di dunia masih sangat tinggi.

2. Pengaruh Budaya : Budaya yang telah mengakar pada kehidupan masyarakat memposisikan perempuan sebagai subyek yang lemah dan posisi anak yang dituntut untuk membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah, diyakini menjadi salah satu faktor mereka dapat terjerumus ke dalam prostitusi. Dr. Mohini Giri mengatakan bahwa prostitusi telah berakar jauh di dalam struktur masyarakat, karena perkembangan prostitusi sendiri sudah selama peradaban manusia. Selain itu keyakinan agama dan adat istiadat juga memberikan alasan bagaimana asal mula prostitusi ini berawal.³⁵
3. Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat : Faktor ini menjadi salah satu faktor yang cukup krusial dalam terjadinya ESKA karena jika seseorang anak yang berasal dari desa, tidak memiliki pendidikan yang cukup dan ditambah dengan tidak memiliki keterampilan, mereka akan memiliki

³⁴ Wright, E. 2015, Agustus 4. The Link Between Poverty and Prostitution. Diakses pada 23 September 2016, dari <http://www.borgenmagazine.com/prostitution-poverty/>.

³⁵ Giri, V. M. 1999. *Kanya : exploitation of little angles*. New Delhi: Gyan.

sedikit kesempatan dalam mencari pekerjaan. Menurut Melissa Farley, awal mulanya terjadinya ESKA tidak dapat terlepas dari bisnis prostitusi. Prostitusi bukanlah sebuah pilihan, selama ini prostitusi selalu digambarkan sebagai “pilihan yang dibuat oleh mereka yang tidak memiliki pilihan”. Dalam bisnis ini mereka akan dipaksa oleh diskriminasi gender, diskriminasi ras, kurangnya pendidikan formal atau tidak memiliki pendidikan, dan kemiskinan.³⁶ Selain itu Melissa juga mengatakan rendahnya pengetahuan terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS) membuat mereka semakin tidak memahami resiko dari pekerjaan ini.

4. Permintaan dari Wisatawan Asing terhadap Anak-Anak untuk dijadikan Objek Seksual : Munculnya permintaan wisatawan asing terhadap anak-anak merupakan salah satu dampak dari adanya pariwisata seks. Biasanya mereka melakukan permintaan ini untuk memuaskan hasrat seksual fantasi mereka dan sebagai bahan untuk pornografi. Selain itu juga dikarenakan harga yang dipatok cukup murah menambah minat bagi para wisatawan asing khususnya yang datang dari Barat. Menurut Patricia D. Levan, anak-anak sangat mudah menjadi “persediaan” karena selalu hadir “permintaan” terutama dari sektor pariwisata seks. Industri pariwisata telah menciptakan begitu banyak keuntungan bagi seorang germo³⁷ yang mencari anak-anak muda untuk menjaga negara mereka tetap kompetitif, dalam hal ini adalah bisnis prostitusi. Para wisatawan asing ini mencari PSK muda dan membayar mahal bagi keperawanannya dengan harapan dapat

³⁶ Farley, M. 2006. Prostitution, trafficking and cultur amnesia : What we must known in order to keep the business of sexual exploitation running smoothly. *Yale journal of Law and Feminism*. Vol.18, (No.109): 110

³⁷ Germo merupakan seseorang yang menjadi induk semang atau pemilik dari PSK, atau biasa disebut dengan mucikari. Mereka juga kadang merangkap menjadi seseorang yang mencari korban yang rentan untuk kemudian dijerumuskan menjadi PSK.

menghindari wabah AIDS yang telah banyak menjangkiti para pelaku atau orang-orang yang bekerja dalam bisnis prostitusi.³⁸

Dari empat faktor yang dijelaskan diatas dirasa akan dapat menjelaskan alasan mengapa pemerintah Thailand mengalami kesulitan dalam upaya mengatasi bisnis prostitusi anak. Keempat faktor ini dirasa sesuai dengan penjelasan latar belakang masalah sebelumnya.

1.5.2 Teori *Habitus* oleh Pierre Bourdieu

Dalam penulisan ini, Teori *Habitus* digunakan sebagai teori penunjang dari pemikiran para ahli diatas. *Habitus* merupakan kebiasaan yang sudah melekat pada diri setiap individu dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat tertentu. *Habitus* juga merupakan suatu kebiasaan atau kapasitas terlatih yang cenderung terjadi secara terstruktur dalam pikiran individu pada komunitas tertentu, kebiasaan yang terlatih, terbiasa dan ada dalam akal pikiran seseorang kemudian secara alamiah membimbing mereka dalam bertindak.³⁹ *Habitus* lahir dan tumbuh dalam kelompok sosial secara alamiah dan melalui proses yang panjang dan terinternalisasi dalam diri setiap individu dan terakulturasi dalam komunitas sosial tersebut menjadi kebiasaan yang terstruktur dan menjadi budaya. *Habitus* hadir melalui proses sosial yang tidak disengaja, bukan dari individu tertentu yang mengarahkan pada pola transformasi dari suatu konteks tertentu kepada konteks lainnya, akan tetapi habitus selalu bergeser dalam kaitannya dari konteks tertentu ke konteks sosial lainnya dari waktu ke waktu.⁴⁰

³⁸ Levan, P. D. 1994. Curtailing Thailand's Child Prostitution Through an International Conscience. *American University Journal of International Law and Policy Review*. Vol. 9, (No. 3): 871.

³⁹ Navarro, 2006. Bourdieu and Habitus. Diakses pada 24 April 2016, dari <http://www.powercube.net/other-forms-of-power/bourdieu-and-habitus/>.

⁴⁰ *Ibid*

*The habitus is not only a structuring structure, which organizes practices and the perception of practises, but also a structured structure : the principle of division into logical classes which organizes the perception of the social world is itself the products of internalization of the division into social classes.*⁴¹

Habitus tidak hanya merupakan struktur yang menstruktur, yang menyelenggarakan praktik dan persepsi praktik, tetapi juga struktur yang terstruktur: prinsip pembagian ke dalam kelas logis yang menyelenggarakan persepsi dunia sosial itu sendiri merupakan produk dari internalisasi divisi ke kelas sosial.

Habitus merupakan struktur yang terbentuk, dibentuk dan membentuk dalam satu komunitas sosial atau kelompok masyarakat yang menjadi praktik-praktik sosial kelompok tersebut dalam kesehariannya. Kemudian dari struktur yang terstruktur tersebut akan berubah menjadi kebiasaan dan kesadaran serta sikap dan pola pikir yang “tertanam” dalam diri seseorang dalam komunitas sosial tersebut. Proses-proses ini terjadi melalui internalisasi pada setiap kelas dan kelompok sosial. *Habitus* hadir dengan dipengaruhi oleh adanya modal sosial yang ada pada ranah sosial dan kemudian memunculkan praktek sosial itu sendiri.

Di dalam buku John Lechte, dijelaskan bahwa habitus merupakan suatu jenis ungkapan penanaman pola pikir atau kebiasaan tidak sadar dari orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan dari ruang sosial tertentu. Suatu tatanan perilaku praktik sosial yang dipakai sebagai pembeda antar kelas yang mendominasi dan kelas yang didominasi dalam arena sosial tertentu.⁴² Kemudian dijelaskan kembali dalam buku Pierre Bourdieu bahwa habitus dapat dianalogikan sebagai sebuah logika permainan (*feel for the game*), sebuah rasa praktis (*practical sense*) yang mendorong agen atau individu untuk bertindak pada situasi khusus dengan cara yang tidak selalu bisa dikalkulasikan sebelumnya dan bukan

⁴¹Bourdieu, P. 1996. *Distinction : A social critique of the judgement of taste*. Cetakan ke-8, translated by Richard Nice. Cambridge. Harvard University Press. Hlm 8

⁴²John L, 2004. *50 Filsuf Kontemporer dari Strukturalisme sampai Postmodernitas*. Cetakan ke 3, diterjemahkan oleh A. Gunawan Admiranto. Yogyakarta: Kanisius. Hlm 82

sekedar kepatuhan sadar akan aturan, akan tetapi sesuatu yang terjadi secara alamiah, sesuatu yang sudah melekat pada pola pikir dan kebiasaan individu.⁴³

Habitus akan tampak ketika beberapa variabel seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, minat, artistik, selera dan lainnya yang kemudian terkait satu dan yang lain secara statistik. Hubungan tersebut terkait dengan yang disebut Bourdieu sebagai suatu perkumpulan perwatakan khusus.

Gambar 1.1 : Rumus Teori Habitus

$$(Habitus \times Modal) + Ranah = Praktik$$

Sumber : (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik, Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu tahun 2010

Modal (kapital) merupakan sesuatu yang memungkinkan individu mendapatkan kesempatan dalam hidupnya. Ada beberapa jenis modal, seperti modal budaya (latar belakang dan jaringan), modal intelektual (pendidikan), dan modal ekonomi (uang).⁴⁴ Modal memiliki peran yang cukup penting dalam hubungan sosial, modal menyediakan suatu sarana dalam membentuk kelas sosial yang membedakan dirinya. Modal atau kapital merupakan simbol dalam kehidupan sosial untuk membedakan kelas atau kelompok sosial dalam masyarakat.

Arena merupakan suatu ruang tertentu yang ada di dalam masyarakat, ada beberapa arena dalam kehidupan sosial masyarakat, diantaranya arena pendidikan, arena bisnis, arena seniman, arena politik dan arena sosial lainnya pada komunitas sosial yang lain.⁴⁵ Arena adalah suatu ruang dengan aturan yang sudah terstruktur dengan fungsi yang khas namun tidak berjalan kaku dan terpisah dari arena lainnya, karena setiap arena, setiap modal akan saling berkaitan

⁴³Bourdieu, P. 2012. *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Cetakan ke 2, diterjemahkan oleh Yudi Santosa. Bantul: Kreasi Wacana. Hlm XVI

⁴⁴Wattimena, AA. R. 2012. Berpikir Kritis bersama Pierre Bourdieu. Diakses pada 24 April 2016, dari <http://rumahfilsafat.com/2012/02/2014/sosiologi-kritis-dan-sosiologi-reflektif-pemikiran-pierre-bourdieu/>.

⁴⁵*Ibid*

menjadi variabel dan melahirkan suatu praktek sosial. Habitus membentuk dan mengubah arena sesuai dengan struktur dan arena juga membentuk habitus dengan cara kerja dan strukturnya. Arena mensyaratkan agen atau individu yang menempati posisi tertentu yang tersedia dalam berbagai arena atau ruang sosial untuk terlibat dalam usaha perjuangan memperebutkan dominasi sumber daya dan modal atau kapital yang dibutuhkan untuk memperoleh kekuasaan, kelas dan posisi tertentu dalam sebuah arena.

Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa arena merupakan suatu konsep dinamis di mana perubahan posisi agen atau individu pada kelas sosialnya dapat menyebabkan perubahan pada struktur arena. Pada arena apapun individu atau Bourdieu menyebutnya sebagai agen sosial, yang menempati berbagai macam posisi atau menciptakan posisi baru terlibat dalam pertarungan memperebutkan kuasa dan kontrol kepentingan atas sumberdaya yang khas dalam arena tertentu. Kekuasaan, kepentingan dan control sumberdaya yang dipertaruhkan di dalam arena tidak selalu berbentuk materi, dan tidak selalu didasarkan pada kalkulasi secara sadar, akan tetapi seringkali tak terlihat dan tidak dapat dikalkulasikan.

Ada dua bentuk modal atau kapital yang sangat penting dalam arena produksi kultural, yaitu :

1. Modal simbolis adalah modal yang mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, kehormatan yang dibangun diatas dialektika pengetahuan.
2. Modal kultural adalah modal yang banyak menyoroti berbagai bentuk pengetahuan kultural, kompetisi atau disposisi tertentu. Kemudian Bourdieu mendefinisikan modal kultural atau kapital kultural sebagai suatu kognisi yang melengkapi individu atau agen sosial dengan suatu empati terhadap apresiasi dan kompetisi di dalam pemilihan relasi jenis potongan kultural.

Di Thailand sendiri jika dihubungkan dengan teori ini memiliki kesamaan karena kondisi di masyarakat Thailand masih dipengaruhi oleh adanya modal (kapital) yang di fasilitasi oleh adanya arena yang kemudian memunculkan suatu praktik-praktik sosial yaitu praktik prostitusi pada masyarakat Thailand dan

menjadikannya suatu praktik yang biasa dan seakan menjadi kultur dari komunitas mereka. Hal ini dimaksudkan bahwa modal: modal pendidikan, modal ekonomi, dan modal historis atau budaya, yang membentuk sebuah ruang khusus pada masyarakat Thailand. Sehingga membentuk pola pikir bahwa seorang perempuan Thailand memiliki peran yang penting, yaitu harus menjadi tulang punggung keluarganya, bekerja keras dan menjadi penentu kelas mereka dalam masyarakat. Begitulah sejarah menjadi pengetahuan dan mengkonstruksi masyarakat Thailand, bahwa perempuan harus melakukan apapun untuk mendapatkan modal atau capital ekonomi atau kebiasaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga mereka agar bisa membawa dan membentuk kelas sosial yang baik untuk keluarganya. Karena modal merupakan simbol dari pembentukan kelas dan membedakan antar kelas satu dengan kelas lainnya, salah satunya adalah modal ekonomi

Dari yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek prostitusi yang telah berakar di dalam masyarakat Thailand disebabkan karena adanya Habitus yang di dukung oleh adanya Modal dan di fasilitasi oleh adanya ranah dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan, budaya, pola pikir dan konstruk pengetahuan sosial secara historis. Oleh karena itu, berdasarkan dari teori Habitus ini, penulis akan lebih memfokuskan penelitian berdasarkan indikator pertama dari tiga indikator yang ada dalam teori ini untuk menjawab rumusan masalah, yaitu Habitus. Hal ini di rasakan sangat relevan untuk mendukung konsep awal yaitu ESKA terjadi karena adanya faktor pengaruh budaya masyarakat. Habitus dianggap dapat menjelaskan lebih jauh mengenai suatu kebiasaan atau pola pikir dalam masyarakat sehingga akhirnya pengaruh budaya dapat menjadi salah satu faktor terjadinya ESKA.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama menjadi penting dirumuskan untuk menjawab pertanyaan sementara dari rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis. Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran diatas, maka argumen utama dalam penelitian ini adalah Pemerintah Thailand mengalami kesulitan dalam menangani ESKA karena 4 hal. Pertama, kondisi masyarakat yang miskin membuat praktek prostitusi anak tetap subur, mudahnya akses dan cepatnya mendapat uang menjadi pendorong kuat. Kedua, pengaruh budaya masyarakat Thailand yang memposisikan wanita lebih rendah dari pria membuat prostitusi menjadi hal yang lumrah di Thailand. Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan sehingga masyarakat Thailand hanya memiliki sedikit pilihan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Keempat, terus meningkatnya permintaan turis terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seksual membuat bisnis ini susah untuk berhenti.

1.7 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode memiliki peranan yang sangat vital. Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu syarat untuk melakukan penelitian. Penggunaan metode dalam suatu penelitian bertujuan mendapatkan kerangka teori dan data-data yang dibutuhkan, sehingga karya tulis menjadi ilmiah, sistematis, dan kronologis. Dalam prosesnya, penelitian ini memerlukan teknik dalam pengumpulan data dan analisis data. Penjelasan dari kedua metode yang penulis gunakan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data lebih terfokus pada informasi-informasi atau kajian yang diperoleh dari buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan informasi dari instansi-instansi yang terkait dengan peristiwa tertentu. Selain itu, data-data juga diperoleh dari media internet agar dapat memberikan informasi yang lebih menunjang untuk analisis. Jadi, sumber data yang digunakan adalah

sumber data sekunder. Artinya, penulis tidak terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan data yang valid dan mencukupi, penulis menggunakan beberapa pusat informasi, diantaranya :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Buku-buku koleksi pribadi
4. Surat kabar/koran
5. Jurnal-jurnal
6. Media Internet

1.7.2 Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, harus menggunakan proses berpikir yang baik pula. Tahap analisis data ditunjukkan untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif-kualitatif.⁴⁶ Dalam mengkaji masalah ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif karena data yang diperoleh tidak dapat diukur secara statistik-matematis. Data kualitatif hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena secara *real* dan apa adanya. Dalam melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian, peneliti harus mencermati secara kritis dan hati-hati terhadap perspektif teoritis yang digunakan, sehingga nantinya dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat membuktikan argumen utama yang ada.

Dalam penulisan skripsi ini, mayoritas data yang digunakan adalah data sekunder. Dimana data sekunder yang digunakan berupa data pendukung kualitatif lain yang mencerminkan sikap, perilaku, pandangan dan ideologi seseorang, yang tercermin dalam berbagai bentuk publikasi, baik cetak maupun elektronik. Berdasarkan analisis data itulah, kesimpulan dalam proses menjawab permasalahan dilakukan.

⁴⁶ Kartini, K. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju. Hlm : 10

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran umum dari karya tulis ini penulis mengajukan sistematika penulisan sebagai berikut :

a. **BAB 1 . PENDAHULUAN**

Bab ini terdapat beberapa poin, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. **BAB 2 . KERANGKA HUKUM DALAM MENGHADAPI ESKA DI THAILAND**

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran kerangka hukum apa saja yang berhubungan mengenai ESKA agar dapat lebih memahami instrumen hukum yang di jadikan dasar oleh pemerintah Thailand dalam menekan adanya ESKA.

c. **BAB 3. FAKTOR PENYEBAB ESKA DI THAILAND**

Bab ini akan berisi tentang identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya ESKA di Thailand

d. **BAB 4. UPAYA DAN HAMBATAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENGATASI ESKA**

Bab ini akan memberikan analisa terhadap upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Thailand dalam menghadapi ESKA dan juga menganalisa mengenai hambatan yang didapatkan oleh Pemerintah Thailand dalam penanganan ESKA.

e. **BAB 5. KESIMPULAN**

Bab ini adalah penutup, berisi kesimpulan yang menjelaskan tentang inti dari keseluruhan penelitian ini

BAB 2. Kerangka Hukum Dalam Menghadapi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand

Eksploitasi seksual komersial biasanya paling sering terjadi dalam bisnis prostitusi. Tidak seperti prostitusi yang dilakukan pada usia dewasa, prostitusi anak menurut *International Labour Organization* (ILO) diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk yang dilakukan anak-anak sebagai buruh. Berasal dari alasan inilah kemudian dibuat kerangka hukum mengenai eksploitasi seksual komersial anak, tujuan inti dari kerangka hukum ini tidak hanya untuk mencegah ESKA tetapi juga untuk melindungi anak dari segala macam bentuk eksploitasi. Segala teknik perekrutan anak untuk industri seks, dianggap merupakan suatu bentuk eksploitasi anak yang melanggar hukum internasional tentang hak asasi manusia. Meskipun misalnya hal tersebut merupakan kesediaan anak yang bersangkutan, tetapi hal ini tetap dianggap sebagai suatu bentuk eksploitasi.

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai kerangka legal hukum yang akan dibagi menjadi tiga lingkup yaitu kerangka hukum internasional, regional, dan domestik dalam hal eksploitasi seksual komersial anak sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal ini diperlukan untuk memahami setiap instrumen hukum yang ada dalam menghadapi isu perdagangan anak, sekaligus juga memberikan penjelasan bagaimana ketentuan dari hukum internasional diterapkan ditingkat regional dan domestik. Selain itu, dengan adanya penjelasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah Thailand dalam menghadapi isu perdagangan anak melalui kebijakan domestik pemerintah Thailand.

2.1 Konvensi Hak-Hak Anak atau KHA (*The Convention on The Rights of the Child atau CRC*)

Konvensi hak-hak anak bukan hanya menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah, yaitu sebanyak 192 negara meratifikasi perjanjian ini kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Konvensi internasional ini pun juga menjadi yang pertama kali mencampurkan beberapa hak-hak ke dalam instrumennya serta mengikat secara hukum yaitu hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan hak-hak sosial manusia.⁴⁷ Konvensi Hak Anak memiliki dua subjek sebagai sorotan pembahasannya, yaitu anak-anak sebagai subjek perlindungan dan anak-anak sebagai subjek hak. Tidak seperti dokumen internasional sebelumnya, yaitu Deklarasi Hak-Hak Anak Jenewa (1924) dan Deklarasi Hak Anak (1959)⁴⁸, Konvensi Hak Anak tidak hanya menegaskan kembali status penting anak-anak dalam masyarakat, tetapi juga menekankan pada peran anak sebagai warga negara aktif yang layak diperlakukan secara baik.

Panduan dasar dalam CRC mewakili lima pilar hak-hak yang terdapat di dalam konvensi tersebut. Hal ini sangat penting dalam menentukan sifat dari hak-hak yang termasuk dalam konvensi. Dalam pengertian ini, Pasal 1 menjelaskan definisi seorang anak, untuk menetapkan standar minimum ketika mengimplementasikan CRC. *“the Convention defines a ‘child’ as a person below the age of 18, unless the laws of a particular country set the legal age for adulthood younger.”*⁴⁹. Pilar kedua, terkandung dalam pasal 2 yang membantu dalam membangun sebuah prinsip non-diskriminasi terlepas dari segala jenis kondisi budaya, etnis, atau agama anak.

Sementara itu, pilar ketiga memastikan untuk kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang akan diambil dan bagaimana pengaruh dari keputusan tersebut untuk mereka. Pasal 3 kemudian menyatakan sebagai berikut :

⁴⁷UNICEF. Convention on the Rights of the Child. Diakses pada 30 Agustus 2016, dari http://www.unicef.org/crc/index_30229.html.

⁴⁸Humanium. Declaration of the Rights of the Child. <http://www.humanium.org/en/childrens-rights-history/references-on-child-rights/geneva-declaration/>. Diakses pada 30 Agustus 2016

⁴⁹CRC, Artikel 1

“All adults should do what is best for children. When adults make decision, they should think about how their decisions will affect children. This particularly applies to budget, policy and law maker.”⁵⁰

Pilar ini dilengkapi dengan pasal 6, yang berisi mengenai hak anak-anak untuk hidup, serta kewajiban pemerintah untuk melindungi anak *“ensure that children survive and develop healthily”*.⁵¹ Pasal ini penting dalam hal melindungi hak-hak anak. Pilar keempat mengatakan bahwa anak-anak telah memiliki hak semenjak mereka lahir, hal itu tertulis dalam pasal 7 yang mengatakan bahwa

“the child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.”

Hak anak-anak yang mereka miliki sejak mereka lahir adalah hak untuk mendapatkan nama, dan kebangsaan serta hak untuk mengetahui orangtua mereka. Pilar ini pun juga diperkuat dengan pasal 8 yang menegaskan bahwa *“states parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference”*. Menekankan peran pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak dari semenjak dia lahir sesuai dengan hukum nasional. Dan negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta mengurus secepat mungkin jika seorang anak secara ilegal mendapatkan masalah mengenai identitasnya, *“wherea a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, states parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity.”*

Kemudian, pilar kelima yang mengakui pentingnya peran aktif anak-anak dalam melaksanakan hak mereka. Dalam hal ini, pasal 12 menetapkan aspek partisipatif anak dikeputusan yang mempengaruhi perkembangan mereka. Hak untuk berpartisipasi tidak terbatas pada mendengarkan, tapi benar-benar untuk

⁵⁰CRC, Artikel 3

⁵¹CRC, Artikel 6

mengekspresikan pendapat mereka dalam topik-topik yang menyangkut anak-anak.⁵² Dengan demikian, pandangan menyeluruh mengenai masa kanak-kanak dari perspektif CRC tidak berakhir dalam perlindungan anak sebagai objek masyarakat saja, tetapi perlindungan anak-anak sebagai subjek hak. CRC secara garis besar telah membuat suatu aturan yang jelas untuk anak-anak mengenai hak-hak mereka dan peran pemerintah dalam menangani hak-hak anak. Aturan dalam pasal-pasal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah Thailand dalam merumuskan undang-undang di negaranya, salah satunya yaitu *Child Protection Act*.

2.1.1 CRC dan Isu Perdagangan Anak

Setelah membahas mengenai lima pilar yang berfungsi sebagai persyaratan umum untuk semua hak yang menyangkut anak, penting juga untuk mengidentifikasi bagaimana CRC berhadapan dengan isu pekerja anak dan prostitusi anak. Ada lima pasal dalam CRC yang terkait langsung dengan isu perdagangan anak, yaitu : Pasal 32, 33, 34, 35, dan 36⁵³. Semua pasal tersebut memiliki pendekatan terhadap isu pekerja anak dari kategori dan kondisi yang harus dijamin secara berbeda, seperti Pasal 32 (1) mengakui pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan Pasal 32 (2) mencegah negara untuk mengambil langkah-langkah bagi anak-anak yang bekerja di daerah yang bukan merupakan pekerjaan yang berbahaya bagi mereka.⁵⁴

Prostitusi merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, tetapi secara umum CRC lebih menekankan pada pentingnya untuk melindungi anak-anak terlepas dari segala bentuk pekerjaan yang dimana anak-anak terlibat di dalamnya. Contohnya seperti dalam Pasal 33 yang menawarkan sebuah langkah-langkah pendekatan dari berbagai aspek “*appropriate measures, including*

⁵²CRC, Artikel 12

⁵³Lebih jelas soal pasal-pasal ini bisa dilihat dalam lampiran 1 tentang naskah CRC

⁵⁴CRC, Artikel 32

legislative, administrative, social, and educational measures”⁵⁵ untuk melindungi anak-anak dari penggunaan obat-obatan terlarang seperti juga halnya dari kasus perdagangan. Selain itu, ada pasal 34, yang sebenarnya membahas masalah perdagangan anak. Pasal ini tidak hanya mengharuskan pihak negara untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, tetapi juga mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah kerjasama dengan negara lain, yaitu :

“State parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral, and multilateral measures to prevent :

- a. *The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity ;*
- b. *The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices (...)*⁵⁶

Meskipun ketentuan ini tidak secara jelas mengatakan dalam aspek “perdagangan” eksploitasi seksual, fakta bahwa CRC mengakui pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain dalam pencegahan eksploitasi anak, memberikan nilai lebih terkait isu perdagangan anak. Selain itu, definisi dari “unlawful sexual activity”, dalam pasal ini secara eksplisit mengatakan prostitusi masuk sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual. Hal ini terlihat dalam Pasal 35, poin tanggung jawab “*all appropriate national, bilateral, and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form*”.⁵⁷ Menurut pasal itu, negara-negara tidak hanya diharapkan dan dipaksa untuk mengambil langkah-langkah saja, tetapi juga untuk mengambil semua langkah-langkah disemua tingkatan untuk melindungi anak dari perdagangan. Selain itu, negara-negara harus memperhitungkan isu perdagangan anak tanpa memperhatikan bentuk dan tujuan.

Pasal 36 bertindak sebagai tambahan dari pernyataan sebelumnya, dengan menegaskan kembali bahwa tugas negara adalah untuk melindungi anak-anak

⁵⁵CRC, Artikel 33

⁵⁶CRC, Artikel 34

⁵⁷CRC, Artikel 35

“against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of children’s welfare”.⁵⁸ Mengingat prostitusi anak sebagai suatu bentuk perdagangan anak tetapi bukan satu-satunya bentuk, pendekatan langsung dari tanggung jawab negara dalam mencegah perdagangan anak-anak merupakan suatu langkah maju dalam pencapaian hak asasi manusia. Selain kewajiban negara untuk melindungi anak-anak, CRC juga menetapkan melalui Pasal 39 mengenai hak anak-anak korban eksploitasi untuk dapat berbaur kembali dalam lingkungan sosial *“in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child”*.⁵⁹

CRC telah mengatakan secara jelas apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi isu perdagangan anak sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap anak. Meskipun CRC merupakan suatu bentuk kerangka hukum Internasional dan telah diratifikasi oleh Thailand pada tahun 1992, tetapi CRC tidak langsung berefek kepada hukum di Thailand. Pemerintah Thailand harus mengadopsinya ke dalam hukum domestik negaranya untuk dapat memberikan efek secara hukum. Jika ada kontradiksi antara hukum nasional dan CRC, hukum nasional yang tetap akan menang. Thailand sendiri meskipun telah mengikuti aturan-aturan yang dianjurkan oleh CRC, tetapi menurut laporan terakhir Thailand pada tahun 2012 Thailand masih harus mengevaluasi banyak hal dalam pengimplementasiannya terhadap CRC, seperti : memastikan perundang-undangan terkait isu perlindungan anak, memperkuat langkah-langkah dan badan-badan yang berkaitan langsung terhadap isu perlindungan anak.⁶⁰

⁵⁸CRC, Artikel 36

⁵⁹CRC, Artikel 39

⁶⁰UNICEF : Thailand, 2004. *The Convention on the Right of Child (CRC)*. Diakses pada 20 Oktober 2016, dari http://www.unicef.org/thailand/overview_4010.html.

2.1.2 *The Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the sale of Children, child prostitution and child pornography (OPSC)* atau Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Sama pentingnya dengan menetapkan standar minimum untuk menjamin penuh perkembangan anak-anak, CRC tidak cukup spesifik untuk membuat negara bertanggung jawab atas isu perdagangan anak. Isu perdagangan anak pertama kali diangkat ke dalam diskusi internasional sebagai isu global pada awal tahun 1974, ketika sebuah Kelompok Kerja Perbudakan didirikan.⁶¹ Sejak saat itu, PBB terus memprioritaskan isu eksploitasi anak bersamaan dengan perkembangan wacana hak asasi manusia. OPSC merupakan salah satu dari tiga protokol opsional CRC yang berhubungan dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang utamanya dihadapi oleh anak-anak di seluruh dunia.

OPSC diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 25 Mei tahun 2000, mulai berlaku pada 18 Januari 2002. OPSC lebih memperhatikan langkah penting menuju langkah-langkah konkret untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, seperti diantaranya adalah kasus perdagangan. Berbeda dengan CRC, OPSC tidak mencantumkan definisi atau pengertian dari “anak”. Hal ini akhirnya mengarahkan kepada asumsi bahwa cakupan dari OPSC sama dengan yang ada pada CRC yaitu pada pengertian usia yang terdapat pada Pasal 1 dalam CRC, anak adalah semua yang berumur di bawah 18 tahun. Tetapi, dalam Pasal 1 dari CRC juga menyebutkan bahwa standar tersebut berlaku “*unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*”⁶² Hal ini menjadi sesuatu yang terbilang ambigu hingga akhirnya menimbulkan suatu kritik yang relevan, terutama ketika datang dari negara-negara dimana prostitusi merupakan suatu praktek hukum. Dalam kasus ini, perlindungan anak-anak yang terlibat dalam industri seks berjuang melawan hukum domestik suatu negara yang mungkin

⁶¹UNICEF, 2009. *Handbook on the Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*. Florence : Innocenti Publications. Hlm 3

⁶²CRC, Artikel 1

menganggap individu sebagai orang dewasa di usia yang sangat dini. Contohnya adalah kasus yang terjadi di Iran, yang menerapkan usia kedewasaan dari seorang gadis adalah pada usia 9 tahun, dan untuk laki-laki adalah usia 15 tahun.⁶³ Penetapan usia kedewasaan untuk anak-anak di negara ini terbilang masih sangat dini, dibandingkan dengan negara-negara lain yang menetapkan seorang anak mencapai kedewasaan di usia 18 tahun.

Meskipun kurangnya definisi eksplisit mengenai seorang anak, tetapi OPSC langsung memulai dengan ketentuan tugas negara untuk “melarang” penjualan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak yang telah disediakan oleh protokol. Pasal 2 memberikan definisi dari praktek-praktek yang dilarang dalam kerangka kerja instrumen ini, dan pada Pasal 3 menggaris bawahi terhadap tindakan, “*yang paling minimum*”, dan harus “*sepenuhnya dilindungi*” oleh undang-undang pidana dari pihak negara. Dalam hal ini, prostitusi anak tidak hanya secara eksplisit didefinisikan oleh OPSC sebagai segala bentuk penggunaan anak baik diberikan upah maupun bentuk-bentuk lainnya “*the use of a child in sexual activities for remuneration or any other form of consideration*”⁶⁴, tetapi juga diharapkan akan dipahami sebagai suatu bentuk tindakan kriminal yang memerlukan prosedur pidana dari negara.

Kewajiban negara dalam OPSC mungkin diidentifikasi ke dalam empat kategori yang bersama-sama bertujuan untuk mencapai perlindungan yang menyeluruh dan menguntungkan untuk anak-anak. Pertama adalah kategori tindak kejahatan, yang terkandung dalam pasal 4 sampai 7, yang mencakup isu-isu seperti yuridiksi, ekstrateritorial, ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan perampasan hasil serta perangkatnya. Kemudian, ada juga kategori perlindungan korban, yang termasuk dalam Pasal 8 sebagai langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara selama proses penuntutan, memastikan bahwa kepentingan yang terbaik untuk anak harus diutamakan “*in the treatment by the criminal*

⁶³UNICEF, 2011. *The state of the World's Children 2011 : Adolescence an age of Oppurtunity*. New York : UNICEF. Hlm 8

⁶⁴OPSC, Artikel 2(b)

justice system of the children who are victims of the offences described in the protocol, the best interest of the child shall be a primary consideration.”⁶⁵

Pasal 9 membawa perhatian ke kategori tindakan negara untuk mengatasi pencegahan dan pengobatan bagi korban. Dengan demikian, negara harus memperkuat hukum dan segala bentuk kebijakan mengenai perlindungan anak *“states parties shall adopt or strengthen, implement and disseminate laws, administrative measures, social policies and programmes to prevent the offences referred to in the Protocol.”*⁶⁶

Selain itu ketentuan lainnya juga menekankan pada perhatian khusus yang harus diberikan kepada anak-anak yang rentan menjadi korban eksploitasi *“to protect children who are especially vulnerable to these practices.”*⁶⁷ Seperti yang telah ditunjukkan, ruang lingkup pencegahan tidak terbatas pada upaya negara-negara untuk menyebarkan hukum dan untuk meningkatkan kesadaran, tapi lebih jauh, mengharapkan negara untuk bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan melindungi anak-anak dari resiko perdagangan. Untuk alasan ini, Pasal 10 dari OPSC termasuk sebagai kategori terakhir yaitu kerjasama internasional untuk penghapusan perdagangan anak. Menurut ketentuan ini, menyatakan negara untuk memperkuat kerjasama internasional dengan cara multilateral, regional, bilateral *“for the prevention, detection, investigation, prosecution and punishment of those responsible for acts involving the sale children, child prostituion, child pornography and child sex tourism.”*⁶⁸

Meskipun OPSC tidak secara eksplisit mengatakan “wisata seks” sebagai kejahatan, tetapi hal itu langsung terkait dengan tindak pidana yang tercakup dalam Protokol, karena sering melibatkan prostitusi anak dan pornografi anak (mereka yang melakukan eksploitasi pelacuran anak sering merekam kegiatan

⁶⁵OPSC, Artikel 8(3)

⁶⁶OPSC, Artikel 9(1)

⁶⁷*Ibid*

⁶⁸OPSC, Artikel 10(1)

mereka dalam film), dan mungkin juga melibatkan penjualan anak.⁶⁹ Menurut Pasal 10 (1), menyatakan negara juga harus meningkatkan semua bentuk kerjasama mereka dengan organisasi pemerintah maupun non pemerintah “*promote international cooperation and coordination between their authorities, national, and international non-governmental organization and international organization.*”⁷⁰ Pada baris yang sama, pasal 10 (3) menetapkan bahwa kerjasama-kerjasama tersebut harus juga bisa mengatasi akar permasalahan “*address the root causes, such as poverty and underdevelopment*”⁷¹ sebagai faktor perdagangan anak. Tidak diragukan lagi, OPSC merupakan instrumen yang baik untuk memerangi perdagangan anak, mengingat pendekatan menyeluruh untuk implementasi, tidak hanya berfokus pada penuntutan tetapi juga dalam pemulihan dan reintegrasi korban.

Seperti CRC, Thailand telah meratifikasi OPSC pada 11 Januari 2006, dan telah mengadopsinya ke dalam kebijakan negaranya yaitu *Anti-trafficking in Person Act (ATP)* pada tahun 2008. Berbeda dengan OPSC, ATP sendiri lebih berfokus kepada isu perdagangan manusia, sedangkan OPSC secara eksplisit membahas isu penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak. Kemudian, definisi pelanggaran yang dijelaskan dalam OPSC, sayangnya hanya ditetapkan oleh resolusi menteri 23 November 2005 di Thailand yang tidak memiliki status hukum. Hal ini sangat disesalkan, karena tidak semua definisi pelanggaran yang ada dalam OPSC dengan benar didefinisikan ke dalam undang-undang negara.

⁶⁹UNICEF, 2009. *Handbook on the Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*. Florence : Innocenti Publications. Hlm 12

⁷⁰OPSC, Artikel 10(1)

⁷¹OPSC, Artikel 10(3)

2.1.3 ILO (*International Labour Organization*) :

Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Konvensi internasional lainnya yang masih berfokus terhadap isu eksploitasi anak adalah konvensi ILO mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (“Bentuk-bentuk terburuk dari Konvensi Pekerja Anak” No.182) dan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan orang, terutama Perempuan dan Anak, melengkapi konvensi PBB yang menentang Kejahatan Transnasional yang terorganisir (Protokol Palermo).

Pada tahun 1973, ILO mengadopsi konvensi No.138 yang mewakili upaya yang luar biasa untuk menghapuskan pekerja anak. Dengan membentuk batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Konvensi ILO No. 138 mengklasifikasikan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut : Pekerjaan berbahaya, usia minimum dasar, dan pekerjaan ringan. Ketiga kategori tersebut adalah sesuai dengan dua kriteria tambahan: usia minimum dimana anak-anak dapat mulai bekerja, dan kemungkinan pengecualian bagi negara-negara berkembang.

Kategori mengenai pekerjaan berbahaya termasuk dalam Pasal 3, yang menetapkan bahwa kegiatan yang membahayakan keselamatan seorang anak tidak boleh dilakukan oleh anak usia dibawah 18 tahun “*any work which is likely to jeopardize children’s health, safety or morals should not be done by anyone under the age of 18*”.⁷² Pengecualian aturan tersebut adalah pada usia 16, tetapi selama itu terjadi dibawah “*kondisi yang ketat*”. Kategori kedua yang terkandung dalam Pasal 2(3) menyatakan bahwa usia minimum seorang anak untuk bekerja tidak boleh kurang dari usia penyelesaian pendidikan wajib dan/atau tidak boleh kurang dari usia 15 tahun “*the minimum age specified shall not be less than age of completion of compulsory schooling and, in any case, shall not less than 15*

⁷²Konvensi ILO No.138 (3)

years.”⁷³ Sedangkan kategori ketiga, mengikuti pembentukan usia minimum dengan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan “pekerjaan ringan”. Menurut pasal 7, anak-anak diizinkan untuk melakukan pekerjaan ringan selama pekerjaan tersebut tidak mengancam keselamatan maupun mengganggu pendidikan seorang anak “*Children between the ages of 13-15 years old may do light work, as long as it does not threaten their health and safety, or hinder their education or vocational orientation and training.*”⁷⁴

Pengecualian aturan untuk negara-negara berkembang, bervariasi antara usia 12 sampai 14 tahun tergantung pada kebutuhan konteks. Meskipun standar minimum yang ditetapkan oleh Konvensi ILO No. 138 adalah langkah-langkah yang relevan terkait pencegahan pekerja anak, tetap ada beberapa celah hukum, khususnya yang berkaitan dengan arti khusus dari “pekerjaan ringan”, serta sejauh mana kriteria yang dikategorikan sebagai “negara-negara berkembang”. Di sisi lain, ada Konvensi ILO NO. 182 yang diadopsi pada tahun 1999 yang benar-benar membutuhkan tindakan segera dari negara-negara untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak “sebagai hal yang mendesak”. Tidak seperti OPSC, Konvensi No.182 secara eksplisit mencakup definisi anak sesuai dengan CRC. Konvensi 182, mendefinisikan beberapa hal yang merupakan “bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak” dalam Pasal 2, yaitu :

- a. *All form of slavery or practices similiar slavery , such as the sale and trafficking of children ; (...)*
- b. *The use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or pornographic performances; (...)*
- c. *Work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or moral of children.*⁷⁵

Sama halnya dengan OPSC, Konvensi No. 138 berbicara mengenai kerangka kerja dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan kategori yang berbeda, seperti pelacuran anak, pornografi anak, dan perdagangan narkoba.

⁷³Konvensi ILO No.138 (2:3)

⁷⁴Konvensi ILO NO. 138 (7)

⁷⁵Konvensi ILO No.182 (3)

Sedangkan Konvensi 182 melengkapi Konvensi 138, yang kemudian memberikan kerangka dasar untuk aksi nasional dan internasional dalam penghapusan pekerja anak. Dalam hal ini, Konvensi No. 182 berfokus pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai target prioritas, sementara Konvensi No.138 mengatur tujuan jangka panjang dari penghapusan pekerja anak secara efektif, dan juga menjelaskan apa yang harus ditargetkan dalam hal mengenai pekerja anak dengan menyediakan usia standar minimum.⁷⁶

Pasal 6 dalam Konvensi 182 menyatakan bahwa setiap negara anggota harus memiliki dan menjalankan rencana aksi sebagai bentuk prioritas negara dalam usaha menghilangkan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak *“each member shall design and implement programmes of action to eliminate as a priority the worst forms of child labour.”*⁷⁷ Dengan memastikan isu pekerja anak sebagai “prioritas” masalah, pihak negara juga diharapkan untuk mengambil semua langkah yang diperlukan, terutama langkah hukum yang dianggap merupakan langkah yang efektif *“take all necessary measures to ensure the effective implementation and enforcement of the provisions (...) including the provision and application of penal sections or, as appropriate, other sanctions.”*⁷⁸

Demikian juga, Konvensi ini menyoroti bersama-sama pentingnya aspek legislatif dengan memperhitungkan pendidikan dalam penghapusan pekerja anak, dengan mengambil langkah-langkah yang efektif dan terikat waktu untuk :

- a. *Prevent the engagement of children in the worst forms of child labour*
- b. *Provide the necessary and appropriate direct assistance or the removal of children from the worst forms of child labour and for their rehabilitation and social integration (...)*
- c. *Identify and reach out to children at special risk.” (...)*⁷⁹

⁷⁶United Nation. Child Labour. Diakses pada 30 Agustus 2016, dari <http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/childlabour/intlconvsh.html>.

⁷⁷Konvensi ILO No.182 (6)

⁷⁸Konvensi ILO No.182 (7:1)

⁷⁹Konvensi ILO No. 182 (7:2)

Konvensi No.182 menekankan pada pentingnya untuk menggabungkan langkah-langkah efektif dalam menjamin pembentukan kembali hak untuk anak-anak korban dari pekerja anak, juga mendorong negara anggota untuk memperkuat kerjasama internasional dan bergabung dalam tindakan untuk mengurangi faktor-faktor penyebab munculnya pekerja anak. Dengan demikian, Pasal 9 menyatakan bahwa “*enhanced international cooperation and/or assistance including support for social and economic development, poverty eradication programmes and universal education*”⁸⁰. Peningkatan kerjasama internasional diharapkan mampu untuk mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu peningkatan kerjasama dalam bidang pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan dan pendidikan yang menyeluruh untuk anak-anak. Thailand telah meratifikasi kedua konvensi ini, yaitu pada 11 Mei 2004 untuk Konvensi ILO no. 138 dan 16 Februari 2011 untuk Konvensi ILO no.182. Kedua konvensi ini memberikan kontribusi terhadap instrumen hukum yang ada di Thailand, seperti halnya CRC dan OPSC.

Kedua konvensi ini juga menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang dipertimbangkan dalam hal perlindungan anak, terutama yang berfokus pada isu pekerja anak. Dalam mengimplentasikan kedua konvensi tersebut selain mengadopsinya ke dalam undang-undang, pemerintah Thailand juga menjalankan beberapa program sosial dalam tujuan untuk mensosialisasikan isu pekerja anak ini, seperti *National and Provincial Operation Centers for Providing Assistance to Women and Child laborers* dan *Government Shelters for Trafficking Victim*.⁸¹

⁸⁰Konvensi ILO No.182 (9)

⁸¹*Thailand Significant Advancement. Diakses pada 20 Oktober 2016, dari <https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/reports/child-labor/findings/2014TDA/thailand.pdf>*

2.2 ASEAN dan Hak-Hak Anak

Seperti yang telah diuraikan selama ini, instrumen hukum internasional untuk memerangi perdagangan anak cenderung lebih banyak pada kerangka kerja CRC, OPSC, dan dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh ILO dalam kaitannya dengan usia minimum untuk diterima bekerja, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Meskipun demikian, kerangka kerja internasional saja tidak cukup sebagai dasar hukum dalam memerangi masalah perdagangan anak ini. Instrumen regional dan domestik sama pentingnya dengan instrumen internasional ketika dihadapkan dengan masalah hak asasi manusia. Tidak seperti Eropa, Afrika, dan Amerika. Asia tidak memiliki sistem regional untuk perlindungan hak asasi manusia.

Dalam penelitian ini, organisasi regional yang akan diperhitungkan dalam pendekatan mengenai instrumen hukum yang ada hubungannya dengan anak-anak adalah ASEAN (*Assosiaciation of Southest Asian Nations*). ASEAN pada dasarnya adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang dibentuk pada tahun 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.⁸² Saat ini, ASEAN memiliki 10 negara anggota yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Sebenarnya ASEAN bukan merupakan sebuah organisasi yang fokus utamanya adalah hak asasi manusia, tetapi selama beberapa dekade terakhir ini masalah hak asasi manusia telah mendapatkan ruang dalam agenda regional ASEAN.

Dalam hal ini, bab berikut akan menguraikan dokumen yang paling relevan yang telah diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN dalam kaitannya dengan hak-hak anak. Selain itu, juga akan menunjukkan lembaga-lembaga yang memiliki tugas untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak.

⁸²ASEAN. Organizational Overview. <http://asean.org/asean/about-asean/overview/>. Diakses pada 30 Agustus 2016

2.2.1 Deklarasi Komitmen untuk Anak di ASEAN atau *Declaration on the Commitments for Children in ASEAN* (2001)

Dokumen ini menegaskan kembali komitmen ASEAN terhadap promosi hak-hak anak serta mengangkat isu-isu mengenai kondisi anak di bawah umur. Hal ini diadopsi dalam tujuan menjamin komitmen ASEAN untuk memfasilitasi anak-anak dalam berekspresi sebagai salah satu cara perlindungan terhadap hak-hak anak “*create opportunities for children to express their views, advocate their rights and participate in development*”.⁸³ Khususnya, deklarasi ini menganjurkan pemerintah untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk tindak kejahatan terhadap anak “*of violence, abuse, neglect, trafficking and exploitation*”⁸⁴ didalam semua bidang pembangunan mereka.

Selain Deklarasi ini telah memiliki prioritas yang jelas, lebih jauh lagi Deklarasi ini juga menyarakan tindakan terhadap isu-isu struktural, sebagai salah satu cara untuk melawan efek buruk dari pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diberikan kepada anak-anak. Dalam hal ini, Pasal 8 menyarakan untuk negara agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi usia dewasa, karena keluarga merupakan salah satu kunci penting dalam pengembangan anak “*create employment opportunitities for adult family members in ASEAN countries, as stable families are the key to the social, physical and emotional development of children.*”⁸⁵

Meskipun Deklarasi ini tidak mewakili ketentuan yang mengikat bagi negara-negara ASEAN, tapi Deklarasi ini sangat terbuka untuk membawa perhatian negara-negara ASEAN kepada isu-isu yang dihadapi oleh anak-anak di Asia Tenggara. Sebagai bentuk implementasi dari deklarasi ini, Thailand seringkali mengadakan program-program untuk anak-anak dan remaja agar dapat memberikan partisipasinya khususnya pada masalah hak-hak anak.

⁸³ASEAN. Declaration on the commitments for Children in ASEAN, Artikel 6

⁸⁴*Ibid.* Artikel 15

⁸⁵*Ibid.* Artikel 8

Beberapa program tersebut juga dilakukan dengan bekerjasama dengan beberapa NGO yang juga memiliki tujuan yang sama. Contoh program pemerintah Thailand seperti *The National Council for Child and Youth Development* (NCYD) yang bermitra dengan *The International Youth Foundation* dalam pelaksanaan program-programnya. NYCD beranggotakan 65 anak-anak dan organisasi pemuda diseluruh Thailand dan merupakan badan koordinasi nasional untuk upaya pengembangan anak-anak dan remaja. Program ini menargetkan orang-orang muda yang berusia 5-20 tahun terutama yang tinggal didaerah pedesaan dan anak jalanan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui perbaikan pendidikan, membangun jiwa kepemimpinan para pemuda melalui organisasi kepemudaan, dan mendistribusikan kebutuhan informasi tentang anak muda di Thailand.⁸⁶

2.2.2 ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR)

AICHR diresmikan pada tahun 2009 sebagai badan konsultatif yang merupakan bagian dari struktur ASEAN.⁸⁷ Salah satu mandat utamanya adalah untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental antara negara-negara anggota ASEAN.⁸⁸ Demikian pula, AICHR juga dibentuk dibawah fungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia diantara negara-negara ASEAN melalui pendidikan, penelitian, dan penyebaran informasi. Berbeda dengan deklarasi yang telah dijelaskan sebelumnya, lembaga ini mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia.

⁸⁶ Innovation in Civic Partisipation. Thailand : Global Youth Service Database. Diakses pada 30 Oktober 2016, dari <http://www.icicp.org/resource-library/icp-publications/global-youth-service-database/asia-and-the-pacific/southeast-asia/thailand/>

⁸⁷Child Right Coalition Asia. ASEAN and Child Rights. <http://childrightscoalitionasia.org/asean-and-child-rights/>. Diakses pada 2 September 2016

⁸⁸ASEAN. AICHR. Artikel 1.1

Sebagai bagian dari tujuannya, AIHCR dibentuk untuk menegakkan hak masyarakat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat, dan sejahtera.⁸⁹ Dalam hal ini, semua kebijakan yang diambil oleh negara-negara diharapkan untuk mempromosikan hak asasi manusia dalam konteks regional mengingat kekhasan nasional dan regional dan saling menghormati latar belakang sejarah, budaya, dan agama yang berbeda, dan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab.⁹⁰ Selain tujuan-tujuan tersebut, di dalam AICHR juga termasuk daftar prinsip-prinsip yang akan memandu tindakan negara-negara ASEAN terkait isu hak asasi manusia.

Sebagian prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan konsep prinsip ASEAN, yang dikenal dengan “ASEAN Way”. ASEAN Way merupakan sebuah konsep resmi yang menggambarkan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku bagi negara-negara di ASEAN dalam bertindak menghadapi suatu permasalahan.⁹¹ Dengan kata lain, ASEAN Way merupakan sebuah tata cara dari perilaku negara-negara di ASEAN; termasuk dalam pengambilan keputusan, serta fungsi lembaga di ASEAN. Dalam hal ini, karakteristik dalam ASEAN Way adalah sebagai berikut: penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggotanya dengan tidak ikut campur tangan terhadap masalah internal negara lain, mengusahakan resolusi konflik dengan tidak menggunakan kekerasan. Metode yang digunakan dalam manajemen konflik pada umumnya didasarkan pada musyawarah dan konsensus.⁹² Di bawah kerangka kerja ini diharapkan AICHR mampu untuk mendukung tindakan negara dalam:

- a.) *Respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member States.*
- b.) *Non-interference in the internal affairs of ASEAN Member States*

⁸⁹ASEAN. AICHR. Artikel 1.2

⁹⁰*Ibid.* Artikel 1.4

⁹¹Acharya, A. 2009. *Constructing a Security Community in South East Asia : ASEAN and the Problem of regional order*, Routledge, London, and New York. Hlm 76

⁹²OHCHR. Background on ASEAN. Diakses pada 2 September 2016, dari http://bangkok.ohchr.org/files/Regional_Dialogue_ASEAN_BackgroundPaper.pdf.

- c.) *Respect for the right of every Member State to lead its national existence free from external interference, subversion, coercion. (...)*⁹³

Bersama-sama dengan prinsip-prinsip tersebut, AICHR diciptakan dengan mandat yang secara khusus mencakup adopsi dari Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dengan pandangan membangun kerangka kerjasama hak asasi manusia melalui berbagai konvensi ASEAN dan instrumen lain yang berhubungan dengan hak asasi manusia.⁹⁴ Tujuannya agar negara-negara di ASEAN terus membuat ketentuan yang lebih spesifik tentang hak asasi manusia, hal ini membuat AICHR menjadi lembaga yang paling penting dari kawasan Asia Tenggara dalam kaitannya dengan pembelaan hak asasi manusia.

Thailand memiliki peranan penting dalam pembentukan AICHR yang kemudian diresmikan pada KTT ASEAN ke-15 pada 23-25 Oktober 2009, saat itu Thailand menjadi ketua pertemuan AICHR yang pertama. Thailand juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa AICHR akan menjadi pilar yang kuat untuk pengembangan HAM di ASEAN.⁹⁵ Thailand juga aktif berpartisipasi dan mendukung keterlibatan para stakeholder terkait di setiap wilayah ASEAN dalam proses penyusunan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, yang kemudian diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-21.⁹⁶ Dengan adanya AICHR, semakin memudahkan negara-negara di ASEAN dalam menangani masalah Hak Asasi Manusia. Isu HAM menjadi sangat penting di kawasan ini, mengingat masih banyak isu-isu pelanggaran HAM yang terjadi di ASEAN. AICHR juga membantu Pemerintah Thailand dalam mengatasi isu HAM, terutama pada

⁹³ASEAN. AICHR. Artikel 2.1

⁹⁴*Ibid.* Artikel 4.2

⁹⁵ Experience Thailand. What is Thailand's role in ASEAN? What are Thailand's contributions toward the evolution of ASEAN?. <http://www.thailandtoday.in.th/node/419>. diakses pada 27 Oktober 2016

⁹⁶*Thailand and ASEAN. Diakses pada 27 Oktober 2016, dari* <http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121207-114514-431514.pdf>.

masalah pelanggaran HAM terkait anak-anak dan wanita yang masih banyak kasusnya belum dapat ditangani dengan baik. Thailand

2.2.3 *The Hanoi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and Children (2010)*⁹⁷, and *The ASEAN Commisison on the Promotion and Protection of the Right of Women and Children (ACWC)*

Deklarasi komitmen untuk Anak-anak di ASEAN merupakan permulaan bagi kesediaan negara-negara di kawasan ASEAN untuk terus bekerja dalam hal perlindungan anak sebagai aspek yang diprioritaskan dalam agenda pembahasan di ASEAN. Deklarasi Hanoi memperkuat komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa peran perempuan dan anak-anak sepenuhnya bermanfaat bagi proses pembangunan masyarakat di suatu wilayah. Deklarasi Hanoi menyerukan pembentukan Komisi ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (ACWC) dan Forum Anak ASEAN (ACF).

Dari 21 Pasal yang termasuk dalam Deklarasi Hanoi, tiga diantaranya tertuju langsung kepada tanggung jawab negara untuk melakukan tindakan dalam mendukung hak-hak anak. Yang pertama adalah Pasal 4, yang menyatakan untuk memperkuat mekanisme kelembagaan dan pendekatan yang berpusat pada anak⁹⁸ dalam perencanaan, pemrograman dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi disemua tingkatan wilayah tersebut. Deklarasi hanoi menekankan pendekatan yang berpusat pada anak. Hal ini ditunjukkan di Pasal 16 yang mengatakan bahwa penting untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah tercapainya hak-hak anak mengenai kelangsungan hidup, perlindungan, pengembangan, dan partisipasi dalam cara yang “komprehensif dan

⁹⁷ Selanjutnya dalam penelitian ini *The Hanoi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and Children*, akan disebut dengan Deklarasi Hanoi untuk lebih mempersingkat dalam penulisan.

⁹⁸ *ASEAN. Hanoi Declaration on the Enhancement of Walfare and Development of ASEAN Women and Children*. Artikel 4

sistematis”.⁹⁹ Ide untuk mencapai tujuan secara komprehensif terletak pada tujuan organisasi untuk mempromosikan partisipasi anak dalam komunitas ASEAN melalui pembentukan Forum untuk Anak ASEAN (ACF) dan program terkait lainnya atau kegiatan lain.¹⁰⁰

ACWC didirikan pada tahun 2010 dengan mandat untuk memprioritaskan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak-anak dari ASEAN.¹⁰¹ Dengan mempromosikan pelembagaan partisipasi anak, ACWC bertujuan untuk menjadi lembaga tambahan dan bukan menjadi lembaga duplikat dari komite CRC. Dalam pengertian ini, ACWC bertugas untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan terkait di semua tingkatan, melalui pemberian bantuan teknis, pelatihan dan lokakarya, menuju terwujudnya hak-hak perempuan dan anak-anak.¹⁰² Demikian juga, ACWC bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada negara-negara anggota dalam menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi anak-anak.

Namun demikian, proses monitoring, bantuan proses pelaporan, dan promosi terkait HAM diharapkan dari ACWC yang berasal dari hasil peninjauan atau bukti-bukti mengenai situasi anak-anak dan perempuan di wilayah terkait. Menurut mandat, koleksi bukti-bukti ini akan muncul dari promosi studi dan penelitian yang berkaitan dengan situasi dengan maksud untuk mendorong pelaksanaan yang efektif dari hak-hak perempuan dan anak-anak di wilayah tersebut.¹⁰³ ASEAN memang memberikan peranan penting kepada ACWC terkait identifikasi terhadap isu HAM terutama pada perempuan dan anak-anak, tetapi tetap saja dalam mengenali masalah tersebut tanggung jawab utama untuk

⁹⁹ASEAN. *Hanoi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and Children*. Artikel 16

¹⁰⁰*Ibid.* Artikel 10

¹⁰¹ASEAN. *TOR ACWC*. Artikel 2.1

¹⁰²*Ibid.* Artikel 5.5

¹⁰³*Ibid.* Artikel 5.9

memajukan dan melindungi hak asasi manusia terletak pada masing-masing negara anggota.¹⁰⁴

Semua bentuk konvensi yang telah dilakukan oleh ASEAN sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu lebih memfokuskan terhadap perlindungan HAM terutama terhadap anak-anak dan perempuan. Hal ini sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi ke sepuluh anggota ASEAN, yaitu : CRC, OPSC dan ILO. Konvensi-konvensi ASEAN ini merupakan suatu bentuk implementasi terhadap ratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut. Thailand sendiri juga turut berkomitmen dalam konvensi regional ini. Salah satu bentuk komitmen dari Thailand adalah Thailand aktif dalam mengikuti workshop mengenai hak-hak anak yang diadakan oleh *Child Right Coalition Asia* maupun *Asean Children's forum*. Salah satu contohnya adalah daalam workshop yang diadakan pada 4 Mei 2011 di Jakarta, Thailand turut andil dalam mengirimkan delegasinya yang akan menyampaikan pesan dari masyarakat sipil terutama dari generasi muda yang berisi mengenai keprihatinan dan saran mereka terhadap ASEAN.

2.3 Hak-hak Anak dalam Hukum di Thailand

Prostitusi yang merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi seksual komersial, di Thailand mulai menjadi ilegal pada tahun 1928 dan hukum terhadap hal itu diperkuat pada tahun 1960. Meskipun statusnya ilegal, prostitusi telah menjadi bagian dari masyarakat Thailand, diam-diam diterima dan ditoleransi. Prostitusi yang terjadi dirumah bordil di pedesaan, di balik bar-bar yang ada di Bangkok, dan panti pijat. Penghasilan dari industri ini diperkirakan mencapai sekitar 3% dari perekonomian Thailand, atau sekitar Rp 5.5 triliun per tahun.¹⁰⁵ Pada tahun 90an, diberlakukan undang-undang domestik untuk mempromosikan perlindungan anak. Dengan demikian, pada tahun 1996 langkah pertama dari visi

¹⁰⁴ *Ibid.* Artikel 3.5

¹⁰⁵ Taipei Times. 2003, November 28. Thailand Holds debate on legalizing prostitution. Diakses pada 28 September 2016, dari <http://www.taipetimes.com/News/world/archives/2003/11/28/2003077555>.

kebijakan ini adalah menurunkan laju tak terbendung dari anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi seksual di negara ini.¹⁰⁶

Selain meratifikasi perjanjian internasional untuk mengatasi masalah perdagangan manusia, pemerintah Thailand memiliki cara tersendiri dalam melawan perdagangan anak dalam beberapa tahun terakhir, yaitu melalui dua tindakan spesifik legislatif, serta melalui peningkatan kerjasama melalui perjanjian bilateral. Bagian berikut akan menguraikan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Thailand menuju penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) sebagai komponen dari perdagangan manusia.

2.3.1 Undang-Undang Perlindungan Anak (*Child Protection Act* 2003)

Bersamaan dengan ratifikasi perjanjian internasional tentang hak-hak anak di tahun 90an, Undang-undang perlindungan anak tahun 2003 merupakan salah satu upaya paling konkret dari pemerintah Thailand untuk benar-benar memberikan posisi istimewa untuk anak-anak. Salah satu hasil yang paling signifikan dari Undang-undang ini yaitu memperkenalkan Komite Perlindungan Anak di tingkat provinsi untuk mengembangkan kebijakan yang relevan secara lokal dalam hal perlindungan anak.¹⁰⁷ Sebelum adanya Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran (1996)¹⁰⁸ adalah ukuran paling dekat yang diambil oleh pemerintah Thailand untuk mengatasi masalah eksploitasi anak.

Meskipun dalam Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2003 tidak menyebutkan prositusi anak di dalam daftar definisi, tetapi artikel 4 secara implisit mendefinisikan pelecehan seksual dalam kategori “penyiksaan”, sebagai berikut :

¹⁰⁶ Thailand. 1996. Prostitution Prevention and Suppression Act. Diakses pada 28 September 2016, dari <http://www.noct.m-society.go.th/human-traffic/law/download/la2-5en.pdf>.

¹⁰⁷ UNICEF. Child Protection ; Thailand. Diakses pada 28 September 2016, dari http://www.unicef.org/thailand/protection_3343.html.

¹⁰⁸ Prostitution Prevention and Suppression Act, *Op.cit*

“Touture” means any commission or omission of acts which cause the deprivation of freedom of, or mental or physical harm to, a child; sexual abuses committed against a child; inducement of a child to act or behave in manner (...) unlawful or immoral, regardless of the child’s consent.”¹⁰⁹

Menurut artikel 4, definisi penyiksaan merupakan segala bentuk perampasan kebebasan anak, serta segala tindakan yang membahayakan keselamatan anak baik fisik maupun mental. Penyiksaan juga termasuk dengan pelanggaran seksual terhadap anak. Pelanggaran seksual dimaksudkan adalah dimana anak-anak dipaksa untuk melakukan tindakan seksual yang melanggar hukum. Meskipun tidak semua kasus pelecehan seksual anak mewakili prostitusi, tetapi semua kasus prostitusi merupakan pelecehan seksual anak.

Undang-undang Perlindungan Anak juga mencakup eksploitasi dengan menggambarkan tindakan yang mewakili bahaya besar bagi perkembangan anak. Dalam hal ini Pasal 26 (5) menyatakan bahwa terlepas dari persetujuan anak, seseorang dilarang untuk melakukan segala bentuk tindakan pemaksaan maupun membujuk seorang anak untuk akhirnya terlibat ke dalam eksploitasi anak *“force, threaten, induce, encourage, consent to, (...) act in any way that results in the exploitation of a child.”¹¹⁰* Pada baris yang sama, Pasal 26 (6) mencegah seorang anak untuk melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan anak serta mengganggu pertumbuhan anak, *“use, employ or ask a child to work or act in such a way that might be physically or mentally harmful to the child, affect the child’s growth or hinder the child’s development.”¹¹¹*

Dalam setiap pelacuran anak perspektif ini merupakan praktek yang berbahaya dan traumatis bagi anak, tetapi yang lebih penting pelacuran anak memenuhi syarat sebagai suatu bentuk eksploitasi anak tanpa persetujuan anak. Menurut isi dari Undang-undang Perlindungan Anak, penjabaran paling eksplisit mengenai eksploitasi seksual terdapat dalam Pasal 26 (9) yang menyatakan bahwa

¹⁰⁹Child Protection Act 2003. Artikel 4

¹¹⁰Ibid. Artikel 26 (5)

¹¹¹Ibid. Artikel 26 (6)

pemaksaan, mengancam, menggunakan, membujuk, menghasut, mendorong atau memungkinkan seorang anak untuk melakukan atau bertindak dalam tindakan pornografi, terlepas dari apakah maksudnya adalah untuk mendapatkan upah atau apapun¹¹² merupakan sebuah kejahatan.

Meskipun makna pornografi anak dan pelacuran anak tidak sama, tetapi implikasi dari tindakan “sebuah gaya pornografi” mungkin akan mengarah pada pelacuran anak. Selain beberapa ketentuan khusus dalam mengatasi eksploitasi anak, Undang-undang Perlindungan Anak juga mencakup definisi “anak yang beresiko salah dalam pekerjaan”. Menurut ketentuan ini, “anak yang beresiko salah dalam pekerjaan” berarti anak yang terlibat dalam kegiatan kerja, atau dalam menemani orang, yang memunculkan kecenderungan anak tersebut ke dalam tindakan yang melanggar hukum atau tidak bermoral ; atau anak yang berada di lingkungan merugikan untuk anak”¹¹³ Meskipun definisi “tindakan tidak bermoral” masih belum jelas, fakta bahwa terdapat ketentuan yang mencakup gagasan anak-anak yang beresiko merupakan aspek yang luar biasa untuk pencegahan dan perlindungan dari eksploitasi anak.

2.3.2 *Anti-trafficking in Person Act 2008* (Undang-undang Anti Perdagangan Orang 2008)

Meskipun Undang-undang Perlindungan Anak yang bertujuan mempromosikan perlindungan anak, tapi hal tersebut tidak bisa menutupi semua isu yang menyangkut anak-anak di Thailand, termasuk dalam hal perdagangan. Seperti yang telah dijelaskan, Undang-undang perlindungan anak tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai praktik kriminalisasi perdagangan. Definisi yang paling dekat dengan itu adalah definisi penyiksaan dan masuknya eksploitasi ke dalam ketentuan yang ada pada teks undang-undang. Pasal 78 misalnya, juga mempertimbangkan hukuman untuk tindakan pelanggaran hak anak. Tetapi dalam pasal 26, hukuman sampai tiga bulan penjara tidak terdengar sebanding dengan

¹¹²*Ibid.* Artikel 26 (9)

¹¹³*Child Protection Act 2003.* Artikel 4

kerugian yang didapat oleh anak korban eksploitasi.¹¹⁴ Untuk alasan ini, Thailand kemudian membuat *Anti-trafficking in Person Act* tahun 2008 sebagai bentuk perlawanan terhadap isu perdagangan anak dimana dibutuhkan pendekatan holistik untuk korban.

Anti-trafficking in Person Act tidak secara eksklusif berlaku untuk anak-anak dan wanita. Tidak seperti langkah-langkah legislatif sebelumnya yang diambil untuk mencegah perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak, *Anti-trafficking in Person Act* berlaku juga untuk pria. Untuk tujuan penelitian ini, pendekatan terhadap *Anti-trafficking in Person Act* akan berfokus kepada perlindungan anak. Undang-undang ini dimulai dengan definisi eksploitasi yang berarti mencari keuntungan dari pelacuran, produksi, atau distribusi materi pornografi, bentuk-bentuk seksual eksplotasi, perbudakan, (...) tanpa persetujuan orang tersebut.¹¹⁵ Dalam ketentuan tersebut mendefinisikan seorang anak di bawah delapan belas tahun, yang disesuaikan dengan standar CRC. Ketentuan tersebut tersusun dalam enam bab yang dibagi sebagai berikut : isi umum dari ketentuan, Komite *Anti-trafficking in Person Act*, wewenang dan tugas dari pejabat yang berwenang, ketentuan bantuan dan perlindungan keselamatan terhadap orang-orang yang diperdagangkan, Dana *Anti-trafficking in Person Act*, dan hukuman bagi para pedagang. Tidak seperti Undang-undang lainnya untuk memerangi perdagangan manusia¹¹⁶, *Anti-trafficking in Person Act* menggabungkan beberapa tingkatan dari undang-undang, perlindungan, pencegahan, dan pengobatan.

Dalam hal eksploitasi, ruang lingkup dari ketentuan undang-undang ini menetapkan bahwa setiap individu yang melakukan pengadaan, pembelian, penjualan, penjual, membawa dari atau mengirim ke, menahan atau membatasi, menyembunyikan, atau menerima seorang anak ; bersalah menyangkut

¹¹⁴*Ibid.* Artikel 78

¹¹⁵*Anti-trafficking in Person Act* 2008. Bagian 4

¹¹⁶*Measures in Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act*, B.E 2540 (1997)

perdagangan orang.¹¹⁷ Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan setiap tindakan yang mendukung, berkontribusi properti, menerima properti, merangsang, menyarankan atau menghubungi seseorang untuk menjadi anggota dari kelompok kejahatan terorganisir akan dipidana sebagai pelaku dari tindak pidana perdagangan manusia.¹¹⁸ Ketentuan ini juga mempertimbangkan kewajiban dari pejabat pemerintah ketika bertindak melanggar hukum terhadap perlindungan korban. Agar pelaksanaan ketentuan menjadi layak, maka memerlukan pembentukan komite *Anti-trafficking in Person Act* (Komite ATP). Komite ini memiliki ketentuan untuk membuat rekomendasi, strategi pencegahan, pedoman, pemantauan, pengawasan penelitian, dan untuk mengeluarkan peraturan yang akan membantu kabinet untuk menjamin keefektifitasan dari penekanan perdagangan manusia.¹¹⁹

Komite ATP utamanya harus sesuai dengan para Menteri dan para ahli, selain itu ketentuan pelaksanaan terletak pada koordinasi dan pemantauan kinerja Komite ATP. Komisi tersebut terdiri dalam beberapa tingkatan yang mengumpulkan perwakilan kementerian utama, serta industri pariwisata, dan Royal Thai Police. Dengan tujuan yang lebih konkrit, Komite ATP diharapkan untuk melakukan proses monitoring, serta kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu perdagangan.¹²⁰ *Anti-trafficking in Person Act* juga mendedikasikan satu bab untuk kekuasaan komisi ATP dan tugas “petugas berkompeten” yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang menjadi korban perdagangan. Dalam hal ini “petugas berkompeten” berarti pejabat pemerintah yang unggul atau polisi termasuk pejabat pemerintah (...) yang ditunjuk oleh Menteri¹²¹ untuk melaksanakan tugas di bawah ketentuan. Secara

¹¹⁷*Anti-trafficking in Person Act* 2008. Bagian 6 (2)

¹¹⁸*Ibid.* Bagian 7

¹¹⁹*Ibid.* Bagian 16

¹²⁰*Ibid.* Bagian 23

¹²¹*Anti-trafficking in Person Act.* Bagian 4

tegas, ketentuan menjelaskan secara rinci peran pejabat yang berwenang, dan prosedur yang harus diambil ketika membantu korban perdagangan manusia.

Dalam hal perlindungan, *Anti-trafficking in Person Act* menekankan pada imigrasi sebagai aspek kontribusi dari perdagangan manusia. Untuk itu, bagian 37 dan 38 menunjuk kondisi dimana korban asing harus diperlakukan sesuai batasan-batasan Thailand. Bantuan harus disediakan, serta perawatan medis, rehabilitasi, dan lainnya.¹²² Demikian juga, menetapkan bahwa ketika korban datang untuk kembali ke negaranya, keamanan dan kesejahteraan orang tersebut harus dipertimbangkan. Terdapat ketentuan yang jelas dalam kebutuhan untuk membentuk sebuah “Dana *Anti-trafficking in Person Act*” yang akan digunakan sebagai modal untuk pencegahan dan penekanan perdagangan manusia.¹²³ Oleh karena itu, dana tersebut harus digunakan untuk tujuan bantuan kepada orang yang menjadi korban perdagangan, menyediakan perlindungan, mencegah dan menekan perdagangan manusia, dan lainnya.¹²⁴

Selain itu, *Anti-trafficking in Person Act* juga mencakup bab tentang hukuman, yang bertujuan untuk menerapkan hukuman yang lebih ketat untuk orang-orang yang terlibat dalam perdagangan manusia. Jika sebelumnya dalam *Child Protection Act* tahun 2003 digunakan hukuman hingga tiga bulan penjara untuk tuduhan pelecehan seksual, *Anti-trafficking in Person Act* 2008 memberikan kewajiban dari empat tahun hingga sepuluh tahun penjara dan denda dari delapan puluh ribu Baht untuk siapapun yang melakukan pelanggaran perdagangan manusia.¹²⁵

Selanjutnya, ketentuan ini juga menentukan hukuman sesuai dengan usia korban yang diperdagangkan. Dengan demikian, jika kejahatan dilakukan terhadap seorang anak yang usianya melebihi lima belas tahun tetapi belum mencapai delapan belas tahun, pelaku dikenakan hukuman pidana penjara dari

¹²²*Ibid.* Bagian 37, 38

¹²³*Ibid.* Bagian 42

¹²⁴*Ibid.* Bagian 44

¹²⁵*Ibid.* Bagian 52

enam sampai dua belas tahun penjara dan denda dari seratus dua puluh ribu Baht sampai dua ratus empat puluh ribu Baht.¹²⁶ Demikian pula, jika kejahatan dilakukan terhadap seorang anak tidak lebih dari lima belas tahun, pelaku dikenakan hukuman pidana penjara dari delapan tahun sampai lima belas tahun penjara, serta pelaku dikenakan denda dari seratus enam puluh ribu Baht sampai tiga ratus ribu Baht.¹²⁷ *Anti-trafficking in Person Act* menyediakan kejelasan peradilan untuk mengatasi masalah perdagangan dan pelacuran anak yang berguna untuk memahami perlindungan efektif untuk korban.

Selain itu, tidak hanya memberikan hukuman kepada individu yang terlibat langsung dalam bisnis perdagangan, tetapi juga memberikan hukuman untuk orang-orang yang menghalangi proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan atau proses pidana atas pelanggaran perdagangan manusia sehingga proses tidak dapat dilakukan secara baik¹²⁸ salah satu contohnya adalah yang menyangkut korupsi, isu kunci lainnya dalam menangani kasus prostitusi anak.

2.3.3 Perjanjian Bilateral dan Multilateral untuk menekan perdagangan manusia

Sejauh ini, telah diuraikan langkah-langkah dalam negeri yang telah diambil oleh pemerintah Thailand terhadap penindasan dan pencegahan prostitusi anak dalam kerangka perdagangan manusia. Sebagai bagian dari strategi, pemerintah juga telah bekerja melalui kerjasama internasional, seperti yang OPSC sarankan, agar dapat menangkal efek dari perdagangan anak. Mengetahui bahwa Thailand merupakan negara tempat keberangkatan, tujuan, dan negara transit bagi perdagangan manusia, maka penting untuk bergabung dengan negara-negara tetangga dalam upaya untuk mencegah dampak perdagangan manusia. Dalam kasus Thailand, pemerintah berhasil membangun perjanjian bilateral dengan pemerintah Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.¹²⁹ Pada tahun 2004, perjanjian

¹²⁶ *Anti-trafficking in Person Act*. Bagian 52

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ *Ibid*. Bagian 54

¹²⁹ UN-Act. UN-ACT : Law and Agreement. Diakses pada 29 September 2016, dari <http://un-act.org/background/laws-agreements/>

multilateral disepakati dengan pemerintah Kamboja, Myanmar, Laos, China, dan Vietnam menuju kerjasama regional untuk menekan perdagangan manusia.¹³⁰

Perjanjian Bilateral sebagian besar dalam hal pencegahan, perlindungan, dan reintegrasi korban. Namun, mereka juga mencakup tindakan kooperatif terhadap peran otoritas perbatasan dalam hal perdagangan manusia. Pada intinya, semua perjanjian bilateral mengenali penyebab struktural yang bermain sebagai kontribusi faktor dalam perdagangan manusia. Untuk alasan ini, langkah-langkah pencegahan menyepakati kerjasama bilateral yang fokus pada meminimalkan kerentanan dan mempromosikan proses migrasi yang aman.¹³¹ Meskipun migrasi merupakan elemen kunci dalam menganalisis perdagangan manusia, untuk soal perlindungan korban, perjanjian bilateral juga membuat penekanan pada kenyataan bahwa korban dari perdagangan seperti perempuan dan anak-anak harus dipertimbangkan, bukan pelanggar atau pelangar hukum migrasi.¹³² Masalah penderitaan korban adalah salah satu faktor yang berdampak pada penuntutan orang yang menjadi pedagang manusia, karena keadaan korban yang takut untuk menjadi saksi pada proses akhir. Perjanjian bilateral ini juga mencakup reintegrasi korban dalam arti kebebasan, harga diri, dan martabat.¹³³ Dengan demikian, korban tidak hanya dijamin hak mereka untuk mendapatkan perbaikan hidup, tetapi mereka juga harus diberikan bantuan dalam rangka kembali ke masyarakat dan keluarga mereka tanpa takut pada apapun dari stigma dan/atau diskriminasi.

Dalam wilayah regional, perjanjian multilateral yang bergabung dengan pemerintah Kamboja, Myanmar, Laos, China, dan Vietnam merupakan komitmen lintas batas terhadap tindakan legislatif, preventif, dan perlindungan yang

¹³⁰*Ibid*

¹³¹*Memorandum of Understanding between the government of Thailand and the government of Myanmar on cooperation to combat trafficking in person, especially woman and children.* Artikel 4

¹³²*Memorandum of Understanding between the government of Thailand and the government of Vietnam on cooperation to combat trafficking in person, especially woman and children.* Artikel 6

¹³³*Memorandum of Understanding between the government of Thailand and the government of Cambodia on cooperation to combat trafficking in person, especially woman and children.* Artikel 18

diperlukan untuk menekan perdagangan manusia. Isi dari perjanjian multilateral sangat mirip dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian bilateral. Namun, salah satu hal utama adalah bekerja bersama dari rezim politik yang beragam terhadap perlindungan martabat manusia. Aspek tertentu ini merupakan langkah luar biasa bagi pemerintah yang tidak memprioritaskan hak asasi manusia di agenda politik mereka. Adanya konvensi-konvensi internasional dan regional mengenai hak-hak anak merupakan langkah yang sangat baik demi melindungi anak dari berbagai macam bentuk eksploitasi. Wanita dan anak-anak khususnya, merupakan korban yang sangat rentan sehingga adanya aturan hukum internasional ini menjadi patokan hukum yang jelas terhadap bagaimana memandang eksploitasi sebagai suatu bentuk pelanggaran.

Adanya konvensi-konvensi ini juga menegaskan hak-hak anak bagi pihak negara sebagai pelindung masyarakatnya dan menuntut anak-anak diperlakukan secara baik sebagai bagian dari elemen yang penting dalam masyarakat. Keputusan Thailand untuk mengadopsi konvensi-konvensi internasional maupun regional dirasa sangat tepat, mengingat begitu banyak terjadi pelanggaran hak-hak anak di negara tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi di Thailand adalah berkembangnya eksploitasi anak. Setelah meratifikasi setiap konvensi internasional maupun regional seperti Konvensi Hak Anak, dan Konvensi ILO no. 182 dan 138, Thailand juga merumuskan peraturan undang-undang di negaranya dengan mengadopsi ketiga konvensi tersebut. Undang-undang yang ada di Thailand itu diantaranya adalah *Child Protection Act*, dan *The Anti-trafficking in Person Act*. Aktifnya Thailand dalam forum internasional maupun regional, merupakan salah satu bentuk cara Pemerintah Thailand dalam berkomitmen mencegah Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang ada di negaranya

BAB 3. Faktor Penyebab ESKA di Thailand

Dalam Pada bab 2 telah dijelaskan mengenai seperangkat hukum baik dalam level internasional, regional dan domestik Thailand yang mengatur tentang perlindungan anak dan menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi hak-hak anak. Seperangkat hukum yang dijelaskan sebelumnya berfokus kepada masalah perlindungan anak dari isu eksploitasi. Selanjutnya pada bab 3 ini akan didiskusikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya ESKA di Thailand. Skripsi ini berargumen ada empat faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi korban ESKA, yaitu : Kemiskinan, Pengaruh budaya, Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan Adanya permintaan dari wisatawan asing terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seksual. Keempat faktor ini sedikit banyak akan membantu menjelaskan mengapa penanganan ESKA di Thailand masih belum optimal. Selanjutnya akan dibahas di bawah ini mengenai keempat faktor tersebut dalam keterkaitannya dengan penyebab terjadinya ESKA di thailand.

3.1 Kemiskinan

Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa persoalan sosial banyak muncul karena didorong oleh persoalan kemiskinan. Begitu pula kemunculan ESKA, menurut Patricia Green (seorang pendiri rahab internasional) ESKA di Thailand salah satunya didorong oleh kemiskinan. kemiskinan seringkali menjadi alasan dibalik seseorang terlibat dalam pekerjaan yang buruk tanpa memperhatikan resiko dari pekerjaan tersebut, salah satu contohnya adalah prostitusi. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dalam mencari pekerjaan dan tidak mengetahui bahaya dari bisnis prostitusi dan cara-cara yang dipakai dalam merekrut korbannya membuat seseorang lebih mudah tergiur ke dalam bisnis prostitusi.

Beberapa ahli juga mengemukakan pemikiran yang sama bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menunjang berkembangnya bisnis prostitusi. Erika Wright mengatakan dalam tulisannya di *Borgen Magazine*¹³⁴ bahwa kemiskinan adalah kekuatan pendorong utama di belakang wanita untuk menjadi PSK. Prostitusi merupakan sebuah bentuk eksploitasi perempuan dan anak-anak, dan mereka memanfaatkan kerentanan dari kemiskinan untuk lebih mengeksploitasi perempuan dan anak-anak ini.¹³⁵ Selain itu, menurut Jens Kofod seorang peneliti di SFI (*Science Foundation Ireland*) yang dikutip oleh Rasmus Kavkof dalam artikelnya yang berjudul “*What drives a prostitute*” mengatakan hasil dari penelitian Jens Kofod bahwa kebutuhan akan uang menjadi alasan utama bagi seseorang terlibat prostitusi.¹³⁶ Sekitar 85% PSK mengatakan mereka hidup dalam kemiskinan dan sangat membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah, makanan, perawatan untuk anak mereka, dan kebutuhan lainnya. Hal inilah yang pada akhirnya membuat mereka terpaksa melihat prostitusi menjadi jalan keluar satu-satunya sebagai pekerjaan. Kedua pendapat ahli ini sangat menegaskan bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan berkembangnya bisnis prostitusi. Prostitusi dan ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Thailand juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan, pada tahun 2014 ada sekitar 7.3 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan atau sekitar 10.9 %¹³⁷ dari 67.588.701 penduduk di Thailand.¹³⁸ Kebanyakan penduduk miskin di Thailand berada di daerah pedesaan, sehingga membuat penduduk disana sangat

¹³⁴Wright, E. 2015, Agustus 4. The Link Between Poverty and Prostitution. Diakses pada 23 September 2016, dari <http://www.borgenmagazine.com/prostitution-poverty/>.

¹³⁵*Ibid*

¹³⁶Rasmus K. 2012, Maret 7 . What drives a prostitute. Diakses pada 25 Oktober 2016, dari <http://sciencenordic.com/what-drives-prostitute>.

¹³⁷Asian Development Bank. Poverty in Thailand. Diakses pada 03 Desember 2016, dari <https://www.adb.org/countries/thailand/poverty>.

¹³⁸UNDP in Thailand. Thailand Population. Diakses pada 03 Desember 2016, dari <http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/countryinfo.html>.

rentan menjadi korban eksploitasi. Masyarakat di pedesaan ini biasanya bekerja dibidang pertanian, dan biasanya hasil dari pertanian ini kurang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dalam artikel yang berjudul “*why some Thai sex workers say their happy in their jobs*”,¹³⁹ Murray Hunter melakukan wawancara ke beberapa PSK di Thailand mengenai alasan dibalik mereka memilih pekerjaan tersebut. Pada artikel ini, beberapa PSK di Thailand mengatakan bahwa mereka memilih pekerjaan ini agar dapat menghasilkan uang yang lebih banyak demi menghidupi kebutuhan mereka. Menurut ‘Dow’ salah seorang PSK dia rela memilih jalan sebagai PSK karena dengan menjadi PSK dia dapat membiayai hidup anak-anak dan keluarganya, meskipun tentu saja pekerjaan ini bukan sesuatu yang dia harapkan dalam hidupnya tetapi dia tetap bangga dengan pekerjaannya ini:

“None of us dreamed of becoming a sex worker. To know someone for two minuted and then have to off with them. For me it’s not easy.. But i’m proud to be a sex worker because i can feed my two sons and look after my family.”

Sedangkan yang lainnya, ‘Lily’ mengatakan bahwa tidak ada satu pun diantara mereka yang benar-benar ingin menjadi PSK. Pekerjaan ini mereka lakukan karena mereka tidak memiliki banyak pilihan. Sehingga agar dapat menghasilkan uang, demi membiayai keluarganya mereka terpaksa menjadi PSK. Lily juga mengatakan bahwa suatu saat nanti dia berharap dapat memiliki kesempatan untuk berhenti menjadi PSK: *“I wish I had never become a sex worker... most of us have no choice. We’re just trying to earn money for our families, and waiting for a chance to leave.”*¹⁴⁰

Sebagai tambahan, seorang PSK bernama “Som”, mengatakan bahwa menjadi PSK adalah salah satu jalan baginya untuk dapat pulang ke kampung

¹³⁹Hunter, M. 2015, 3 November. Why some Thai Sex Workers say They are happy in their jobs. Diakses pada 08 Desember 2016, dari <https://asiancorrespondent.com/2015/11/many-thai-sex-workers-say-they-are-happy-in-their-jobs/>

¹⁴⁰Fact and details. Prostitutes in Thailand : Their Lives, motivations, scams and costumers. Diakses pada 08 Desember 2016, dari http://factsanddetails.com/southeast-asia/Thailand/sub5_8d/entry-3246.html.

halamannya, karena dengan menjadi PSK dan menghasilkan uang yang cukup banyak dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Dengan cara seperti itulah mereka dapat kembali pulang ke kampung halamannya, dan menjadi kebanggaan keluarga. *“This is our chance to work for our future back in our village one day.”* Jadi bekerja sebagai PSK sendiri menurut mereka merupakan suatu jalan untuk dapat keluar dari masalah perekonomian yang buruk. Penghasilan yang didapatkan oleh mereka ini selain untuk menghidupi diri sendiri juga untuk membiayai keluarga mereka, tetapi mereka juga tidak berharap untuk selamanya bekerja menjadi PSK.

Thailand sendiri sebenarnya telah menduduki peringkat ke 33 ekonomi terbesar dunia (berdasarkan GDP negara), tetapi hal ini tidak dapat memungkiri fakta bahwa masih banyak masyarakat Thailand yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun sebenarnya dari tahun ke tahun dengan meningkatnya GDP negara Thailand telah berhasil mereduksi angka kemiskinan, Tetapi, berdasarkan data tahun 2013 indeks Gini negara Thailand mencapai angka 39,4.¹⁴¹ Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini membantu menentukan kesenjangan antara kaya dan miskin. Angka 0 dalam indeks gini menunjukkan kesetaraan yang sempurna, sedangkan angka 1 dalam indeks gini menunjukkan ketimpangan sempurna.¹⁴² Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Thailand yaitu 39,4 termasuk angka yang cukup besar. Hal ini merupakan bukti bahwa meningkatnya GDP negara tidak dibarengi dengan adanya pemerataan ekonomi di Thailand, sehingga menyebabkan kemiskinan masih belum bisa sepenuhnya dihilangkan di negara ini. Beberapa kelompok yang tidak mendapatkan manfaat dari keberhasilan ekonomi Thailand ini seperti kelompok etnis minoritas (suku perbukitan) migran, pekerja informal, dan pengungsi. Hal

¹⁴¹UNDP. 2013. Human Development Report : Income Gini coefficient. Diakses pada 02 Desember 2016, dari <http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient>.

¹⁴²Investopedia. Gini Index. Diakses pada 08 Desember 2016, dari <http://www.investopedia.com/terms/g/gini-index.asp>.

iniilah yang menyebabkan anak-anak dan wanita masih beresiko mengalami eksploitasi seksual.

Tabel 3.1 : Perbandingan tingkat indeks Gini Thailand dengan negara-negara tetangga

No	Nama	2013
1.	Thailand	39,4
2.	Indonesia	38,1
3.	Vietnam	35,6
4.	Cambodia	36,6
5.	Lao PDR	36,7

Sumber : Human Development Report : Income Gini Coefficient.

<http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Thailand memiliki angka indeks Gini yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Meskipun perbandingan jumlah indeks Gini diantara negara-negara tersebut tidak terlalu jauh, tetapi dari data tersebut sedikit banyak dapat memberikan gambaran mengenai adanya ketimpangan yang cukup besar di Thailand antara penduduk kaya dan miskin. Sehingga dari adanya ketimpangan pendapatan yang cukup besar inilah kemudian membuat banyak masyarakat Thailand terlibat ke dalam ESKA. Ada dua kawasan di Thailand yang merupakan daerah yang paling banyak penduduk miskinnya, yaitu dibagian Utara dan Timur Laut. Kedua kawasan ini penduduk miskinnya tersebar baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.¹⁴³

¹⁴³Rural-Urban Poverty and Inequality in Thailand. Diakses pada 07 September 2016, dari <http://rksi.org/sites/default/files/document/351/6-country-note-tha.pdf>.

Tabel 3.2 Urban Poverty Rate (%)

Region	2012	2013
Bangkok	1.91	1.06
Central	4.74	3.95
North	15.71	15.21
Northeast	19.13	16.39
South	9.02	7.98
Total	8.80	7.70

Sumber : Artikel *Rural-Urban Poverty and Inequality in Thailand*.
<http://rksi.org/sites/default/files/document/351/6-country-note-tha.pdf>

Dari tabel diatas, kita dapat melihat bahwa kawasan *Northeast* (Timur laut) merupakan daerah yang menyumbang kantong kemiskinan terbesar di daerah perkotaan. Kemudian bagian *North* (Utara) menjadi penyumbang kedua kantong kemiskinan di Thailand. Sedangkan yang paling rendah penduduk miskinnya adalah Bangkok, yang merupakan ibukota negara Thailand. Hal ini disebabkan karena Bangkok selaku ibukota negara menjadi pusat perkembangan bisnis di Thailand, sehingga menyebabkan lapangan pekerjaan disana lebih banyak dan membuat penduduk di Bangkok jauh lebih makmur dibanding di daerah perkotaan lainnya. Sementara itu kawasan pedesaan yang menyumbangkan kemiskinan di Thailand bisa dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 3.3 Rural Poverty Rate (%)

Region	2012	2013
Bangkok	-	-
Central	8.92	6.72
North	18.43	17.77
Northeast	20.10	17.88
South	15.70	12.67
Total	15.96	13.89

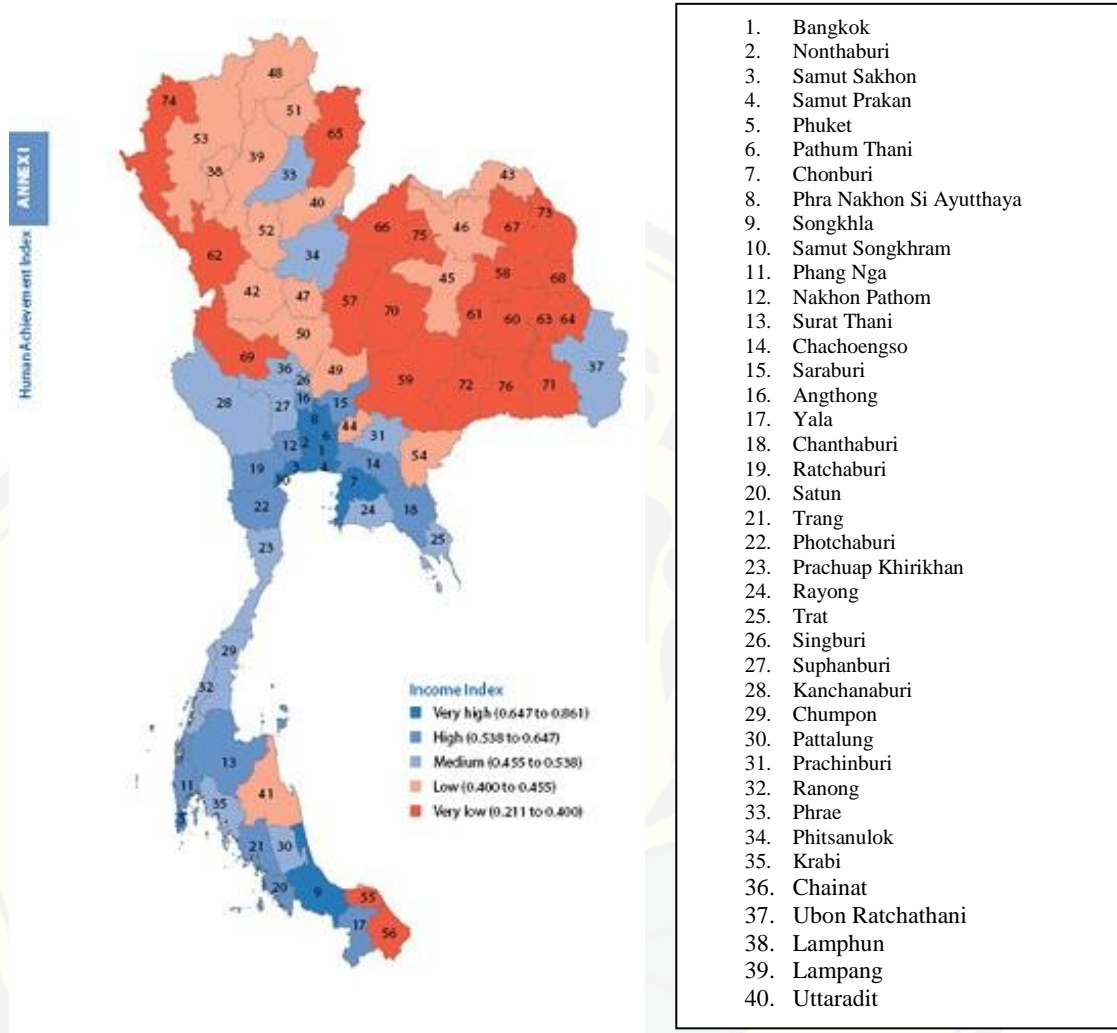
Sumber: Artikel *Rural-Urban Poverty and Inequality in Thailand*.
<http://rksi.org/sites/default/files/document/351/6-country-note-tha.pdf>.

Di daerah pedesaan yang memiliki sedikit angka penduduk miskin adalah di wilayah *Central* atau Tengah Thailand. Bangkok tidak memiliki daerah pedesaan, sehingga tidak menyumbang jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan. Daerah *Northeast* tetap menjadi penyumbang paling besar kantong kemiskinan di Thailand, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan daerah ini memang merupakan daerah yang paling buruk keadaan wilayahnya di Thailand. Selain itu daerah *Northeast* juga kurang memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan oleh Pemerintah Thailand. Meskipun wilayah *Northeast* telah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun 2012 ke 2013, tetapi tetap saja *Northeast* merupakan wilayah yang memiliki paling banyak jumlah penduduk miskinnya.

Provinsi dengan jumlah kemiskinan yang tinggi juga cenderung memiliki jumlah populasi yang besar, karenanya membuat sejumlah besar penduduk berada pada kemiskinan. Hal ini pun terjadi di kawasan *Northeast*. *Northeast* memiliki wilayah-wilayah yang menyumbang banyak penduduk miskin, maupun wilayah dengan jumlah kemiskinan yang rendah. Wilayah dengan jumlah kemiskinan rendah berada di Khon Kaen, Udonthani, Nong Khai, dan Ubon Ratchathani. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di provinsi *Northeast* adalah di wilayah Mae Hong Son, Nong Bua Lamphu, dan Surin.¹⁴⁴

¹⁴⁴Jitsuchon, S. dan Ritcher, K. 2007. Thailand Poverty Maps : From Construction to Application. Diakses pada 20 Desember 2016, dari http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/342674-1092157888460/493860-1192739384563/10412-13_p241-260.pdf.

Gambar 3.1 Peta Kemiskinan berdasarkan dari pendapatan daerah di Thailand



41. Nakhon Thammarat	Sri	51. Phayao	61. Maha Sarakham	70. Chaiyaphum
42. Kamphaeng Phet		52. Sukhotai	62. Tak	71. Sisaket
43. Nong Kai		53. Chiang Mai	63. Yashoton	72. Buriram
44. Nakhon Nayok		54. Sa Kaeo	64. Amnat Charoen	73. Nakhon Phanom
45. Khon Kaen		55. Pattani	65. Nan	74. Mae Hong Son
46. Udonthani		56. Narathiwat	66. Loei	75. Nong Bua Lamphu
47. Phichit		57. Phetchabun	67. Sakon Nakhom	76. Surin
48. Chiang Rai		58. Kalasin	68. Mukdahan	
49. Lopburi		59. Nakhon Ratchasima	69. Uthai Thani	
50. Nakhon Sawan		60. Roi Et	70. Chaiyaphum	

Sumber : Economic Situation in Southern Thailand.
<https://asiancorrespondent.com/2007/04/economic-situation-in-southern-thailand/>.

Lebih lanjut hal ini akan dijelaskan dalam sub bab 3.1.1. Kemudian mengapa di daerah Bangkok yang paling sedikit angka kemiskinannya dikarenakan Bangkok merupakan ibukota sekaligus merupakan pusat bisnis di Thailand, sehingga wilayah ini mengalami perkembangan yang lebih pesat daripada wilayah-wilayah lain di Thailand. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa dua daerah yang menyumbang kemiskinan terbesar di Thailand adalah Timur Laut (*Northeast*) dan Utara (*North*). Kemiskinan yang terjadi di dua daerah tersebut disebabkan karena beberapa faktor, beberapa diantaranya yakni karena keadaan topografi wilayah.

Kemiskinan yang terjadi di daerah utara Thailand disebabkan karena keadaan topografi daerahnya yang didominasi oleh dataran tinggi yaitu pegunungan, bukit dan hutan. Hal ini lah yang menjadi tantangan bagi pemerataan ekonomi maupun pembangunan di wilayah tersebut. Selain karena topografi wilayah, adanya diskriminasi kepada etnis minoritas yang tinggal di daerah pegunungan seringkali membuat mereka tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah. Etnis minoritas ini tidak diakui kewarganegaraannya oleh Pemerintah Thailand, dikarenakan Kementerian Dalam Negeri Thailand sangat berhati-hati memberikan identitas warga negara Thailand untuk suku perbukitan yang baru berimigrasi. Hal tersebut disebabkan, karena adanya perbedaan latar belakang budaya maupun bahasa. Selain itu, Pemerintah Thailand juga menduga penduduk etnis perbukitan terlibat ke dalam perdagangan ilegal. Oleh karena alasan inilah, sehingga etnis minoritas suku perbukitan sangat sulit mendapatkan kewarganegaraan Thailand. Dari faktor inilah yang membuat Pemerintah Thailand beranggapan, banyak dari suku perbukitan yang semakin kesulitan untuk mendapatkan akses ke pekerjaan yang lebih baik, dan juga membuat anak-anak di wilayah ini seringkali hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dan rentan terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).¹⁴⁵ Mata pencaharian penduduk di daerah utara ini adalah di bidang agrikultur.

¹⁴⁵Compassion in Jesus name. Thailand Northern Religion. Diakses pada 10 Oktober 2016, dari <http://www.compassion.com/thailand/hmong.htm>.

Sedangkan di wilayah timur laut, keadaan topografinya berbeda dengan yang ada disebelah utara. Daerah di timur laut ini seringkali dikenal dengan nama lain yaitu Isan. Cuaca di wilayah ini sangat panas dan kering, dan jarang terjadi hujan. Kadang tanah di wilayah ini bisa sangat kering sehingga tidak ada yang bisa tumbuh, tetapi kadang bisa terjadi banjir karena curah hujan yang tinggi. Sayangnya para penduduk di wilayah ini bergantung pada mata pencaharian yang sama seperti penduduk daerah utara yaitu dalam bidang agrikultur. Dengan keadaan alam yang seperti itu, membuat daerah ini menjadi daerah termiskin di wilayah Thailand.¹⁴⁶

Banyak petani yang kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga akhirnya mereka harus berhutang ke Bank Pertanian atau Koperasi Pertanian Thailand dan ketika akhir tahun tiba, mereka harus berhutang kembali pada rentenir untuk melunasi bunga dari dana pemerintah dan Bank. Para petani di daerah ini sangat terkenal dengan masalah hutang yang sangat berat, sehingga mereka terpaksa melakukan apapun untuk dapat membayar hutang-hutang mereka. Mereka terpaksa menjual tanah, rumah, ternak bahkan anak-anak mereka sendiri sebagai pekerja seks.¹⁴⁷

Untuk mengatasi masalah pemerataan ekonomi di setiap wilayah Thailand, Pemerintah Thailand kini menyebar promosi destinasi wisata di setiap wilayahnya. Terutama pada wilayah-wilayah yang masih menyumbang kantong kemiskinan. Hal ini terjadi pada wilayah Utara dan Timur laut Thailand. Kedua wilayah ini mulai diperhatikan Pemerintah Thailand untuk dibangun daerah potensi wisatanya agar dapat menarik jumlah kunjungan wisatawan. Seperti di daerah Timur laut, Pemerintah Thailand meluncurkan kampanye “*Amazing Isan*” untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah ini dengan promosi

¹⁴⁶Thaiworld. Poor ISAN. Diakses pada 10 Oktober 2016, dari <http://www.thaiworldview.com/lao/isan6.htm>.

¹⁴⁷*Ibid*

destinasi wisata murah.¹⁴⁸ Sedangkan wilayah utara, Pemerintah Thailand mempromosikan wisata kuliner dengan jargon “*Thai Food to the World*”.¹⁴⁹

Dengan adanya promosi wisata di kedua daerah ini tentu saja membawa dampak positif dan negatif. Salah satu yang menjadi dampak negatif dari adanya pariwisata adalah maraknya bisnis prostitusi. Meskipun tujuan pemerintah Thailand adalah untuk pemerataan ekonomi, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kebijakan pemerintah ini membawa masalah baru bagi daerah. Seperti yang di jelaskan diawal bab satu bahwa Thailand sangat terkenal dengan pariwisata seksnya. Pelaku dari bisnis ini juga bermacam-macam, diantaranya yang paling rentan adalah anak-anak. Anak-anak di daerah pariwisata sangat rentan untuk terjerumus ESKA. Di daerah Utara, Chiang Mai yang merupakan ibukota provinsi sangat terkenal dengan hiburan malam.

Chiang Mai yang terkenal dengan keindahan alam dan suku-sukunya menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan dunia. Hal inilah yang menjadi salah satu gerbang bagi kaum pedofil, karena sangat mudah mendapatkan akses ke anak-anak yang miskin. Lembaga kesejahteraan sosial, polisi, dan NGO memperkirakan sekitar 20 kaum pedofil yang berasal dari barat, sepertiganya diantaranya berasal dari Australia dan lainnya banyak berasal dari Jepang, China dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.¹⁵⁰ Ada beberapa diantara para wisatawan ini membangun rumah di dekat perbatasan Myanmar dan seringkali membawa para anak-anak ini untuk pesta seks. Dan yang lainnya lebih memilih mendatangi klub-klub malam di Chiang Mai dimana anak-anak disediakan secara bebas.¹⁵¹

¹⁴⁸Huttasin, N., Mommaas, H., dan Knippenberg, L. 2015. Towards Tourism Development of the Isan Region, Northeastern Thailand. *Journal of Tourism*. Vol.11, (No.1): 104

¹⁴⁹Jewcharoensakul, S. Tourist Industry Promotion : Aim to Introduce Thai Foods Matching with Northern Program’s Tour to Serve Sustainable Tourism. Diakses pada 11 Oktober 2016, dari http://www.ijbts-journal.com/images/main_1366796758/0071-Surachai.pdf

¹⁵⁰Barker, M. 2004. Child-Sex Stalker Find an Indulgent New Frontier. Diakses pada 11 Oktober 2016, dari <http://www.smh.com.au/articles/2004/06/11/1086749894537.html>

¹⁵¹*Ibid*

Para wisatawan ini bebas melakukan ESKA tanpa perlu merasa takut terhadap hukum yang berlaku di Thailand. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sompob Jantraka (Direktur dari Komunitas pengembangan pusat pendidikan untuk anak-anak)¹⁵², beliau mengatakan para wisatawan ini atau lebih tepatnya para kaum paedofil ini tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai hukum yang ada di Thailand. Hukum di Thailand, masih termasuk lemah. Hal ini disebabkan karena jika mereka tertangkap, mereka tinggal memberikan sejumlah uang kepada aparat kepolisian agar dapat bebas kembali. *“It’s very easy for foreign pedophiles to operate here. If they get into trouble it is also very easy for them to buy their way out.”*¹⁵³

Hal inilah mengapa ESKA di daerah ini juga sangat sulit untuk diberantas. ESKA secara tidak langsung telah menjadi bagian dari pariwisata daerah itu sendiri. Chiang Mai menjadi salah satu destinasi wisata seks di Thailand karena dibandingkan dengan prostitusi yang ada di Bangkok, Pattaya atau pun Patong, prostitusi di Chiang Mai jauh lebih murah dan memiliki suasana kota yang lebih tenang tidak seperti di wilayah Thailand lainnya. ESKA banyak sekali dan mudah ditemukan di bar-bar yang ada di pusat kota maupun pinggiran kota Chiang Mai. Tidak hanya di bar-bar saja, tempat-tempat prostitusi yang ada di Chang Mai juga banyak berkedok tempat-tempat hiburan lainnya seperti di tempat pijat dan tempat karaoke. Yang berbeda dari prostitusi di Chiang Mai adalah kebanyakan para pekerja seks disana tidak seramah yang ada di Bangkok, Pattaya maupun Patong. Kebanyakan dari mereka masih mementingkan uang, sehingga jarang sekali wisatawan yang terlibat “perasaan” dengan gadis-gadis di Chiang Mai.

Anak-anak di daerah Utara dapat terjerumus pada ESKA salah satu faktor penyebabnya adalah karena dijual oleh orang tua mereka sendiri. Mereka biasanya dijual kepada agen-agen yang datang langsung ke desa mereka. Orangtua mereka biasanya mendapatkan sekitar 7000 Baht hingga 30.000 Baht atau sekitar Rp

¹⁵²Merupakan tempat rehabilitas untuk anak-anak yang telah mengalami siksaan dan terlibat dalam ESKA)

¹⁵³Barker, M. 2004. Child-Sex Stalker Find an Indulgent New Frontier. Diakses pada 11 Oktober 2016, dari <http://www.smh.com.au/articles/2004/06/11/1086749894537.html>

2.600.000 – Rp 11.000.000.¹⁵⁴ Tetapi ada pula orangtua yang tidak mengetahui telah mengizinkan anaknya bekerja sebagai apa, para agen yang datang ke desa mereka biasanya hanya membujuk para orang tua dari anak-anak calon korban untuk mengizinkan anaknya bekerja di perkotaan tanpa menyebutkan pekerjaan apa yang dilakukan. Para agen tersebut membujuk para orangtua tersebut dengan mengatakan mereka akan mendapatkan banyak uang dengan membiarkan anak mereka bekerja pada agen tersebut.¹⁵⁵ Bahkan di beberapa komunitas di daerah Utara, anak-anak yang terlibat ke dalam ESKA ini mendapatkan izin serta dukungan penuh dari orangtuanya. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari anak-anak ini akan pulang kembali kerumahnya dengan kehormatan dan sudah menikah, kemudian siklus ini kembali lagi dan terus berlangsung. Mereka akan mengirimkan anak perempuannya ke dalam bisnis seks karena menurut pengalaman mereka bisnis ini memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi anak-anaknya. Fenomena ini juga berlangsung di beberapa desa suku perbukitan.¹⁵⁶

Sedangkan di bagian Timur Laut atau lebih dikenal dengan sebutan Isan, merupakan daerah yang menyumbang paling banyak kantong kemiskinan di Thailand yang tentu saja juga menyumbang jumlah anak-anak yang besar untuk terlibat dalam ESKA.¹⁵⁷ Menurut penelitian yang dilakukan oleh *NightlightInternasional*, sebuah NGO yang bergerak untuk mencegah anak-anak terlibat ke dalam ESKA, diperkirakan pekerja di bar-bar dan jalanan di Thailand 90% nya adalah wanita dari daerah Isan¹⁵⁸. Meskipun di daerah Timur Laut ini

¹⁵⁴Grosfeld, S. Children For Sale. Diakses pada 12 Oktober 2016, dari http://www.vachss.com/help_text/reports/futures_1.html.

¹⁵⁵Fact and Details. Child Prostitution in Thailand. Diakses pada 13 Oktober 2016, dari http://factsanddetails.com/southeast-asia/Thailand/sub5_8d/entry-3247.html.

¹⁵⁶*Ibid*

¹⁵⁷Dictionnaire. Child Prostitution in Thailand. Diakses pada 13 Oktober 2016, dari <http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Child%20Prostitution%20in%20Thailand/en-en/>.

¹⁵⁸Dieselberg, A. 2010, Oktober 12. ISSAN : Birthplace of Daughters Supplier For Prostitution. Diakses pada 13 Oktober 2010, dari <http://www.nightlightinternational.com/uncategorized/issan-birthplace-of-daughters-supplier-for-prostitution/>

tidak memiliki banyak tempat hiburan malam seperti di daerah Utara, anak-anak dari Isan ini terlibat ke dalam ESKA di daerah lainnya seperti di Bangkok, Pattaya, Patong bahkan di Chiang Mai. Daerah Isan bahkan terkenal merupakan penyuplai anak-anak yang bekerja di industri seks di Thailand.¹⁵⁹ Menurut *Children Foundation Thailand* anak-anak semester akhir di sekolah dasar dan awal tahun di sekolah menengah di Isan banyak yang terlibat ke dalam ESKA. Tidak tidak semua anak-anak yang terlibat ESKA ini melakukan secara sukarela.¹⁶⁰ Jumlah tersebut mengalami peningkatan terutama di provinsi Maha Sarakham, Udon Thani, dan Khon Kaen.¹⁶¹

Anak-anak yang terlibat ke dalam bisnis ini biasanya dikarenakan faktor lingkungan pertemanan mereka. Mereka tergiur dengan hasil yang mereka dapatkan, kemudian hasil tersebut akan mereka belanjakan untuk membeli baju, make up dan kebutuhan mereka lainnya. Respon dari orangtua mereka pun juga membuat anak-anak ini tidak jera karena telah terlibat ESKA. Menurut Montri Sinthawichai (Sekertaris jendral yayasan perlindungan anak Thailand) pada saat mewawancarai orangtua dari anak-anak yang terlibat ke dalam prostitusi adalah bahwa orangtua mereka tidak peduli ketika mengetahui anak-anak mereka terlibat ke dalam ESKA. Mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk membuat anak-anak mereka tidak terjerumus kembali ke dalam eksploitasi seksual sehingga mereka tidak melakukan apa-apa dan membiarkan anak-anaknya. Tentu saja sikap seperti ini sangat berbahaya, karena orangtua seharusnya melindungi anak-anaknya bukan membiarkannya ketika menempuh jalan yang salah. *“they thought their child had gone down the wrong path and they could not do anything about it. So they just let it be. This attitude is dangerous.”*¹⁶².

¹⁵⁹ *Ibid*

¹⁶⁰ Jingjai. 2011, Desember 12. Underage Prostitution On Rise in Isan. Udonmap. Diakses pada 13 oktober 2016, dari <http://www.udonmap.com/udonthaniforum/underage-prostitution-on-rise-in-isan-t23590.html#p282249>.

¹⁶¹ *Ibid*

¹⁶² *Ibid*

Kemiskinan yang terjadi di daerah Isan ini, memang sangat memprihatinkan, membuat mereka tidak terlalu mempedulikan anak-anak mereka. Selain karena faktor lingkungan, faktor lainnya seperti keluarga juga mempengaruhi anak-anak di Isan terlibat ke dalam ESKA. Anak-anak perempuan yang terlibat ke dalam ESKA dikarenakan kewajiban mereka kepada keluarga untuk merawat orangtuanya. Dengan kewajiban ini, anak-anak cenderung mencari pekerjaan yang mudah seperti prostitusi sebagai jalan terbaik dan tercepat untuk mendapatkan uang demi membantu orangtua mereka. Hidup dalam kemiskinan dan rendahnya pendidikan membuat mereka rela menjual diri mereka sendiri tanpa mengetahui resiko apa yang bisa mereka dapatkan, apalagi masyarakat di daerah Isan terkenal memiliki tanggungan hutang yang berat. Anak-anak di daerah Isan kemudian pergi bekerja ke daerah perkotaan di bar-bar. Sudah menjadi hal yang lumrah ketika mereka lebih memilih bekerja di bar-bar daripada terus meneruskan sekolahnya dan mendapatkan pekerjaan biasa dengan gaji yang rendah, akan lebih baik bagi masyarakat disana jika mereka pergi bekerja di bar daripada harus meneruskan sekolah mereka.¹⁶³

Dari tulisan diatas kita dapat melihat bahwa kemiskinan tetap menjadi faktor yang sangat kuat dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk terlibat ke dalam bisnis prostitusi, terutama anak-anak sangat rentan menjadi korban ESKA. Dengan adanya kemiskinan ditambah dengan kurangnya pemerataan kesejahteraan oleh pemerintah di setiap provinsi di Thailand menyebabkan adanya celah untuk adanya eksploitasi seksual komersial anak ini tetap ada. Anak-anak masih dijadikan objek untuk mendapatkan uang demi menutupi kemiskinan yang dialami oleh orangtua mereka.

¹⁶³Dieselberg, A. 2010, Oktober 12. ISSN : Birthplace of Daughters Supplier For Prostitution. Diakses pada 13 Oktober 2010, dari <http://www.nightlightinternational.com/uncategorized/issan-birthplace-of-daughters-supplier-for-prostitution/>

3.2 Pengaruh Budaya Masyarakat

Selain kemiskinan, faktor lain yang menyebabkan anak menjadi korban ESKA adalah faktor budaya masyarakat. Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa budaya mempengaruhi perilaku masyarakat. Budaya patriarki yang mengakar di dalam kehidupan masyarakat Thailand menempatkan posisi perempuan dalam posisi yang lemah dan juga anak-anak ke dalam posisi dimana mereka harus membantu orangtuanya untuk mencari nafkah. Skripsi ini berargumen bahwa faktor budaya ini menjadi salah satu penyebab anak-anak terjerumus ke dalam ESKA.

Pierre Bourdieu mengemukakan sebuah teori Habitus. Habitus adalah kebiasaan masyarakat yang melekat pada diri seseorang dalam bentuk disposisi abadi, atau kapasitas terlatih dan kecenderungan terstruktur untuk berpikir, merasa dan bertindak dengan cara determinan, yang kemudian membimbing mereka.¹⁶⁴ Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh dunia sosial sehingga kemudian akan menjadi sebuah kesadaran dan sikap yang “tertanam” ke dalam diri seseorang tersebut. Di dalam buku John Lechte, habitus merupakan sejenis ungkapan penanaman tak sadar dari orang-orang yang berkepentingan dari ruang-ruang sosial tertentu. Sejenis tatanan tingkah laku yang dipakai untuk membedakan satu kelas yang mendominasi kepada kelas yang didominasi dalam arena sosial tertentu.¹⁶⁵ Suatu habitus tertentu tampak saat beberapa variabel seperti pekerjaan, pendidikan, minat, artistik, selera dan sebagainya, terkait satu sama lain secara statistik. Korelasi tersebut, terkait dengan yang disebut Bourdieu sebagai suatu perkumpulan perwatakan khusus. Adapun rumus dari teori habitus sendiri yaitu : $(\text{Habitus} \times \text{Modal}) + \text{Ranah} = \text{Praktik}$. Pada penelitian ini, yang lebih difokuskan adalah habitus itu sendiri dibandingkan indikator yang lain dalam teori ini. Sebagai tambahan, Dr. Mohini Giri seorang aktifis sosial dari India berpendapat bahwa prostitusi telah berakar jauh di dalam struktur masyarakat karena

¹⁶⁴Navarro, 2006. Bourdieu and Habitus. <http://www.powercube.net/other-forms-of-power/bourdieu-and-habitus/>. Diakses pada 24 April 2016

¹⁶⁵John L, 2004. *50 Filsuf Kontemporer dari Strukturalisme sampai Postmodernitas*. Cetakan ke 3, diterjemahkan oleh A. Gunawan Admiranto. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 82

perkembangan prostitusi sendiri sudah selama peradaban manusia. Selain itu keyakinan agama dan adat-istiadat juga memberikan alasan bagaimana asal mula prostitusi ini berawal.¹⁶⁶

Dalam latar belakang masalah pada Bab 1 telah disebutkan bahwa adanya ESKA di Thailand juga disebabkan oleh pengaruh budaya masyarakat Thailand sendiri. Pengaruh budaya masyarakat yang telah ada secara turun temurun inilah yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan atau Habitus. Dalam kasus ini, kebiasaan masyarakat yang dimaksud adalah kebiasaan yang berasal dari pengaruh budaya yang secara tidak langsung menciptakan “permintaan” terhadap ESKA.

Dalam perkembangan budaya masyarakat tentu saja tidak dapat terlepas dari sejarah yang menyebabkan terjadinya kebiasaan tersebut. Terjadinya eksploitasi perempuan dan anak-anak tidak dapat terlepas dengan adanya praktik prostitusi yang berkembang di Thailand. Prostitusi yang terjadi di Thailand juga memiliki sejarah asal usulnya. Jika melihat ke dalam sejarah prostitusi di Thailand, industri prostitusi ini pernah dilegalkan pada abad ke 14, yaitu pada tahun 1.350 hingga pertengahan tahun 1.767. Tidak hanya dilegalkan secara hukum, prostitusi juga dikenakan pajak oleh pemerintah Thailand. Selama beberapa abad di Thailand, tempat prostitusi bukan hanya di bar-bar melainkan juga terjadi di rumah-rumah penduduk. Hal ini terutama terjadi di komunitas China yang terletak di ibukota Ayuddhya.¹⁶⁷ Dimulai pada akhir abad kedelapan belas, migrasi China ke Thailand meningkat, terutama dikalangan laki-laki China. Prostitusi berkembang di Thailand sebagai akibat dari migrasi laki-laki ini ke Thailand, letaknya di sekitar Sampeng, sebuah distrik China di kawasan Bangkok.¹⁶⁸ Kemudian setelahnya berbagai orang asing mulai bermigrasi ke Thailand, dan mulai mengembangkan komunitas mereka sendiri setahun

¹⁶⁶Giri, V. M. 1999. *Kanya : eksploitaxion of little angles*. New Delhi: Gyan. Hal : 56

¹⁶⁷Proskow, A. 2002. *Trading Sex for Karma in Thailand : An analysis of the Reciprocal Relationship Between Buddhist Monastics and Thai Prostitute*. *Thesis of Comparative Religion*. Michigan: Western Michigan University Hlm 5

¹⁶⁸*Ibid*

kemudian. Prostitusi kemudian berkembang lebih luas lagi, menyesuaikan diri dengan budaya di masing-masing daerah di Thailand.¹⁶⁹

Kemudian pada abad ke 21, prostitusi menjadi penghubung antara tentara Amerika Serikat (AS) dan Thailand. Industri jasa prostitusi ini muncul pada tahun 1960an, dengan beberapa variasi jasa seperti bar, panti pijat, rumah bordil, klub malam dan hotel-hotel yang dibuat khusus untuk memenuhi kepuasan dari para prajurit tentara AS yang biasa disebut dengan *Rest and Recreation* (RR).¹⁷⁰ Tantiwiramanond mengatakan dalam artikelnya yang berjudul *Changing Gender Relations in Thailand : A Historical and Cultural Analysis* menjelaskan mengenai gambaran prostitusi yang ada di Thailand pada saat munculnya bisnis *Rest and Recreation* bagi para prajurit militer Amerika.

*“This new industry absorbed a large number of semi-literate and illiterate women to fulfil the massive demand of US servicemen. This demand matched the needs of poverty stricken villages of the north and norhteast. The “wages of sin” earned by rural poor women were enough to make ‘selling the body’ an acceptable means of income generation.”*¹⁷¹

Industri prostitusi pada masa itu banyak melibatkan sejumlah besar wanita yang memiliki pendidikan yang rendah hingga buta aksara, karena tidak memiliki kualitas diri yang baik para wanita-wanita miskin pedesaan terutama dari wilayah Timur Laut dan Utara memilih untuk menjadi PSK di tempat RR pada masa itu. Dalam budaya masyarakat di Thailand, berkembang pemikiran yang kemudian tumbuh menjadi suatu kebiasaan masyarakat bahwa perempuan bertanggung jawab untuk mendukung secara finansial rumah tangga. Perempuan-perempuan ini juga diharapkan untuk mendapatkan uang sebagai ganti biaya perawatan dan perlindungan yang telah diberikan orangtua mereka selama membesarkan si

¹⁶⁹*Ibid*

¹⁷⁰The Bangkok Sex Industry and World Tourism. Sex Industry in Bangkok. Diakses pada 13 Oktober 2016, dari <http://www.unc.edu/~pcvelich/bangkok/net1024.htm>.

¹⁷¹Tantiwiramanond, D. 1997. Changing Gender Relations in Thailand : A Historical and Cultural Analysis. *Indian Journal of Gender Studies* Vol.4, (No. 2):187

anak.¹⁷² Arti dan pentingnya budaya ini telah berakar ke dalam pemikiran masyarakat Thailand, sehingga menyebabkan perempuan untuk melihat ke arah bentuk pekerjaan yang mudah dan menguntungkan, contohnya adalah prostitusi. Sehingga mereka pada akhirnya bisa segera memenuhi tanggung jawab moral ini.

Prostitusi sendiri sudah merupakan bagian yang penting dari budaya masyarakat Thailand. Lebih dari 70 % pria di Thailand memiliki pengalaman seksual pertama mereka dengan PSK Thailand dan membeli untuk melakukan seks merupakan bentuk umum dari rekreasi dikalangan pria Thailand.¹⁷³ Selain itu, tidak selalu perempuan di Thailand dipaksa untuk menjadi PSK dengan paksaan fisik maupun karena masalah perekonomian keluarga.¹⁷⁴ Sebaliknya, menjadi PSK memenuhi harapan perempuan terhadap diri mereka sendiri sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Karir sebagai PSK juga memenuhi harapan orangtua mereka sebagai sebuah bentuk dukungan dari anak perempuannya agar mereka mendapatkan kehormatan dalam masyarakat pedesaan. Alasan dibalik adanya pemikiran ini dikarenakan, penghasilan sebagai PSK sekitar 8000 Baht (sekitar Rp 3 juta) per bulan dalam industri perdagangan seks sedangkan penghasilan 200 Baht (sekitar Rp 750.000) perbulan sebagai pekerja rumah tangga. Karena hal ini, perempuan di Thailand cenderung memilih menjadi PSK. PSK dapat menghidupi keluarga mereka¹⁷⁵, dengan demikian PSK tidak hanya “memenuhi” konsumen pria tetapi juga membantu keluarga mereka dengan membayar tanggungan keluarga.

Selain dikarenakan oleh lingkungan keluarga, pengaruh budaya lainnya adalah berasal dari ajaran agama Budha yang dianut oleh mayoritas penduduk di

¹⁷² Polak, H. 2008, November 11. Sex Tourism and Prostitution in Thailand. Diakses pada 13 Oktober 2016, dari <http://serendip.brynmawr.edu/exchange/hpolak/sex-tourism-and-prostitution-thailand>.

¹⁷³ Simpkins, D. 1998. Rethinking the Sex Industry : Thailand’s Sex Workers, the State, and Changing Cultures of Consumption. Diakses pada 13 Oktober 2016, dari <http://quod.lib.umich.edu/m/mfsfront/ark5583.0012.005/--rethinking-the-sex-industry-thailands-sex-workers-the-state?c=mfs;c=mfsfront;g=mfsg;rgn=main;view=fulltext;xc=1#N8>.

¹⁷⁴ *Ibid*

¹⁷⁵ *Ibid*

Thailand. Ajaran agama tanpa disadari menjadi sebuah bentuk kontrol sosial masyarakat, hal ini dikarenakan suatu masyarakat biasanya menjadikan agama sebagai dasar pegangan hidup dan mempercayainya sebagai suatu keyakinan. Pandangan Budha terhadap prostitusi sendiri, berubah-ubah dari waktu ke waktu. Pada beberapa abad yang lalu, ajaran Budha menggambarkan perempuan yang terlibat ke dalam prostitusi sebagai wanita yang kuat dan berani. Selama masa pramodern, pelacur dilihat lebih positif daripada di zaman sekarang. Beberapa bahkan sangat dihormati.¹⁷⁶ Hal ini berbeda jauh di zaman sekarang dimana seorang PSK memiliki strata yang paling rendah dalam lingkungan sosial.

Selain itu muncul penafsiran dalam ajaran Agama Budha mengenai status perempuan yang berada dibawah laki-laki. Perempuan dipandang rendah terutama oleh para biarawan yang melihat perempuan sebagai sebuah objek berbahaya yang dapat memancing hasrat seksual pria.¹⁷⁷ Para pemeluk Agama Budha ini sangat percaya kepada karma, kelahiran kembali, dan nirwana. Hirarki adalah hasil dari keyakinan bahwa karma baik (perbuatan baik) mengarah ke posisi yang lebih tinggi ketika seseorang terlahir kembali. Dengan demikian, akan terlahirlah orang kaya dan berkuasa. Hal inilah yang menunjukkan bahwa di masa lalu dia telah melakukan hal yang baik. Sedangkan mereka yang lahir dalam kemiskinan, mereka yang memiliki penyakit dan orang-orang yang dilahirkan sebagai perempuan diasumsikan telah melakukan kesalahan dimasa lalu, dan karena itu layak memiliki status yang rendah.¹⁷⁸

Adanya penafsiran terhadap ajaran Budha yang seperti ini membuat posisi perempuan semakin tersudutkan. Meskipun sebenarnya, pada ajaran Agama Budha sendiri tidak pernah membedakan mengenai status atau strata sosial seseorang, tetapi dengan munculnya penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai ajaran Agama Budha membuat pola pemikiran seperti ini masih terus

¹⁷⁶*Ibid*

¹⁷⁷Reyes, C. 2015, Oktober 8. History of Prostitution and Sex Trafficking in Thailand. Diakses pada 16 Oktober 2016, dari <http://www.endslaverynow.org/blog/articles/history-of-prostitution-and-sex-trafficking-in-thailand>.

¹⁷⁸*Ibid*

dipegang oleh beberapa penganut ajaran agama Budha, terutama penganut agama Budha aliran Theravada.

Aliran Theravada saat ini sudah tidak mengakui adanya Bhikkhuni, yaitu seorang biksu yang berjenis kelamin perempuan. Aliran Theravada ini merupakan aliran Budha yang bersifat ortodoks dan sangat kaku. Agama Budha aliran Theravada ini, merupakan aliran agama Budha yang berasal dari India. Munculnya penafsiran bahwa status perempuan berada dibawah laki-laki terjadi karena beberapa sebab, salah satunya adalah karena dalam kitab Jataka Pali (kitab yang bercerita mengenai kehidupan Budha Gotama di masa lalu sebagai Bodhisatta). Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Bodhisatta tidak pernah terlahir kembali (*reinkarnasi*) sebagai seorang perempuan. Padahal menurut kitab tersebut, beliau bahkan pernah dilahirkan kembali sebagai seorang hewan. Kitab Jataka Pali sebenarnya bukan merupakan cerita yang berasal dari Budha secara langsung, atau dengan kata lain kitab ini merupakan teks tambahan yang disusun ketika penyusunan kitab Tripitaka (Kitab utama umat Budha).¹⁷⁹

Selain itu, ada cerita mengenai penolakan Budha Gotama sebanyak 3 kali terhadap ibu tirinya yang ingin ditasbihkan menjadi Bhikkhuni. Bhikkhuni merupakan sebutan seorang biksu berjenis kelamin perempuan. Tetapi kemudian akhirnya Budha menerima permintaan ibu tirinya untuk ditasbihkan menjadi seorang Bhikkhuni. Penerimaan ini dilakukan dengan 8 syarat dhamma. Delapan syarat dhamma itu merupakan delapan aturan yang sangat keras bagi para Bhikkhuni, dan secara sekilas menggambarkan bahwa kedudukan seorang Bhikkhuni berada di bawah laki-laki. Dua diantara delapan dhamma tersebut adalah

¹⁷⁹ Wijaya, W. D. Diskriminasi Perempuan Buddhis. Dhammacitta.org. Diakses pada 25 Januari 2017, dari <https://dhammacitta.org/artikel/diskriminasi-perempuan-buddhis/>.

“seorang Bhikkhuni walaupun sudah menjalankan sampai 100 tahun kebiksuannya harus menyapa dengan hormat kepada seorang Bhikkhu (Bhiksu laki-laki) walaupun Bhikkhu tersebut baru sehari menjadi Bhikkhu. Kemudian seorang Bhikkhuni tidak boleh menasehati seorang Bhikku, namun seorang Bhikku boleh menasehati seorang Bhikkhuni.”¹⁸⁰

Dua gambaran cerita diatas banyak digunakan sebagai dasar bagi sejumlah penganut ajaran Budha khususnya aliran Theravada, bahwa strata perempuan itu berada dibawah laki-laki. Apalagi beberapa kepercayaan dalam ajaran Budha juga menganggap bahwa seorang Budha (dalam artian Budha tertinggi seperti Budha Gotama) tidak ada yang berjenis kelamin perempuan. Terjadinya perbedaan penafsiran mengenai ajaran agama Budha ini juga disebabkan karena ucapan-ucapan Budha Gotama belum dituliskan kembali setelah beliau meninggal. Hanya diturunkan melalui ucapan-ucapan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga memungkinkan terjadinya penafsiran-penafsiran yang berbeda dan adanya penambahan-penambahan di dalam kitab suci Tripitaka. Tripitaka Pali (kitab suci aliran Theravada) ditulis 4 abad setelah kematian Budha Gotama, sehingga ada kemungkinan kitab ini tidak sama persis seperti yang dikatakan oleh Budha. Demikian pula Tripitaka Cina (kitab suci aliran Mahayana) dan sutra-sutra tambahan dibuat beberapa abad setelah kematian Budha.¹⁸¹

Mayoritas masyarakat Thailand, menganut ajaran agama Budha aliran Theravada begitu juga dengan negara-negara tetangganya yaitu Srilanka, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sayangnya negara-negara ini sudah tidak memiliki Bhikkhuni seperti pada kebanyakan negara yang masyarakatnya menganut ajaran agama Budha aliran Theravada. Dengan tidak adanya Bhikkhuni di negara-negara tersebut membuat aliran Theravada di negara ini dianggap beraliran sempit, tidak berkembang dan dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Budha.

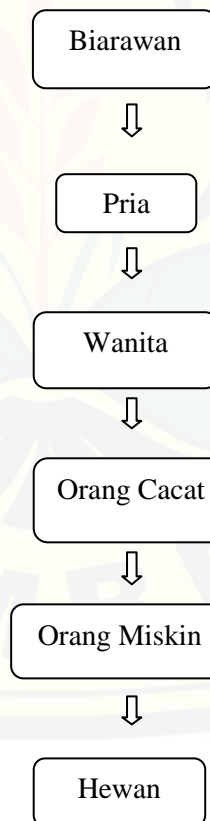
Selain karena beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang membuat perbedaan persepsi diantara aliran Budha, faktor yang juga turut menjadi dasar

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ *Ibid*

masyarakat Budha menafsirkan status perempuan lebih rendah daripada laki-laki adalah faktor kebudayaan. Adanya pengaruh kebudayaan atau kultur dari suatu masyarakat, membuat seseorang juga mengintrepetasikan suatu ajaran agama sesuai dengan kultur yang mereka miliki di lingkungannya, sehingga ajaran tersebut akan lebih mudah diterima dan dipahami ke dalam kehidupan mereka. Begitulah yang terjadi dengan aliran Theravada di Thailand yang menganggap bahwa dilahirkan menjadi perempuan adalah suatu bentuk karma buruk seseorang yang dilakukan di masa lalu. Dari ajaran inilah, yang kemudian memunculkan budaya patriarki dalam masyarakat Thailand. Secara hirarki, strata dari tinggi ke rendah dalam agama Budha di Thailand adalah sebagai berikut.

Gambar 4.2 : Strata Sosial Menurut Ajaran Budha Theravada di Thailand



Sumber : <http://www.endslaverynow.org/blog/articles/history-of-prostitution-and-sex-trafficking-in-thailand>

Ada istilah yang terkenal di Thailand dan Kamboja yaitu “*broh jee-a daw dail meas, srei jee-a daw dail kotong saw*”¹⁸² atau “*Men are Gold and Women are White Cloth*”. Maksud dari istilah ini adalah bahwa menjadi laki-laki adalah suatu anugerah. Seorang laki-laki bebas merumuskan aturan sendiri dalam hal seksualitas. Hal ini memungkinkan seorang laki-laki mendapatkan kepuasan seksual dalam bentuk bervariasi dan dengan beberapa wanita. Selain itu hanya laki-laki saja yang dapat menjadi seorang biarawan, bahkan jika mereka tidak bekerja dan hanya menjadi biarawan sehari saja, hal ini sudah sangat membanggakan keluarga mereka.¹⁸³ Sedangkan untuk para wanita cara terbaik yang dapat dilakukan adalah membawa kehormatan dan membantu keuangan keluarganya untuk mendapatkan pahala. Menjadi seorang wanita dianggap sebagai hukuman atas kumpulan perbuatan buruknya di masa lampau. Dalam konteks ini, prostitusi dapat dirasionalisasikan sebagai norma yang diterima sebagai suatu bentuk cara untuk memenuhi kewajibannya sebagai anak.

Status yang rendah untuk perempuan ini membuat perempuan-perempuan di Thailand pada abad ke 15, dijadikan sebagai sebuah “properti” untuk pria dan dalam Undang-undang pada masa itu, suami dapat memukul atau menjual istrinya tanpa seorang saksi. Selain itu memiliki beberapa istri dipandang sebagai indikasi status yang lebih tinggi, dan status istri dikategorikan sebagai berikut : istri utama, istri minor, dan istri budak. Orang tua pria memilih istri utama, istri minor digunakan untuk memberikan keturunan dan istri budak sebagai pemberi kepuasan seksual. Ketika poligami menjadi ilegal pada tahun 1930an, industri prostitusi disediakan bagi mereka yang tidak bisa lagi memiliki istri budak.¹⁸⁴

¹⁸² Jacobsen, T. 2008. *Lost Goddesses : The Denial of Female Power in Cambodian History*. Malaysia: Nias Press. Hlm 1

¹⁸³ Baker, K. 2013. Buddhism and the Sex Industry in Thailand. Diakses pada 16 September 2016, dari <https://prezi.com/au60gwbwhe7z/buddhism-and-the-sex-industry-in-thailand/>

¹⁸⁴ Reyes, C. 2015, Oktober 8. History of Prostitution and Sex Trafficking in Thailand. Diakses pada 16 Oktober 2016, dari <http://www.endslaverynow.org/blog/articles/history-of-prostitution-and-sex-trafficking-in-thailand>.

Prostitusi telah menjadi bagian yang normal dalam masyarakat Thailand, dan orang-orang yang terlibat dalam prostitusi di negara ini tidak menghadapi stigmatisasi pada tingkat yang sama seperti di negara lain. Toleransi ini terjadi sebagian karena uang yang dihasilkan dari bisnis ini. Anak perempuan di Thailand secara tradisional memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan status kepada keluarga mereka. Jika prostitusi adalah suatu cara untuk mendapatkan hal tersebut, maka prostitusi akan dilihat sebagai pekerjaan. Menurut ILO, gaji bulanan di Thailand rata-rata hanya di bawah \$500 (sekitar Rp 7.000.000) dan seorang PSK dewasa dapat melewati jumlah tersebut sehingga hal ini menjadi penting karena mereka menjadi pencari nafkah utama bagi keluarganya.

Adanya suatu kebiasaan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial dan agama dalam masyarakat Thailand secara tidak langsung membentuk masyarakat Thailand menjadikan prostitusi sebagai suatu pilihan pekerjaan. Kebiasaan ini memang tidak langsung terbentuk secara instan. Seperti dalam teori habitus, habitus atau kebiasaan suatu individu terbentuk membutuhkan waktu yang sangat lama. Habitus ini pun juga terbentuk melalui proses yang lama dalam masyarakat Thailand. Ajaran agama Budha di Thailand dari waktu ke waktu memiliki cara pandang yang berbeda-beda mengenai kasus prostitusi. Meskipun sebenarnya, tidak ada ajaran Budha yang secara tertulis memperbolehkan adanya praktek prostitusi, tetapi adanya perbedaan pengertian dan kesalahpahaman persepsi mengenai kisah-kisah yang tertulis di dalam kitab Jataka Pali (kitab pendamping Tripitaka) secara tidak langsung membuat masyarakat Thailand mengkonstruksi sendiri bahwa agama Budha seakan-akan memperbolehkan terjadinya praktek prostitusi tersebut. Anggapan mengenai status perempuan yang berada dibawah laki-laki dalam ajaran agama Budha, membuat masyarakat Thailand secara tidak langsung mengkonstruksi adanya budaya patriarki. Budaya patriarki inilah yang kemudian menjadi sebuah habitus dan secara turun temurun ditanamkan dalam masyarakat Thailand, bahwa perempuan memiliki peran sebagai pemberi kehormatan dan membantu keuangan keluarganya. Sehingga kemudian membuat prostitusi dipandang sebagai suatu cara untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dengan langgengnya budaya patriarki inilah yang sebenarnya

secara tidak langsung membuat anak-anak perempuan di Thailand terus mengalami eksploitasi.

3.3 Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perkembangan ESKA di Thailand adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Faktor ini seringkali yang menjadi dasar seorang anak-anak terjerumus ke dalam ESKA. Pendidikan merupakan faktor yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam suatu masyarakat. Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang terjadi di Thailand juga salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena jika seorang anak yang berasal dari desa, tidak memiliki pendidikan yang cukup dan ditambah dengan tidak memiliki keterampilan, pada akhirnya mereka akan memiliki sedikit kesempatan dalam mencari pekerjaan. Siddharth Kara menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Sex trafficking : Inside the Business of Modern Slavery*, bahwa rendahnya pendidikan merupakan faktor kunci dari perkembangan kemiskinan, tingginya angka infeksi virus HIV/AIDS, dan kerentanan terhadap bahaya eksploitasi dan perdagangan.¹⁸⁵

Selain itu menurut seorang peneliti sekaligus aktivis di bidang anti prostitusi dan pornografi, Melissa Farley, awal mula terjadinya ESKA tidak dapat terlepas dari bisnis prostitusi. Prostitusi bukanlah sebuah pilihan, selama ini prostitusi selalu digambarkan sebagai “pilihan yang dibuat oleh mereka yang tidak memiliki pilihan. Dalam bisnis ini mereka akan dipaksa oleh diskriminasi gender, diskriminasi ras, kurangnya pendidikan formal atau bahkan tidak memiliki pendidikan dan kemiskinan.¹⁸⁶ Selain itu Melissa juga mengatakan, rendahnya pengetahuan terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS) membuat mereka semakin tidak memahami resiko dari pekerjaan ini.

¹⁸⁵Kara, S. 2009. *Sex trafficking : Inside the Business of Modern Slavery*. New York: Columbia University Press. Hlm 31

¹⁸⁶ Farley, M. 2006. Prostitution, trafficking and cultur amnesia : What we must known in order to keep the business of sexual exploitation running smoothly. *Yale journal of Law and Feminism*. Vol.18, (No.109): 110

Thailand menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang bermasalah dalam hal pendidikan. Banyak anak-anak di Thailand yang tidak mendapatkan pendidikan formal atau bahkan terpaksa keluar dari sekolah. Menurut peringkat PISA (*Programme for International Student Assessment*) pada tahun 2012, pendidikan Thailand berada di bawah standar internasional dan mendapat peringkat ke-50 dari 65 negara. Sedangkan pada *Time Higher Education University Rankings* 2014, Thailand hanya memiliki dua universitas yang masuk dalam top 100 Universitas se-Asia, tetapi tidak mencapai peringkat ke-50 hanya masuk sampai ke peringkat 400 saja.¹⁸⁷ Thailand juga merupakan salah satu dari 15 negara di dunia yang menyumbang lebih dari setengah anak-anak yang keluar dari sekolah dimasa usia sekolah dasar. Ada sekitar 10.44 % atau 611.222 anak-anak di Thailand keluar dari sekolah dasar¹⁸⁸. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan dan yang tinggal di daerah pedesaan, sekitar 81,6% anak-anak usia sekolah¹⁸⁹ di daerah Bangkok duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar sedangkan anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan Timur Laut Thailand hanya sekitar 69,5 %.¹⁹⁰

Meskipun pemerintah Thailand telah membuat program pendidikan dasar gratis di sekolah-sekolah negeri, tetapi banyak orangtua yang masih kesulitan untuk menjaga anak-anaknya tetap bersekolah. Menurut studi yang dilakukan oleh UNESCO, menunjukkan bahwa 94,4 persen keluarga di Thailand meraih pendapatan tahunan rata-rata di bawah 5.000 baht (sekitar Rp 1.870.000) hanya sekitar 2,6 persen dari mereka yang mendapatkan lebih dari 10.000 Baht (sekitar

¹⁸⁷Daniel, M. 2014, Oktober 17. Education in Thailand : Changing Time ?. Diakses pada 11 November 2016, dari <https://asiancorrespondent.com/2014/10/education-in-thailand-changing-times/>

¹⁸⁸Educate child.org. Thailand. Diakses pada 04 November 2016, dari <http://educatechild.org/our-partners-projects/country/thailand>.

¹⁸⁹Usia 6 tahun untuk masuk kelas 1 sekolah dasar di Thailand

¹⁹⁰UNICEF. Thailand: Children Not in School. Diakses pada 4 November 2016, dari http://www.unicef.org/thailand/education_14936.html.

3.747.000).¹⁹¹ Akibat dari alasan ini sekitar 43,1 % orangtua tidak mengirim anak-anak mereka ke sekolah, mereka ingin anak-anaknya untuk menghasilkan pendapatan lebih bagi keluarganya, 39,03 % orangtua tidak mampu untuk membayar uang sekolah, dan 42,7 % ingin anak-anaknya tinggal dirumah untuk membantu mengurus pekerjaan rumah.¹⁹²

Selain itu, dari studi ini menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan orangtua berhubungan dengan bagaimana mereka memandang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Orangtua yang memiliki pendidikan yang baik akan lebih dapat mengarahkan anaknya ke masa depan yang lebih baik dan bagi diri mereka sendiri akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak untuk penghidupan keluarganya sehingga anak-anaknya juga mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik. Menurut penelitian UNICEF, orangtua yang dapat membaca dan menulis di Thailand hanya dibawah 60 %, dan persentase yang sama berlaku bagi orangtua yang memiliki pendidikan formal.¹⁹³

Dari data-data tersebut, dapat dilihat bagaimana pendidikan seseorang sangat berpengaruh bagi masa depannya. Dengan jumlah cukup besar anak-anak yang keluar dari sekolah dasar di Thailand, akan sangat mempengaruhi kualitas diri dan pola pikir seorang anak. Minimnya pengetahuan yang didapat dan kurangnya keahlian diri akan membuat seseorang lebih mudah memilih pekerjaan yang instan, seperti terlibat dalam kejahatan atau bahkan menjadi korban eksploitasi. Selain karena rendahnya pendidikan seseorang, rendahnya pendidikan keluarga atau orangtua juga sangat berdampak kepada perkembangan anak. Seperti yang sudah dijelaskan dalam sub bab-sub bab sebelumnya, bahwa seringkali orangtua di daerah pedesaan terpencil Thailand yang hidup dalam kemiskinan menjual anak-anaknya sendiri untuk menjadi PSK agar dapat

¹⁹¹Daorueng, P. 2016, November 3. Education-Thailand : Good Marks on Literacy, But Drop-out Rates Worrisome. Diakses pada 4 November 2016, dari <http://www.ipsnews.net/1999/12/education-thailand-good-marks-on-literacy-but-drop-out-rates-worrisome/>.

¹⁹²*Ibid*

¹⁹³*Ibid*

memperoleh uang. Hal ini dapat terjadi karena, orangtua tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bahaya dari pekerjaan tersebut. Sehingga beberapa diantara mereka dengan rela membiarkan anak-anaknya terjerumus ke dalam prostitusi karena hanya tergiur dengan sejumlah uang yang bisa dihasilkan dari bisnis tersebut.

Anak-anak di daerah pedesaan Thailand seperti di daerah Utara dan Timur Laut merupakan anak-anak yang memiliki kualitas pendidikan terendah di Thailand. Hal ini dikarenakan keadaan alam di daerah tersebut sehingga membuat infrastruktur yang memadai untuk menjamin berlangsungnya pendidikan di daerah tersebut menjadi lebih sulit dilakukan. Karena tidak mendapatkan pendidikan yang baik, anak-anak dari kedua daerah ini seringkali dijadikan korban eksploitasi seksual baik di tempat prostitusi di daerahnya maupun di daerah perkotaan lain seperti Bangkok.

Provinsi dengan daerah yang memiliki kualitas akademik yang baik adalah daerah perkotaan, dimana daerah ini telah memiliki semua sumber daya yang memadai untuk menunjang berlangsungnya pendidikan yang baik. Adanya ketidaksetaraan di daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal pendidikan ini sangat mengkhawatirkan. Rendahnya kualitas pendidikan di Thailand selain disebabkan karena faktor finansial keluarga, kurangnya fasilitas infrastruktur dan kurangnya tenaga pengajar di daerah pedesaan, juga disebabkan karena sistem edukasi yang buruk di Thailand.

Lemahnya pendidikan di daerah pedesaan menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang kurang memiliki pendidikan yang baik, tetapi kemiskinan bukanlah menjadi satu-satunya faktor penyebab seseorang tidak berpendidikan. Seperti yang terjadi di daerah Utara Thailand, Chiang Mai, yang banyak berisi suku-suku perbukitan yaitu ada sekitar 1.072 desa dengan 33.573

rumah tangga dan 190.795 orang.¹⁹⁴ Selain karena kemiskinan, suku perbukitan ini juga terkendala infrastruktur untuk mendapatkan pendidikan.

Kebanyakan dari mereka tinggal di daerah terpencil dataran tinggi. Suku perbukitan ini merupakan suku yang paling banyak mendapatkan kerugian terutama dalam soal pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya infrastruktur di daerah tersebut, akses terbatas untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan Thailand dan terdapat perbedaan latar belakang budaya maupun bahasa. Banyak dari masyarakat suku perbukitan yang tidak memiliki kewarganegaraan Thailand, hal ini disebabkan karena Kementerian Dalam Negeri Thailand sangat berhati-hati dalam memberikan identitas warga negara Thailand untuk suku perbukitan yang baru bermigrasi. Alasan dari pemerintah Thailand adalah karena dugaan keterlibatan mereka dalam perdagangan ilegal. Dengan berbagai undang-undang yang berlaku, status hukum suku perbukitan menjadi berstatus “ilegal”. Selain itu diperburuk dengan adanya kesalahpahaman budaya, mereka sering dikaitkan dengan pemberontakan dan infiltrasi politik.¹⁹⁵ Status ilegal suku perbukitan ini membuat pemerintah Thailand kurang memperhatikan kehidupan mereka.

Penduduk suku perbukitan sebagian besar menggantungkan hidupnya pada pertanian, pembuatan kerajinan tangan rumah tangga, dan upah sebagai pekerja merupakan sumber pendapatan kedua mereka. Pertumbuhan tahunan populasi suku perbukitan adalah sekitar 2,9% lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan nasional rata-rata 1,2 %. Oleh sebab itu, tidak heran jika suku perbukitan ini menyumbang kantong kemiskinan terbesar dan rendahnya pendidikan di Thailand.

Untuk anak-anak di daerah utara Thailand, mendapatkan pendidikan sekolah bahkan yang paling dasar merupakan hal yang sulit dikarenakan

¹⁹⁴Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2002. *Case Study on Education Opportunities for Hill Tribes in Northern Thailand*. Bangkok : Thailand. Hlm 2

¹⁹⁵Baba, S. 2010. The Impact of NGO's Movement in the Educational Support for Minority in Northern Thailand. Hlm : 2. Diakses pada 04 November 2016, dari <http://203.131.210.100/conference/wp-content/uploads/2011/06/Movement-in-the-Educational-Support.pdf>.

tantangan wilayah, topografi pegunungan di kawasan itu, pengajar yang langka dan seringkali pengajar hanya ada sekitar dua minggu dalam sebulan di sekolah-sekolah terpencil, serta pendidikan yang tidak konsisten membuat anak-anak kehilangan momentum dan ketertarikan dalam belajar yang akhirnya membuat mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Sebagai contoh anak-anak Mae Hong Son yang terletak sekitar 250 km Barat Laut dari Chiang Mai Thailand dan juga berbatasan langsung dengan Burma. Mae Hong Son merupakan daerah termiskin yang ada di Thailand, keadaan alam disana berupa pegunungan dimana daerahnya memiliki banyak bukit-bukit curam dan lembah. Letak sekolah yang terlalu jauh bagi anak-anak ini membuat mereka tidak hadir ke sekolah, selain itu dikarenakan kurangnya tenaga pengajar membuat anak-anak semakin tidak bergairah ke sekolah.¹⁹⁶ Selain itu diskriminasi terhadap etnis minoritas khususnya suku perbukitan oleh pemerintah Thailand menyebabkan anak-anak dari kelompok ini tidak menerima kesempatan pendidikan yang sama dan tidak dapat melakukan perjalanan secara bebas di seluruh negeri. Anak-anak tanpa kewarganegaraan ini memiliki kesulitan besar mencari pekerjaan secara hukum hingga mereka sangat rentan menjadi korban perdagangan seks.

Menurut beberapa pengajar yang ada di Mae Hong Son, ada beberapa tantangan utama dalam hal pendidikan di daerahnya. Tantangan tersebut seperti jumlah murid yang terlampaui banyak dibandingkan dengan jumlah pengajar, kesulitan sumberdaya listrik juga menyulitkan mereka dalam menyampaikan pelajaran, ditambah lagi keterbatasan bahasa yang membuat mereka sulit untuk menyampaikan materi yang ingin diajarkan. Tantangan ini seringkali ditemui oleh para pengajar yang mengajar di daerah terpencil Thailand, terutama di daerah perbatasan. Samnien Attapaibon merupakan pengajar di taman kanak-kanak di daerah Mae La Noi, mengatakan.

¹⁹⁶Net4kids.org. Thailand : Improving the quality of education in mountain schools. Diakses pada 5 November 2016, dari <http://www.net4kids.org/en/project/thailand-improving-the-quality-of-education-in-mountain-schools>.

“We have problem in terms of human resources, technology, and communication (language). Today we have two teachers, including me,, teaching 45 students in six educational stages of primary schools and we don’t have electricity, except a solar cell, to support our teaching methods. But the biggest problem is communication. Most students are the Red Mu-Ser tribe and do not speak the Thai official Language.”¹⁹⁷

Kemudian menurut Khallaya Jirapong pengajar di sekolah Ban Mae Pae, juga menambahkan masalah lainnya yang mereka hadapi adalah murid-murid disana seringkali berhenti sekolah. Selain itu, masalah yang sama adalah kurangnya tenaga pengajar untuk membantu mengajari jumlah murid yang banyak *“we have a lot of students enrolling and dropping out steadily. Now, we have one and two assistant teachers to teach 73 students. One teacher teaches too many subjects in every educational stage.”¹⁹⁸*

Seperti yang bisa dilihat bahwa kebanyakan kendala yang terdapat di daerah Mae Hong Son adalah kurangnya tenaga pelajar dan mereka harus mengajari murid yang terlampaui banyak melebihi jumlah pengajar di sekolah itu, selain itu keterbatasan bahasa juga sangat mempengaruhi kualitas mereka dalam mengajar. Beberapa pengajar juga tidak benar-benar dilatih sebagai profesional instruktur sehingga akan sulit untuk berkomunikasi dengan anak-anak dari beragam suku yang ada disekolah tersebut secara efektif.

Kebanyakan daerah di Timur Laut Thailand atau Isan memiliki kualitas akademik yang buruk. Pada tahun 2010, tempat tertinggi yang diduduki oleh Provinsi Isan adalah peringkat ke 43 yaitu Provinsi Udonthani dan tempat terendah di peringkat ke 73 yaitu Provinsi Kalasin.¹⁹⁹ Murid-murid di daerah Isan yang lulus dari sekolah menengah masih mengalami kesulitan dalam memahami bahasa Thailand yang merupakan bahasa nasional. Secara umum, kondisi

¹⁹⁷UNESCO. In Their Own Words : Village Teachers in Rural Thailand. Diakses pada 06 November 2016, dari <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/teachers-voices/thailand/>.

¹⁹⁸*Ibid*

¹⁹⁹Lebih lanjut tabel dapat dilihat dihalaman indeks.

pendidikan yang buruk di Isan terjadi karena tiga alasan yaitu : 1. Isan (yang kebanyakan merupakan orang Lao) adalah orang yang berpendidikan rendah. 2. Anak-anak di daerah Isan mengalami kekurangan gizi, umumnya 10% terjadi sejak mereka balita menurut laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2003. 3. Anak-anak di Isan menderita karena sistem pendidikan yang buruk, karena kurangnya sumber daya atau pengajar yang kurang terlatih.²⁰⁰

Tidak ada alasan untuk percaya bahwa anak-anak Isan itu tidak cerdas karena etnis mereka, melainkan ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan anak-anak di Thailand memiliki tingkat kecerdasan yang rendah adalah karena kurangnya gizi dan karena kurangnya sumberdaya pengajar. Menurut Laporan UNDP Thailand pada tahun 2009, berdasarkan klasifikasi dari empat provinsi yang ada di Thailand yang sangat rentan terhadap kerawanan pangan dan hasil gizi adalah semua yang berada di luar Timur Laut (Yashoton, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Nakhon Phanom).²⁰¹ Kemudian kategori paling rentan selanjutnya termasuk semua sisa daerah di Timur laut (Amnat Charoen, Bueng Kan, Buri Ram, Chaiyaphum, Kalasin, Khon Kaen, Loei, Maha Sarakham, Mukdahan, Nakhon Ratchasima, Roi et, Sakon Nakhon, Si Sa ket, Surin, Ubon Ratchathani, Udon Thani).²⁰² Sedangkan dalam hal kurangnya sumber daya yang berarti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan tersedianya peralatan seperti buku tulis atau komputer, telah menjadi alasan utama dari terjadinya hasil akademik yang buruk di Isan. The Nation menjelaskan bahwa penyebab rendahnya hasil tes IQ anak-anak Isan adalah karena lemahnya akses terhadap fasilitas pendidikan seperti yang mudah di dapatkan murid-murid di Bangkok. Fasilitas pendidikan yang dimaksudkan adalah seperti perpustakaan, dana untuk

²⁰⁰Draper, J. 2011, Desember 12. OP-ED : Solving Isaan's Education Problem. Diakses pada 06 Desember 2016, dari <http://isaanrecord.com/2011/12/12/op-ed-solving-isaans-education-problem/>.

²⁰¹*Ibid*

²⁰²*Ibid*

pendidikan, dan guru. *“Not enough decent schools, libraries, teachers, and education funding, which children in Bangkok have easy to access to.”*²⁰³

Oleh karena faktor-faktor tersebut menjadikan anak-anak di daerah Isan kebanyakan mengalami putus sekolah bahkan sebelum usia mereka mencapai umur 12 tahun. Khususnya anak-anak perempuan karena orangtuanya berpikir bahwa anak perempuan itu seharusnya mencari suami daripada mementingkan pendidikan. Selain itu, anak-anak dari keluarga miskin juga berhenti bersekolah karena harus membantu keluarga mereka. Seringkali anak yang lebih tua berkorban untuk dapat menolang adiknya. Kewajiban membantu keluarganya yang miskin inilah kemudian membawa mereka ke dalam ESKA, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Isan menyumbang pemasokan terbesar dalam industri prostitusi di Thailand. Anak-anak Isan yang terjermus ESKA sepertinya dapat dijelaskan karena mereka tidak memiliki pendidikan yang baik baik dari segi pengetahuan maupun dari segi bahasa.

Dari penjabaran diatas mengenai penyebab dari lemahnya pendidikan di Thailand terjadi karena masih banyak faktor yang memiliki peran vital dalam hal pendidikan masih sangat kurang kualitasnya. Baik itu berasal dari segi teknis seperti infrastruktur, sumberdaya manusia hingga pada tahap pengajaran dan budaya yang terbentuk dalam pendidikan di Thailand. Banyaknya jumlah anak-anak di Thailand yang tidak mengenyam pendidikan formal hingga yang terpaksa keluar menyebabkan anak-anak tersebut tidak memiliki dasar pendidikan yang cukup sebagai bekal hidup mereka. Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan mengapa anak-anak di Thailand banyak terjebak ke dalam ESKA adalah karena mereka tidak memiliki riwayat pendidikan yang baik Sehingga mereka akan dengan mudah tergiur untuk menjadi PSK karena dijanjikan akan mendapatkan upah yang banyak tanpa perlu memiliki keahlian khusus.

²⁰³ *Ibid*

3.4 Permintaan Wisatawan Asing terhadap Anak-anak untuk dijadikan Objek Seks

Permintaan dari wisatawan asing atau turis²⁰⁴ terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seks juga menjadi faktor yang membuat Pemerintah Thailand mengalami kesulitan dalam mengatasi ESKA. Menurut Pitchard dan Morgan²⁰⁵ seorang ahli pariwisata, permintaan wisatawan asing merupakan salah satu dampak dari adanya pariwisata seks. Biasanya para wisatawan asing melakukan permintaan ini untuk memuaskan hasrat fantasi seksual mereka dan juga sebagai bahan untuk pornografi. Selain itu salah satu alasan mengapa permintaan terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seks ini tidak pernah surut adalah karena harga yang dipatok cukup murah, sehingga menambah minat bagi para wisatawan asing khususnya yang datang dari Barat. Untuk mendukung pemikiran tersebut ini, Sean Owens mengatakan dalam artikel di *The Code*²⁰⁶ bahwa salah satu faktor terbesar yang mendukung terjadinya kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah adanya Permintaan untuk dapat melakukan kontak seksual dengan anak-anak. Penyedia *supply* dari bisnis ini bisa merupakan seorang individu ataupun penjahat yang terorganisir, merekalah yang mengambil keuntungan dari permintaan seks terhadap anak-anak ini. Mereka akan mencari para korban untuk dijadikan pasokan terhadap permintaan dari para wisatawan, dan dari sinilah tercipta adanya pasar seks terhadap anak-anak.²⁰⁷

Selain Owens, seorang pengacara, Patricia D. Levan menulis dalam jurnalnya yang berjudul “*Curtailling Thailand’s Child Prostitution Through an International Conscience*” mengatakan anak-anak sangat mudah menjadi

²⁰⁴Penggunaan kata wisatawan asing atau turis akan digunakan bergantian secara acak dalam penulisan di penelitian ini

²⁰⁵Pitchard, A., dan Morgan, J. N. 2000. Privileging The Male Gaze : Gender Tourism Landscape. *Journal of Tourism*. Vol. 27, (No.24): 04

²⁰⁶The Code (The Code of Conduct for the protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism) merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam meningkatkan kesadaran kita terhadap ESKA khususnya dalam bidang pariwisata.

²⁰⁷The Code.org. Understanding Child Sex Tourism. Diakses pada 16 November 2016, dari <http://www.thecode.org/csec/background/>.

“persediaan” karena selalu hadir “permintaan” terutama dari sektor pariwisata seks. Industri pariwisata telah menciptakan begitu banyak keuntungan bagi seorang germo²⁰⁸ yang mencari anak-anak muda untuk menjaga negara mereka tetap kompetitif, dalam hal ini yang dimaksud adalah dalam bidang prostitusi. Para wisatawan asing ini mencari PSK muda dan membayar mahal bagi keperawanannya dengan harapan dapat terhindar dari wabah AIDS yang telah banyak menjangkiti para pelaku atau orang-orang yang bekerja dalam bisnis prostitusi.²⁰⁹

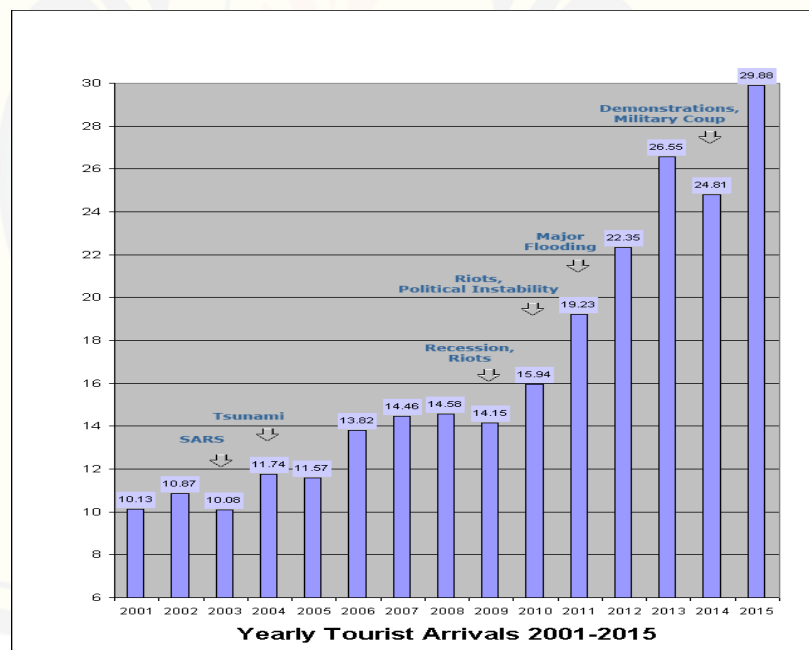
Dari latar belakang masalah di bab satu dikatakan bahwa Thailand merupakan negara yang seringkali menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan mancanegara. Pariwisata memang menjadi salah satu sektor yang dibanggakan oleh Pemerintah Thailand, karena Thailand sendiri memang memiliki beranekaragam budaya dan tempat-tempat pariwisata yang patut untuk dikunjungi sehingga tidak heran jika pariwisata sangat diandalkan oleh Pemerintah Thailand untuk menyokong pemasukan negaranya. Sekarang ini pariwisata seringkali menjadi jalan alternatif bagi suatu negara untuk menambah pendapatan negara, tetapi dampak yang ditimbulkan dari pariwisata juga memiliki dampak negatif yaitu berkembangnya pariwisata seks yang kemudian menjerumus ke ESKA. Thailand sendiri juga sangat terkenal dengan destinasi wisata seks yang memang disuguhkan oleh negara ini sebagai salah satu daya tarik bagi para wisatawan asing. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa banyak tempat prostitusi berkedok bar-bar, panti pijat, tempat karaokean dll yang dibuka di Thailand. Tempat-tempat seperti ini tersebar di beberapa wilayah di Thailand khususnya di wilayah yang menjadi objek destinasi wisata, sehingga tidak akan sulit bagi para wisatawan asing untuk menemukannya.

²⁰⁸Germo merupakan seseorang yang menjadi induk semang atau pemilik dari PSK, atau biasa disebut dengan mucikari. Mereka juga kadang merangkap menjadi seseorang yang mencari korban yang rentan untuk kemudian dijerumuskan menjadi PSK.

²⁰⁹Levan, P. D. 1994. Curtailing Thailand's Child Prostitution Through an International Conscience. *American University Journal of International Law and Policy Review*. Vol. 9, (No. 3): 871.

Jumlah kedatangan wisatawan asing atau turis ke Thailand tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, jika pun mengalami penurunan jumlahnya tidak terlalu berkurang drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 Thailand sempat mengalami jumlah kedatangan turis yang tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai 26.55 juta kedatangan. Meskipun pada tahun 2014 jumlah kedatangan wisatawan mengalami penurunan dikarenakan seringnya terjadi aksi demonstrasi dan kudeta militer, namun jumlah wisatawan ke Thailand naik lagi pada tahun 2015 yaitu mencapai 29.881.091. Jumlah kedatangan yang besar ini diakibatkan karena terjadi peningkatan kedatangan dari turis yang berasal dari China. Sekitar 7.934.791 turis China berkunjung ke Thailand, jumlah ini mengalami peningkatan lebih dari 3 juta dibandingkan dengan tahun lalu.²¹⁰

Gambar 3.3 Grafik Peningkatan Jumlah Wisatawan Asing di Thailand



Sumber : *Tourism Stastics Thailand 2000-2016*

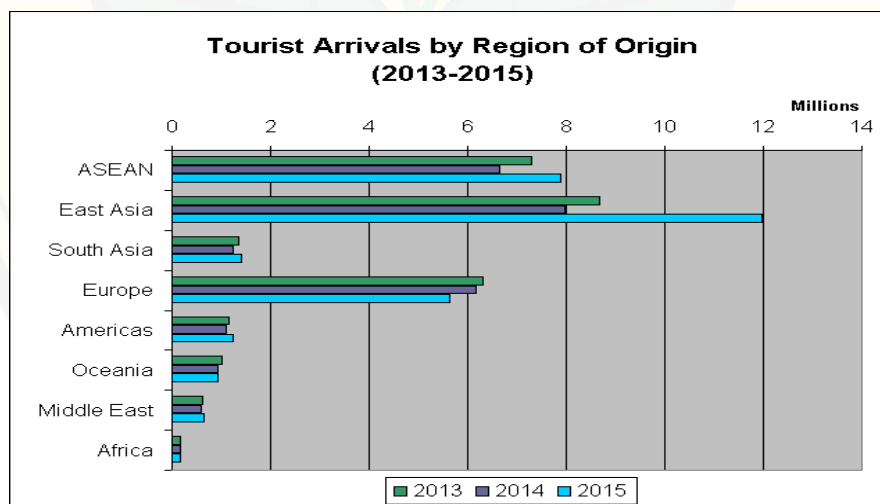
<http://www.thaiwebsites.com/tourism.asp>.

²¹⁰Thaiwebsites.com. Tourism Statistic Thailand 2000-2016. Diakses pada 16 November 2016, dari <http://www.thaiwebsites.com/tourism.asp>.

Pada tahun 2016, jumlah kedatangan turis terus mengalami peningkatan di kuartal pertama maupun kedua. Ada sekitar 9.04 juta pengunjung pada tiga bulan pertama, dan mengalami peningkatan sekitar 15.45 % jika dibandingkan dengan tahun 2015. Ada 7.55 juta pengunjung di kuartal kedua pada tahun 2016, jumlah ini mengalami peningkatan 8.23 % jika dibandingkan dengan kuartal kedua di 2015. Jika jumlah kedatangan ini terus berlanjut diperkirakan pada tahun 2016 jumlah kedatangan turis ke Thailand bisa mencapai sekitar 32-35 juta pengunjung.²¹¹

Turis-turis yang berkunjung ke Thailand didominasi oleh turis yang berasal dari Asia Timur, dengan China menduduki peringkat pertama sebagai pengunjung dengan jumlah tertinggi di Thailand. Pada tahun 2012, sembilan negara di kawasan ASEAN menduduki peringkat *top list* untuk pengunjung ke Thailand. Pengunjung dari kawasan Asia Timur dan ASEAN merupakan turis dengan jumlah peningkatan kedatangan yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan Asia Selatan (kebanyakan India), Eropa, Oceania, Timur Tengah dan Afrika menghasilkan jumlah pengunjung yang terbilang stabil dari tahun 2013, 2014, dan 2015.

Gambar 3.4 Grafik Jumlah Kedatangan Pengunjung berdasarkan Asal Negara



Sumber : *Tourist Arrival to Thailand by Nationality 2014-2015*
<http://www.thaiwebsites.com/tourists-nationalities-Thailand-2015.asp>

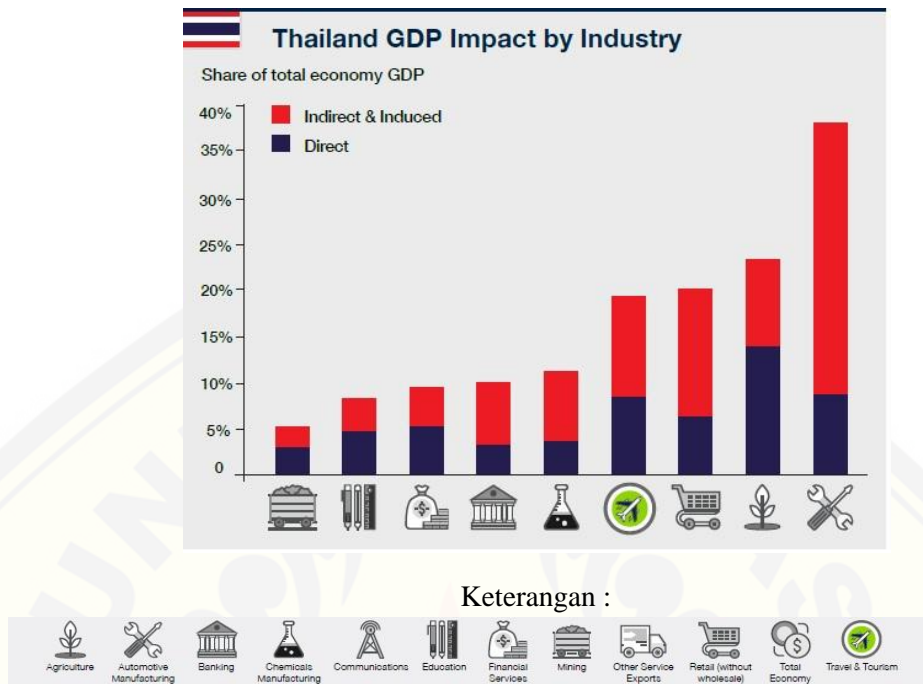
²¹¹*Ibid*

Terus meningkatnya jumlah wisatawan asing yang datang ke Thailand juga berdampak kepada naiknya GDP Negara Thailand. Tercatat bahwa industri pariwisata dan *travel* menyumbang sekitar \$US 72 miliar (sekitar Rp 96 triliun) atau 19,3% dari GDP Thailand di tahun 2014. Sektor *travel* dan pariwisata di Thailand menyumbang jumlah yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya yaitu pertambangan, pendidikan, jasa keuangan, perbankan, dan manufaktur.²¹² Hal ini merupakan bukti bahwa Thailand juga sangat bergantung dengan sektor pariwisatanya, selain sektor retail, agrikultur dan manufaktur (lihat Gambar 3.6). Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang diandalkan untuk mengatasi masalah lapangan pekerjaan di negara ini, selain sektor retail dan pertanian. Sektor *travel* dan pariwisata secara langsung maupun tidak langsung mempekerjakan sekitar 14.1% tenaga kerja di Thailand pada tahun 2014. Sektor pariwisata dan *travel* di Thailand mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak daripada sektor pendidikan.²¹³

²¹²WorldTravel&TourismCouncil. 2015. Thailand. Diakses pada 20 Januari 2017, dari <https://www.wttc.org/-/media/files/reports/benchmark-reports/country-reports-2015/thailand--benchmarking-report-2015.pdf>

²¹³*ibid*

Gambar 3.5 Grafik Pengaruh GDP Thailand melalui sektor Industri

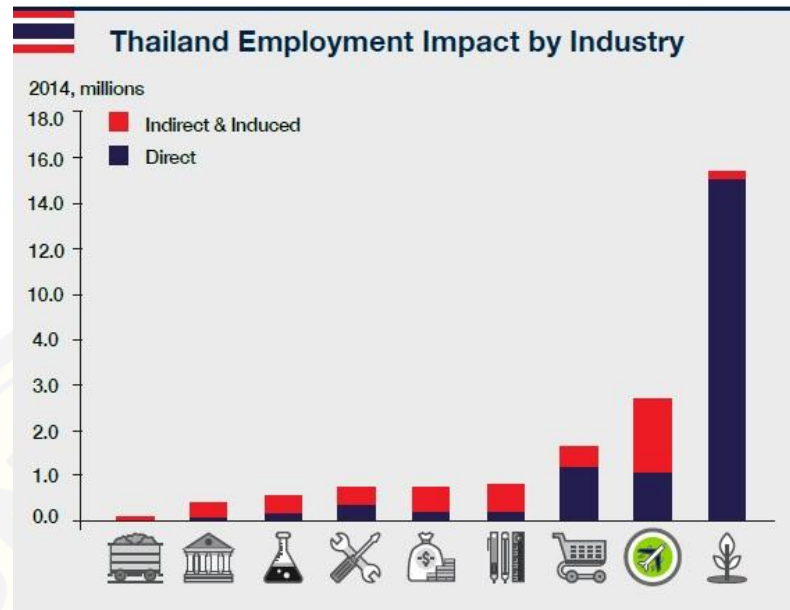


Sumber: *WorldTravel&Tourism Council*.

<http://www.wttc.org/-/media/files/reports/benchmark-reports/country-reports/2015/thailand--benchmarking-report-2015.pdf>

Berdasarkan dari diagram diatas seperti yang sudah dijelaskan bahwa Industri Travel dan Pariwisata menyumbang GDP ke negara Thailand sekitar 19,3%. Sektor ini jika dibandingkan dengan sektor lain seperti pendidikan, perbankan, dan pertambangan menyumbang lebih banyak pemasukan, kecuali sektor ritel, agrikultur dan otomotif-manufaktur yang menyumbang GDP negara lebih banyak. Meskipun demikian dapat juga dilihat, bahwa sektor travel dan pariwisata menyumbang GDP negara lebih banyak dibandingkan sektor ritel secara langsung.

Gambar 3.6 Grafik Dampak Industri kepada Lapangan Pekerjaan di Thailand



Keterangan:



Sumber: WorldTravel&TourismCouncil

www.wttc.org/-/media/files/reports/benchmark-reports/country-reports-2015/thailand--benchmarking-report-2015.pdf

Grafik diatas menjelaskan bahwa bahwa sektor travel dan Pariwisata juga menjadi sektor yang banyak menyumbang terbukanya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja di Thailand, khususnya secara tidak langsung. Sektor ini menjadi penyumbang kedua terbesar bagi negara Thailand setelah sektor pertaniandalam hal penyerapam lapangan kerja. Dari hasil ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa negara Thailand sangat bergantung pada sektor travel dan pariwisata baik dari segi pemasukan GDP negara maupun dari persoalan tenaga kerja.

Peningkatan jumlah turis setiap tahunnya ke Thailand tentu saja terjadi karena beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah tersedianya pariwisata seks. Pariwisata seks di Thailand bukanlah merupakan hal yang baru. Awal mula berkembangnya pariwisata seks di Thailand adalah semenjak dibukanya area RR

(Rest and Recreation) untuk para prajurit Amerika Serikat oleh Pemerintah Thailand pada masa perang Vietnam tahun 1960an. Untuk menunjang bisnis ini mulai dibuka rumah-rumah bordil bagi para turis atau prajurit dari Amerika Serikat. Setelah perang Vietnam berakhir, bisnis ini tetap bertahan dengan menerima turis-turis lain yang datang hingga sekarang ini. James, 35 tahun merupakan salah satu turis asing yang berkunjung ke Thailand yang berasal dari Calgary, Alberta, Kanada mengatakan bahwa dia senang berkunjung ke Thailand salah satu alasannya adalah karena pariwisata seks ini. Menurut James, dia tertarik dengan PSK di Thailand karena mereka memiliki kecantikan yang eksotis dan juga memiliki sikap yang baik jika dibandingkan perempuan-perempuan yang ada di negaranya.

*“Thai woman are beautiful, sexy, compact and well put together. (They have) long black hair (and) smooth skin. They age nicely and they do what i want them to do. Dating a girl from back home is excruciatingly difficult and they think too much. Here, it’s simple, i pay them for the limited sexual services, no strings, no attached, they go home happy and me too.”*²¹⁴

Jumlah wisatawan asing yang datang ke Thailand khusus untuk pariwisata seks sebenarnya sampai saat ini belum ditemukan berapa jumlah tepatnya. Tetapi jika berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh *World Outreach*, sebuah NGO yang berbasis di Inggris pada tahun 2002, total pengunjung pada tahun itu adalah 10.873.000 pengunjung, 60% dari total wisatawan yang datang ke Thailand adalah laki-laki. Menurut penelitian ini, 70% dari tuis laki-laki ini datang ke Thailand untuk wisata seks, nilai ini setara dengan 4.560.000 wisatawan.²¹⁵

Bisnis prostitusi di Thailand sebenarnya adalah ilegal, tetapi aparat kepolisian dan pemerintah disana seakan-akan menutup mata terhadap perkembangan bisnis ini. Para pelanggan dari bisnis prostitusi ini tidak perlu

²¹⁴World Travel Guide. The Secret Lives of Sex Tourists. Diakses pada 17 November 2016, dari <http://www.worldtravelguide.net/holidays/editorial-feature/feature/secret-lives-sex-tourists>.

²¹⁵Wouk.org. Sex Tourism in Thailand. Diakses pada 17 November 2013, dari http://www.wouk.org/rahab_international/pdf_files/Sex%20Tourism%20in%20Thailand.pdf.

mengkhawatirkan adanya razia dari pihak-pihak tersebut atau organisasi masyarakat karena Pemerintah Thailand telah membuat kebijakan bahwa hubungan seks dilarang dengan perempuan di bawah usia 18 tahun. Sehingga banyak dari masyarakat Thailand kemudian menggantungkan hidup mereka dari bisnis prostitusi. Meskipun pemerintah Thailand telah mengeluarkan kebijakan tersebut, pada kenyataannya banyak anak-anak di Thailand yang terjerumus ke dalam bisnis prostitusi. Berdasarkan data dari *Global Witness* tahun 2011, jumlah korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand sekitar 800.000 orang anak.²¹⁶ Angka tersebut merupakan jumlah yang besar, tetapi sebenarnya tidak ada yang bisa menyebutkan dengan rinci berapa jumlah anak-anak yang menjadi korban ESKA di Thailand setiap tahunnya.

Bisnis pariwisata seks di Thailand berkembang dengan sangat sukses, sehingga membuat para pelaku bisnis ini berusaha untuk terus mencari alternatif baru demi terus menarik pelanggan. Salah satu inovasi yang mereka tawarkan adalah PSK muda yaitu anak-anak, dan ternyata inovasi ini disambut baik oleh pasar industri seks yang kemudian menyebabkan munculnya banyak permintaan terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seksual. Anak-anak yang paling rentan menjadi korban ESKA adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, tidak menyelesaikan pendidikan formal atau bahkan tidak berpendidikan, berasal dari daerah pedesaan (kebanyakan berasal dari daerah di Utara dan Timur Laut Thailand), berasal dari suku perbukitan dan perbatasan, serta anak-anak yang menjadi korban *trafficking*.

Eksploitasi seksual komersial anak memiliki berbagai macam bentuk yaitu pelacuran anak yang mengarah ke prostitusi, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Selain bentuk-bentuk tersebut, pariwisata seks anak dan pernikahan anak usia dini merupakan bentuk khusus dari ESKA. Semua bentuk-bentuk yang disebutkan diatas, terjadi di Thailand. Ada begitu banyak anak-anak yang dipekerjakan dalam bisnis prostitusi di Thailand untuk melayani

²¹⁶Widiadana, A.R. 2013, Oktober 22. *Pavena Hongsakula: Giant leap against child prostitution*. Diakses pada 2 Februari 2016, dari <http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/22/pavena-hongsakula-giant-leap-against-child-prostitution.html>.

permintaan yang datang dari wisatawan asing maupun dari laki-laki Thailand sendiri. Penyebaran pornografi anak juga begitu banyak tersebar dalam media internet. Selain itu, banyak PSK anak-anak yang awalnya merupakan korban perdagangan. Anak-anak tersebut kebanyakan berasal dari negara tetangga seperti Burma, Myanmar, Kamboja, dan lain-lain. Anak-anak ini menjadi korban perdagangan karena biasanya mereka merupakan anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan yang berbatasan langsung dengan negara Thailand.

Pelanggan dari pariwisata seks anak yang merupakan bentuk khusus dari ESKA di Thailand ini ada dua yaitu pelanggan yang berasal dari wisatawan asing dan dari pria lokal Thailand sendiri. Alasan dibalik pria lokal Thailand juga menjadi pelanggan dari pariwisata seks di negaranya sendiri adalah karena hal tersebut diterima secara budaya untuk laki-laki di Thailand, mereka boleh mengunjungi tempat-tempat prostitusi atau tempat-tempat lain yang menawarkan jasa pelayanan seks.²¹⁷ Diperkirakan bahwa setidaknya ada 450.000 orang pria lokal Thailand yang datang ke tempat prostitusi setiap harinya.²¹⁸ Banyak dari pria Thailand yang mempercayai bahwa untuk datang ke tempat prostitusi adalah hak mereka untuk dapat berhubungan seks dengan harga yang murah, dan ada cukup banyak perempuan miskin di Thailand yang memungkinkan kegiatan tersebut dapat terjadi. Selain itu bagi pria Thailand, kegiatan ini sudah merupakan sebuah ritual, tradisi yang diturunkan dari ayah ke anak laki-lakinya.²¹⁹ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Chiang Mai ditemukan bahwa dalam masyarakat Thailand, biasanya anak laki-laki pertama kali membeli perempuan untuk kegiatan seksual dimulai pada usia sekitar 13 tahun.²²⁰ Kemudian jika ditotal pengunjung laki-laki yang datang mengunjungi rumah bordil tiap

²¹⁷Unc.edu. The Bangkok Sex Industri and World Tourism. Diakses pada 19 November 2016, dari <http://www.unc.edu/~pcvelich/bangkok/overview.htm>.

²¹⁸Pack, S. 2011. Where Man Can Be a Man : Resituating Thai Masculinity. *Journal of Anthropology*. Vol.7, (No.09): 04

²¹⁹*Ibid*

²²⁰Wouk.org. Prostitution in Thailand. Diakses pada 13 Desember 2016, dari http://www.wouk.org/rahab_international/pdf_files/Prostitution%20in%20Thailand.pdf.

tahunnya, ada sekitar 50 % anak laki-laki usia 16 tahun dan 90 % adalah mahasiswa.²²¹ Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh budaya dalam masyarakat Thailand, sebagaimana yang telah dibahas dalam sub bab 3.2 bahwa budaya di Thailand sangat mempengaruhi laki-laki untuk dapat menikmati jasa pelayanan seks di negaranya. Budaya yang ada di Thailand ini membuat prostitusi dilegalkan secara *permisif* oleh masyarakat, karena mereka menganggap prostitusi dapat dilihat sebagai sebuah bentuk pekerjaan untuk memenuhi kewajiban seorang anak kepada keluarganya.

Sedangkan bagi para wisatawan asing, kebanyakan dari mereka yang berkunjung ke Thailand ini kebanyakan adalah pria. Bentuk pekerjaan dari pria-pria ini beragam seperti seorang pebisnis, pekerja kantoran, dan lain-lain. Para wisatawan ini juga datang dari berbagai macam negara, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari Jepang, Jerman, Australia, Inggris dan Amerika Serikat.²²² Mereka semua ini tertarik untuk berkunjung ke Thailand karena biaya perjalanan dan layanan seksual yang murah. Selain itu mereka juga tertarik dengan fantasi pelayanan seks yang ditawarkan yaitu para wanita di Thailand akan melayani para wisatawan ini sesuai dengan fantasi seksual mereka, hal ini menjadi salah satu daya tarik karena mereka menganggap para wanita di Thailand ini berbeda dengan para wanita feminis yang ada di negaranya.²²³

Ada beberapa faktor pendukung lain yang membuat permintaan terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seks oleh para wisatawan asing ini meningkat. Salah satu faktor tersebut adalah kesempatan. Sebenarnya para wisatawan asing yang tertarik terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seksual tidak selalu adalah orang yang memiliki orientasi seks sebagai *Paedofil*. Biasanya mereka tertarik untuk berhubungan dengan anak-anak pada saat berlibur, dalam kasus ini adalah ke Thailand adalah dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Menurut para wisatawan asing ini, perilaku mereka yang salah ini adalah

²²¹*Ibid*

²²²*Ibid*

²²³*Ibid*

sesuatu yang dapat dimaafkan di negara yang mereka kunjungi karena adanya perbedaan budaya, mereka menganggap bahwa berhubungan seksual dengan orang yang lebih muda dapat diterima dalam budaya di tempat yang mereka kunjungi. Pelaku mungkin berusaha untuk merasionalisasi perilaku mereka dengan alasan bahwa mereka “membantu” anak tersebut menghasilkan uang untuk perbaikan ekonomi mereka.²²⁴

Seperti di Thailand yang menawarkan anak-anak sebagai objek seksual kepada para wisatawan asing. Promosi ini pada akhirnya membuat para wisatawan menganggap perilaku mereka yang salah ini menjadi sesuatu yang sah-sah saja. Bahkan mereka menganggap, dengan perilaku mereka ini membantu keadaan finansial anak tersebut, diantaranya juga menganggap bahwa di Thailand tidak memiliki masalah dengan kegiatan berhubungan seksual dengan anak-anak dibawah umur. Menurut Website Departemen Keadilan Amerika Serikat yang berisi kutipan wawancara dengan seorang wisatawan asing yang disamarkan namanya, turis pria ini mengatakan bahwa *“i’m helping them financially. If they don’t have sex with me, they may not have enough food. If someone has a problem with me doing this, let UNICEF feed them.”*²²⁵

Sedangkan turis lainnya mengatakan bahwa, *“those countries don’t have the same social taboos against having sex with children.”*²²⁶ Dari contoh ini menjadi jelas bahwa para wisatawan asing ini menganggap perilaku mereka adalah benar karena dengan membayar anak-anak tersebut akan membantu finansial mereka. Sehingga mereka sangat memanfaatkan kesempatan kunjungan mereka ke Thailand untuk dapat menikmati fasilitas anak-anak sebagai objek seksual. Selain itu, menurut Sowmia Nair, salah satu agen dari Departemen Keadilan Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintah Thailand seakan-akan menutup mata terhadap perilaku dari wisatawan asing ini, begitu juga dengan

²²⁴ Marquez, L. 2006, Agustus 17. Southeast Asia a Heaven for Pedophiles. Diakses pada 19 November 2016, dari <http://abcnews.go.com/US/story?id=2325416&page=1>

²²⁵ *Ibid*

²²⁶ *Ibid*

aparatus kepolisian yang ada di Thailand. Hal ini disebabkan karena jika mereka menangkap para wisatawan asing tersebut mereka akan menghadapi proses pengadilan yang panjang karena melibatkan status dari wisatawan asing tersebut. Sehingga membuat aparat kepolisian ini menjadi malas untuk mengurus kegiatan wisatawan ini.²²⁷ Dengan adanya alasan ini, menambah kesempatan yang luas bagi wisatawan asing untuk bertindak sesuka mereka terhadap anak-anak yang ada di Thailand.

Faktor lainnya adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi adanya permintaan terhadap anak-anak. Kekuasaan yang dimaksudkan adalah kekuasaan dalam segi perekonomian. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke Thailand adalah mereka yang berasal dari negara maju. Thailand sendiri meskipun telah menduduki peringkat ke 33 perekonomian terbesar dunia tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemerataan ekonomi di negara ini belum merata. Dengan adanya kekuasaan dalam bidang ekonomi yang dimiliki oleh para wisatawan asing ini, membuat penduduk setempat berlomba-lomba untuk menyediakan pelayanan jasa dan saling bersaing demi mendapatkan pemasukan uang dari para turis tersebut.²²⁸ Meledaknya “permintaan” terhadap industri seksual komersial menyebabkan anak-anak seringkali menjadi objek pemenuhan dari permintaan ini. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa banyak anak-anak di Thailand yang menjadi korban ESKA karena memiliki latar belakang keluarga miskin, tidak berpendidikan atau bahkan merupakan korban *trafficking*. Pada kenyataannya tidak semua anak-anak dalam bisnis ini bekerja secara terpaksa, ada beberapa diantaranya menjadi PSK berdasarkan keputusan mereka sendiri. Hal tersebut semua berdasarkan mereka membutuhkan uang untuk pemenuhan kebutuhan hidup, dan menjadi PSK merupakan jalan yang mereka pilih.

²²⁷*Ibid*

²²⁸Martin, P. 2013. Human Trafficking Stories From Boston to Bangkok. Diakses pada 22 Maret, dari <http://www.schusterinstituteinvestigations.org/#!/human-trafficking-boston-to-bangkok-3/c4jy>.

Menjamurnya industri seksual komersial anak di Thailand terlebih untuk menarik minat para wisatawan asing ini membawa kita pada kesimpulan bahwa meskipun sebenarnya pria lokal Thailand sendiri yang menjadi pelanggan terbanyak dari prostitusi di Thailand yaitu sekitar 75 % (menurut Kementerian Kesehatan Publik Thailand pada tahun 1998)²²⁹ tetapi seiring perkembangan zaman, pelanggan dari prostitusi di Thailand tidak hanya didominasi oleh pelanggan lokal saja melainkan juga banyak dari wisatawan asing yang khusus berkunjung ke Thailand untuk menikmati jasa pelayanan seks disana. Dengan banyaknya jumlah wisatawan asing yang datang ke Thailand, membuat negara Thailand sangat bergantung kepada uang investasi yang berasal dari para wisatawan asing tersebut. Hal ini disebabkan karena perputaran uang yang dihasilkan oleh pelanggan lokal tidak sebanyak uang yang dihasilkan oleh perputaran uang yang dihasilkan oleh wisatawan asing.²³⁰ Sehingga pariwisata seks di Thailand terus berusaha untuk memuaskan para pelanggan asingnya dengan berbagai macam hiburan malam.

Adanya permintaan anak-anak untuk dijadikan objek seksual oleh wisatawan asing sebenarnya merupakan hasil dari adanya lingkungan masyarakat yang memperbolehkan praktek prostitusi terjadi. Tentu saja pada permulaan wanita dewasa yang menjadi objek seks, tetapi lama kelamaan anak-anak akan mulai muncul sebagai objek baru yang dilihat untuk memenuhi permintaan pembeli yang melebihi adanya suplai. Selain itu lemahnya perlindungan terhadap anak-anak semakin menjadikan anak-anak korban yang mudah untuk dijadikan objek seksual.

Dari semua penjelasan terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala bagi upaya Pemerintah Thailand dalam mengatasi eksploitasi seksual komersial anak terlihat jelas bahwa latar belakang seseorang menjadi faktor dominan bagi alasan mereka untuk memilih menjadi PSK. Begitu pun juga yang terjadi bagi anak-anak

²²⁹Unc.edu. The Bangkok Sex Industri and World Tourism. Diakses pada 19 November 2016, dari <http://www.unc.edu/~pcvelich/bangkok/overview.htm>.

²³⁰*Ibid*

di Thailand, alasan dari latar belakang mereka dapat menjadi korban ESKA adalah yang paling utama karena kemiskinan. Lemahnya finansial keluarga membuat mereka terpaksa untuk mengambil jalan sebagai PSK demi membantu menghasilkan uang bagi keluarganya. Tetapi selain faktor kemiskinan, faktor budaya yang menjadi landasar pola pikir seseorang juga sangat berpengaruh. Kepercayaan mereka terhadap karma yang diajarkan oleh agama Budha (agama terbanyak yang dipercayai oleh masyarakat Thailand) membawa masyarakat Thailand ke dalam bentuk patriarki, dimana kedudukan seorang perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki dan perempuan dituntut untuk membantu keluarga terlebih dalam hal finansial demi untuk mendapatkan amalan baik. Karena tuntutan tersebut, anak-anak ini terpaksa melihat menjadi PSK adalah salah satu jalan keluar untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Penyebab lain para anak-anak ini mengambil jalan sebagai PSK juga didukung karena mereka tidak mengenyam pendidikan formal dengan cukup, karena sedikit pengetahuan yang didapat serta kurangnya keterampilan diri mereka merasa tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut mereka pilihannya hanya ada dua, menjadi buruh atau pekerja rumah tangga dengan upah yang minim atau menjadi PSK dan dapat menghasilkan uang dengan cepat dan banyak. Lemahnya pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak di Thailand tidak hanya disebabkan karena keadaan finansial keluarga saja, melainkan peran sistem pendidikan di Thailand yang tidak cukup baik membentuk anak-anak di Thailand juga menjadi generasi yang buruk. Sistem edukasi di Thailand secara tidak langsung mengajarkan mereka untuk berfikir praktis, instan dan rentan terhadap budaya plagiarisme menjadikan anak-anak di Thailand sering memilih menjadi PSK karena mereka menganggap menjadi PSK tidak memerlukan keterampilan khusus dan dengan cepat mereka dapat menghasilkan uang. Tuntutan gaya hidup yang tinggi di zaman globalisasi juga menyebabkan anak-anak di Thailand sering terjerumus ke dalam bisnis prostitusi karena ajakan dari teman-temannya.

Pengembangan sektor pariwisata di Thailand selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif bagi negara Thailand. *Image* Thailand sebagai surga wisata seks merupakan sesuatu yang tidak dapat dengan mudah dihilangkan dari Thailand. Berbagai macam jasa pelayanan seks yang ada di Thailand serta menjamurnya tempat-tempat hiburan khusus untuk seks juga yang menjadi pendorong bagi terjadinya eksploitasi seksual di Thailand susah untuk dihilangkan. Adanya tawaran pariwisata seks bagi wisatawan asing menimbulkan permintaan yang berlebihan bagi bisnis prostitusi, kelebihan permintaan menyebabkan anak-anak kemudian dilihat menjadi salah satu objek yang bagus dalam bisnis prostitusi. Anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual disebabkan karena dianggap kerentanan mereka dan kepolosan mereka menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelanggan bisnis ini, selain itu kesempatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh wisatawan asing juga menjadikan permintaan anak-anak sebagai objek seks terus meningkat dari hari ke hari. Tetapi adanya permintaan dari wisatawan asing juga tidak dapat terlepas karena percampuran dari ketiga faktor diatas, yaitu kemiskinan, pengaruh budaya dan rendahnya pendidikan masyarakat sebagai dasar alasan seorang anak menjadi korban ESKA. Ketiga alasan inilah yang menjadikan kesempatan bagi wisatawan asing untuk membenarkan perbuatan buruk mereka tersebut.

BAB 5. KESIMPULAN

Di Thailand ESKA masih susah untuk dihentikan karena banyak sekali hambatan-hambatan yang didapatkan oleh Pemerintah Thailand. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya terjadi karena faktor-faktor penyebab ESKA di Thailand masih belum diatasi dengan baik, tetapi hambatan itu pun juga terjadi karena masih banyak kekurangan yang datang dari Pemerintah Thailand sendiri terkait upayanya untuk menghentikan ESKA. Hambatan Pemerintah Thailand yang berasal dari faktor penyebab terjadinya ESKA dapat dikategorikan menjadi dua yaitu : faktor primer dan sekunder. Faktor primer adalah yang berasal dari pendapatan atau dalam penelitian ini adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor paling dominan yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam ESKA. Faktor sekunder adalah pengaruh budaya, rendahnya tingkat pendidikan, dan adanya permintaan dari wisatawan asing tidak terlalu dominan tetapi tetap mempengaruhi seseorang terlebih anak dalam mengambil keputusan untuk menjadi seorang PSK. Meskipun tidak semua faktor terjadinya ESKA dapat menjadi hambatan, tetapi jika akar permasalahan ini masih belum diatasi dengan baik maka ESKA akan terus terjadi.

Hambatan lainnya berupa upaya Pemerintah Thailand yang masih lemah terkait penegakkan hukum. Lemahnya penegakkan hukum di Thailand ini berupa masih banyak celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk lolos dari jeratan hukum. Celah-celah hukum ini tidak hanya dimanfaatkan para pelaku kejahatan tetapi juga oleh beberapa aparat penegak hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan melalui korupsi. Selain itu tidak adanya mekanisme penegakkan di Thailand juga semakin menambah kelemahan dari penegakkan hukum di Thailand. Tidak adanya mekanisme penegakkan dan ditambah dengan korupsi ini semakin mempersulit para korban ESKA untuk mengadukan kejahatan atau mencari pertolongan.

Selain itu, adanya penyalahgunaan standar internasional juga membuat seakan-akan bisnis ESKA di Thailand ini terlindungi. Salah satu standar

internasional yang disalahgunakan yaitu terjadi pada perjanjian ekstradisi. Mengingat bisnis ESKA ini merupakan bisnis kejahatan terorganisir yang koneksinya merupakan koneksi internasional, penting sekali untuk membuat produk hukum yang sejelas-jelasnya terkait ESKA. Sedangkan Thailand sendiri dalam perjanjian kerjasama ekstradisi membuat celah hukum di dalamnya. Tentu saja hal ini akan sangat dimanfaatkan oleh para wisatawan yang datang ke Thailand untuk tujuan seks, terutama tujuan seks terhadap anak-anak. Selain karena faktor yang berasal dari domestik Thailand, faktor migrasi juga berpengaruh penting terhadap hambatan yang didapat oleh Pemerintah Thailand dalam mengatasi ESKA. Banyaknya para imigran gelap ini membuat bisnis ESKA terus berjalan. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan ini yang kemudian dipaksa untuk bekerja menjadi pekerja seks di tempat-tempat hiburan di Thailand.

Untuk mengatasi permasalahan ESKA tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Dibutuhkan kerja sama antara beberapa negara dalam satu kawasan. Karena permasalahan di satu negara, akan memunculkan permasalahan lain di negara tetangga. Selain melakukan kerjasama, negara-negara tersebut harus benar-benar berkomitmen untuk menghapuskan ESKA. Permasalahan ESKA ini semakin kompleks karena persoalan ESKA juga terkait dengan persoalan *child trafficking*. Penelitian yang dilakukan ini memang masih terbatas dan belum sempurna. Perlu ada penelitian lain tentang faktor-faktor dan hambatan-hambatan lainnya yang menyebabkan kasus eksploitasi anak ini susah untuk dihentikan. Salah satu contohnya adalah isu perdagangan anak yang juga sangat kompleks karena melibatkan lebih dari satu negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Altman, D. 2007. *Global Sex, Politik Seks, Komersialisasi Tubuh dan Hubungan Internasional*. Jakarta: Qalam.
- Acharya, A. 2009. *Constructing a Security Community in South East Asia : ASEAN and the Problem of regional order*. New York: Routledge
- ASEAN. 2006. *ASEAN Responses to Trafficking in Persons*. Jakarta : Public Affairs Office ASEAN.
- Baker, S. 2000. *The Changing Situation of Child Prostitution in Northern Thailand: A Study of Cangwat Chiang Rai*. Bangkok: ECPAT International.
- Bourdieu, P. 2012. *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Cetakan ke 2, diterjemahkan oleh Yudi Santosa. Bantul: Kreasi Wacana.
- Bourdieu, P. 1996. *Distinction : A social critique of the judgement of taste*. Cetakan ke-8, translated by Richard Nice. Cambridge. Harvard University Press.
- Boussard, C. 2003. *Crafting Democracy Civil Society in Post Transition Honduras*. Sweden: Lund University
- Chase, E. dan Statham, J. 2004. *The commercial sexual exploitation of children and young people : An overview of key literature and data*. London : University of London.
- Clayton A., Hartjen, S. 2012. *The Global Victimization of Children Problems and Solution*. London : Springer.
- ECPAT International. 1997. *Commercial Sexual Exploitation of Children : A report on the Implementation of the Agenda for Action adopted at the First World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children*. Bangkok : ECPAT International
- ECPAT International. 2003. *Code Of Conduct For The Protection Of Children From Sexual Exploitation In Travel And Tourism*. Bangkok : ECPAT Internasional
- ECPAT Foundation. 2006. *Global monitoring report on the status of action against commercial sexual exploitation of children thailand*. Thailand: Saladaeng Printing.
- ECPAT International. 2011. *Ecpat international annual report July 2010-June 2011*. Thailand: ECPAT International.

Farr K. 2005. *Sex Trafficking : The Global Market in Women and Children*. New York : Worth.

ECPAT, 2011. *Global Monitoring status of action against commercial sexual exploitation of children Thailand*. Bangkok : ECPAT Internasional

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2002. *Case Study on Education Opportunities for Hill Tribes in Northern Thailand*. Bangkok : Thailand.

ILO. 2005. *First Hand Knowledge Voices across the Mekong : Community action against trafficking of children and women*. Bangkok : ILO.

Jacobsen, T. 2008. *Lost Goddesses : The Denial of Female Power in Cambodian History*. Malaysia: Nias Press.

John L, 2004. *50 Filsuf Kontemporer dari Strukturalisme sampai Postmodernitas*. Cetakan ke 3, diterjemahkan oleh A. Gunawan Admiranto. Yogyakarta: Kanisius.

Kara, S. 2009. *Sex trafficking : Inside the Business of Modern Slavery*. New York: Columbia University Press.

Giri, V. M. 1999. *Kanya : eksploitaxion of little angles*. New Delhi: Gyan.

Sofian, A. 2008. *Memerangi Pariwisata Anak*. Bangkok : ECPAT Internasional.

UNICEF, 2009. *Handbook on the Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*. Florence : Innocenti Publications.

UNICEF, 2011. *The state of the World's Children 2011 : Adolescence an age of Oppurtunity*. New York : UNICEF.

Yin, K. R. 2011. *Qualitative research from start to finish*. New York : The Guilford Press.

Jurnal :

Carolin L, Lindsay A and Victor W. 2015. Sex Trafficking in the Tourism Industry. *Journal of Tourism and Hospitality*. Vol. 4, (No.4): 2-6

Farley, M. 2006. Prostitution, trafficking and cultur amnesia : What we must known in order to keep the business of sexual exploitation running smoothly. *Yale journal of Law and Feminism*. Vol.18, (No.109): 108-110

- Huttasin, N., Mommaas, H., dan Knippenberg, L. 2015. Towards Tourism Development of the Isan Region, Northeastern Thailand. *Journal of Tourism*. Vol.11, (No.1): 100-104
- Levan, P. D. 1994. Curtailing Thailand's Child Prostitution Through an International Conscience. *American University Journal of International Law and Policy Review*. Vol. 9, (No. 3): 871-872.
- Pack, S. 2011. Where Man Can Be a Man : Resituating Thai Masculinity. *Journal of Anthropology*. Vol.7, (No.09): 04-06
- Pitchard, A., dan Morgan, J. N. 2000. Privileging The Male Gaze : Gender Tourism Landscape. *Journal of Tourism*. Vol. 27, (No.24): 04-05
- Proskow, A. 2002. Trading Sex for Karma in Thailand : An analysis of the Reciprocal Relationship Between Buddhist Monastics and Thai Prostitute. *Thesis of Comparative Religion*. Michigan: Western Michigan University
- Shifman, P. 2003. Trafficking and women's human rights in a globalized world : An interview by Pamela Shifman. *Family Court Review*. Vol.44, No.(429-447): 126-128
- Tantiwiramanond, D. 1997. Changing Gender Relations in Thailand : A Historical and Cultural Analysis. *Indian Journal of Gender Studies* Vol.4, (No. 2):185-187
- Taylor, L. 2005. Dangerous Trade-offs : The Behavioral Ecology of Child Labor and Prostitution in Rural Northern Thailand. *Journal of Anthropology*. Vol. 46,(No. 03): 410-411

Internet :

- A Future Without Child Labour : Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221124169_EN/lang--en/index.htm. Diakses pada 30 Mei 2016
- Andrees, B. 2008. Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_335667.pdf. Diakses 17 Maret 2016
- ASEAN. Organizational Overview. <http://asean.org/asean/about-asean/overview/>. Diakses pada 30 Agustus 2016

- Asian Development Bank. Poverty in Thailand. Diakses pada 03 Desember 2016, dari <https://www.adb.org/countries/thailand/poverty>.
- Baba, S. 2010. The Impact of NGO's Movement in the Educational Support for Minority in Northern Thailand. Hlm : 2. Diakses pada 04 November 2016, dari <http://203.131.210.100/conference/wp-content/uploads/2011/06/Movement-in-the-Educational-Support.pdf>.
- Baker, K. 2013. Buddhism and the Sex Industry in Thailand. Diakses pada 16 September 2016, dari <https://prezi.com/au60gwbwhe7z/buddhism-and-the-sex-industry-in-thailand/>
- Barker, M. 2004. Child-Sex Stalker Find an Indulgent New Frontier. Diakses pada 11 Oktober 2016, dari <http://www.smh.com.au/articles/2004/06/11/1086749894537.html>
- Beatrice K. Paedophilia Antara Dosa dan Kelainan Jiwa. <https://id.scribd.com/doc/68898455/PAEDOPHILIA>. Diakses pada 11 Juni 2016.
- Chantrakul, K. 2013. Global Action, Commitment and Solidarity-ECPAT International. Diakses pada 27 Maret 2017, dari http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/Assembly-Report_2011_ENG.pdf.
- Child Right Coalition Asia. ASEAN and Child Rights. <http://childrightscoalitionasia.org/asean-and-child-rights/>. Diakses pada 2 September 2016
- Childsafe Network. 2010. Childsafe Network's Charter. Diakses pada 15 Oktober 2016, dari http://www.friendsinternational.org/resources/charter/CS_Charter.pdf
- Cohen, L. 2013, September 25. Every day in Cambodia Documentary. The CNN Freedom Project. Diakses dari <http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2013/09/25/every-day-in-cambodia/>.
- Committee on the Rights of the Child. 2005. Consideration of Reports submitted by States Parties under Article 44 of the Convention, Second Periodic Report – Concluding observations Thailand. Diakses 11 Oktober 2016, dari http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC_C_AUS_CO_4.pdf.
- Compassion in Jesus name. Thailand Northern Religion. Diakses pada 10 Oktober 2016, dari <http://www.compassion.com/thailand/hmong.htm>.

- D’Cunha J. Trafficking in Person : A gender and rights perspective. Diakses pada 30 Maret 2017, dari www.un.org/womenwatch/daw/egm/trafficking2002/reports/EPDCunha.PDF#search='Trafficking%20in%20persons%3A%20a%20gender%20and%20rights%20perspective%20Jean'.
- Daniel, M. 2014, Oktober 17. Education in Thailand : Changing Time ?. Diakses pada 11 November 2016, dari <https://asiancorrespondent.com/2014/10/education-in-thailand-changing-times/>
- Dictionnaire. Child Prostitution in Thailand. Diakses pada 13 Oktober 2016, dari <http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Child%20Prostitution%20in%20Thailand/en-en/>.
- Dieselberg, A. 2010, Oktober 12. ISSAN : Birthplace of Daughters Supplier For Prostitution. Diakses pada 13 Oktober 2010, dari <http://www.nightlightinternational.com/uncategorized/issan-birthplace-of-daughters-supplier-for-prostitution/>
- Daorueng, P. 2016, November 3. Education-Thailand : Good Marks on Literacy, But Drop-out Rates Worrisome. Diakses pada 4 November 2016, dari <http://www.ipsnews.net/1999/12/education-thailand-good-marks-on-literacy-but-drop-out-rates-worrisome/>.
- Draper, J. 2011, Desember 12. OP-ED : Solving Isaan’s Education Problem. Diakses pada 06 Desember 2016, dari <http://isaanrecord.com/2011/12/12/op-ed-solving-isaans-education-problem/>.
- ECPAT. Alternative Report Following the Initial Report from Thailand on the implementation of the OPSC. Diakses pada 26 Maret 2017, dari http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/ngos/Thailand_ECPAT_OPSC.pdf
- ECPAT Internatsional. Alternative Report Thailand 2011. Hlm 4 . Diakses pada 1 Desember 2016, dari http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/THA/INT_CRC_NGO_THA_59_10128_E.pdf.
- ECPAT. Declaration and Agenda for Action : 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children. Stockholm, Sweden, 27-31 August 1996. http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/stockholm_declaration_1996.pdf. Diakses pada 16 September 2016
- ECPAT Foundation. 2011. Executive summary Thailand. Diakses pada 2 September 2016, dari http://www.ecpat.net/sites/default/files/exsum_a4a_eap_thailand.pdf

- Educate child.org. Thailand. Diakses pada 04 November 2016, dari <http://educatechild.org/our-partners-projects/country/thailand>.
- Erika, W. 2015. The Link Between Poverty and Prostitution. <http://www.borgenmagazine.com/prostitution-poverty/>. Diakses pada 23 September 2016
- Experience Thailand. What is Thailand's role in ASEAN ? What are Thailand's contributions toward the evolution of ASEAN ?. <http://www.thailandtoday.in.th/node/419>. diakses pada 27 Oktober 2016
- Fact and details. Prostitutes in Thailand : Their Lives, motivations, scams and costumers. Diakses pada 08 Desember 2016, dari http://factsanddetails.com/southeast-asia/Thailand/sub5_8d/entry-3246.html.
- Fact and Details. Child Prostitution in Thailand. Diakses pada 13 Oktober 2016, dari http://factsanddetails.com/southeast-asia/Thailand/sub5_8d/entry-3247.html.
- Fox, J. Sex Laws in Thailand. Thailand Law Forum. Diakses pada 27 Maret 2017, dari <http://www.thailawforum.com/sex-crimes-in-thailand-part2-2.html>.
- Green, P. 2001, Agustus 1. Thailand : Tourism and the Sex Industry. Women Magazine. Diakses pada 16 September 2016, dari <http://www.highbeam.com/doc/1G1-94123246.html>.
- Grosfeld, S. Children For Sale. Diakses pada 12 Oktober 2016, dari http://www.vachss.com/help_text/reports/futures_1.html.
- Heatwatch. About Commercial Sexual Exploitation of Children. http://www.heatwatch.org/human_trafficking/aboutcsec. Diakses pada 27 September 2016
- Humanium. Declaration of the Rights of the Child. <http://www.humanium.org/en/childrens-rights-history/references-on-child-rights/geneva-declaration/>. Diakses pada 30 Agustus 2016
- Human Trafficking Report : Thailand. www.humantrafficking.org/countries/thailand. Diakses pada 30 Mei 2016
- Hunter, M. 2015, 3 November. Why some Thai Sex Workers say They are happy in their jobs. Diakses pada 08 Desember 2016, dari <https://asiancorrespondent.com/2015/11/many-thai-sex-workers-say-they-are-happy-in-their-jobs/>
- Innovation in Civic Partisipation. Thailand : Global Youth Service Database. Diakses pada 30 Oktober 2016, dari <http://www.icicp.org/resource->

library/icp-publications/global-youth-service-database/asia-and-the-pacific/southeast-asia/thailand/

Investopedia. Gini Index. Diakses pada 08 Desember 2016, dari <http://www.investopedia.com/terms/g/gini-index.asp>.

Jewcharoensakul, S. Tourist Industry Promotion : Aim to Introduce Thai Foods Matching with Northern Program's Tour to Serve Sustainable Tourism. Diakses pada 11 Oktober 2016, dari http://www.ijbts-journal.com/images/main_1366796758/0071-Surachai.pdf

Jingjai. 2011, Desember 12. Underage Prostitution On Rise in Isan. Udonmap. Diakses pada 13 oktober 2016, dari <http://www.udonmap.com/udonthaniforum/underage-prostitution-on-rise-in-isan-t23590.html#p282249>.

Jitsuchon, S. dan Ritcher, K. 2007. Thailand Poverty Maps : From Construction to Application. Diakses pada 20 Desember 2016, dari http://siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/342674-1092157888460/493860-1192739384563/10412-13_p241-260.pdf.

Kawan Bisnis.Com. 2014. Kerusuhan Politik Baht Thailand Turun ke Titik Terendah. Diakses pada 23 April 2016, dari <http://www.kawanbisnis.com/pilih-kanal-berita/internasional/473-kerusuhan-politik-baht-thailand-turun-ke-titik-terendah>

Kuan, J. Evaluation of Forum-Asia's Performance and Achievement. Diakses pada 27 Maret 2017 <http://www.sida.se/contentassets/ef7501af3acd473dac413da673dbd09d/d863abd6-b3eb-463d-9a17-d37b71641866.pdf>.

Navarro, 2006. Bourdieu and Habitus. <http://www.powercube.net/other-forms-of-power/bourdieu-and-habitus/>. Diakses pada 24 April 2016

Net4kids.org. Thailand : Improving the quality of education in mountain schools. Diakses pada 5 November 2016, dari <http://www.net4kids.org/en/project/thailand-improving-the-quality-of-education-in-mountain-schools>.

Dieselberg, A. 2010. ISSAN : Birthplace of Daughters Supplier For Prostitution. <http://www.nightlightinternational.com/uncategorized/issan-birthplace-of-daughters-supplier-for-prostitution/>. Diakses pada 13 Oktober 2010

Martin, P. 2013. Human Trafficking Stories From Boston to Bangkok. Diakses pada 22 Maret, dari <http://www.schusterinstituteinvestigations.org/#!human-trafficking-boston-to-bangkok-3/c4jy>.

- Marquez, L. 2006, Agustus 17. Southeast Asia a Heaven for Pedophiles. Diakses pada 19 November 2016, dari <http://abcnews.go.com/US/story?id=2325416&page=1>
- MSDHS. Thailand's Annual Report on Efforts and Progress on the Implementation of Anti-Human Trafficking Action Plan in 2012. Diakses pada 30 Maret 2017, dari www.nocht.msociety.go.th/album/download/08d77f3a6409a6d7dfa696b6fd16d331.pdf.
- OHCR. Background on ASEAN. Diakses pada 2 September 2016, dari http://bangkok.ohchr.org/files/Regional_Dialogue_ASEAN_Background_Paper.pdf.
- Green, P. 2001, Agustus 1. Thailand : Tourism and the Sex Industry. Women Magazine. Diakses pada 16 September 2016, dari <https://www.highbeam.com/doc/1G1-94123246.html>.
- Peters, A. H. 2006. Sex, Sun and Heritages Tourism Threats and Opportunities : Report on Best "Practices" on Tourism and Trafficking for UNIAP and World Vision. Diakses pada 27 September 2016, dari <http://www.notip.org.cn/UserImages/00001903.pdf>.
- Polak, H. 2008, November 11. Sex Tourism and Prostitution in Thailand. Diakses pada 13 Oktober 2016, dari <http://serendip.brynmawr.edu/exchange/hpolak/sex-tourism-and-prostitution-thailand>.
- Pongsapich, A. Regional Cooperation to Prevent Human Trafficking in Asia : The Case of Thailand. Diakses pada tanggal 4 Mei 2015, dari <http://www.nhrc.or.th/getattachment/d10faa6b-9121-456a-895e-40a9f335ed2e/.aspx>.
- Rasmus K. 2012, Maret 7 . What drives a prostitute. Diakses pada 25 Oktober 2016, dari <http://sciencenordic.com/what-drives-prostitute>.
- Reyes, C. 2015, Oktober 8. History of Prostitution and Sex Trafficking in Thailand. Diakses pada 16 Oktober 2016, dari <http://www.endslaverynow.org/blog/articles/history-of-prostitution-and-sex-trafficking-in-thailand>.
- Rural-Urban Poverty and Inequality in Thailand. Diakses pada 07 September 2016, dari <http://rksi.org/sites/default/files/document/351/6-country-note-tha.pdf>.
- Sex Laws in Thailand Part 2: Laws Regulating Commercial Sex and Entertainment Places. <http://www.thailawforum.com/sex-crimes-in-thailand-part2.html>. Diakses pada 30 Mei 2016

- Simpkins, D. 1998. Rethinking the Sex Industry : Thailand's Sex Workers, the State, and Changing Cultures of Consumption. Diakses pada 13 Oktober 2016, dari <http://quod.lib.umich.edu/m/mfsfront/ark5583.0012.005/--rethinking-the-sex-industry-thailands-sex-workers-the-state?c=mfs;c=mfsfront;g=mfsg;rgn=main;view=fulltext;xc=1#N8>.
- Smirnoff, I. 2016. International Consultation of Child Helplines Bangkok, Thailand 2016. Diakses pada 30 Maret 2017, dari http://www.childhelplineinternational.org/media/170406/child_helpline_international_-_2016_international_consultation_-_final_draft_agenda.pdf
- Taipei Times. 2003, November 28. Thailand Holds debate on legalizing prostitution. Diakses pada 28 September 2016, dari <http://www.taipeitimes.com/News/world/archives/2003/11/28/2003077555>.
- Thai Ministry of Foreign Affairs. Human Rights Thailand. Diakses pada 27 Maret 2017, dari www.mfa.go.th/humanrights/implementation-of-un-resolutions/78-answer-to-questionnaire-on-the-protection-of-children-from-sexual-exploitation.
- Thaiwebsites.com. Tourism Statistic Thailand 2000-2016. Diakses pada 16 November 2016, dari <http://www.thaiwebsites.com/tourism.asp>.
- Thaiworld. Poor ISAN. Diakses pada 10 Oktober 2016, dari <http://www.thaiworldview.com/lao/isan6.htm>.
- Thailand. 1996. Prostitution Prevention and Suppression Act. Diakses pada 28 September 2016, dari <http://www.nocht.m-society.go.th/human-traffic/law/download/la2-5en.pdf>.
- Thailand and ASEAN. Diakses pada 27 Oktober 2016, dari <http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/other-20121207-114514-431514.pdf>.
- Thailand Sex Guide Dream Holiday Asia. Diakses pada 24 Maret 2016, dari <http://dreamholidayasia.com/destination/thailand-guide/thailand-sex-guide/>.
- Thailand Significant Advancement. Diakses pada 20 Oktober 2016, dari <https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/reports/child-labor/findings/2014TDA/thailand.pdf>
- ThailandRedCats. 2016, September 4. Bangkok's 3 Red Light District. Diakses pada 21 November 2016, dari <http://www.thailandredcat.com/bangkoks-3-red-light-districts/>

- Thailand: 2014 Findings on the Worst Forms of Child Labor, Significant Advancement. Diakses pada 24 Januari 2016, dari <http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/thailand>.
- The Bangkok Sex Industry and World Tourism. Sex Industry in Bangkok. Diakses pada 13 Oktober 2016, dari <http://www.unc.edu/~pcvelich/bangkok/net1024.htm>.
- The Code.org. Understanding Child Sex Tourism. Diakses pada 16 November 2016, dari <http://www.thecode.org/csec/background/>.
- The CNN Freedom Project. "Everyday in Cambodia" Documentary. Diakses pada 30 Maret 2017, dari <http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2013/09/25/every-day-in-cambodia/>.
- The Global Slavery Indeks 2014. Hlm : 92. Diakses pada 12 Juni 2016, dari http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2014/11/GlobalSlavery_2014_LR-FINAL.pdf.
- The Global Slavery Indeks. 2016. How many People are in modern slavery in Thailand. Diakses pada 21 November 2016, dari <http://www.globalslaveryindex.org/country/thailand/>.
- The Penal Code Amendment Act (NO. 14) B.E.2540. 1997. Diakses 14 Oktober 2016, dari <https://www.samuiforsale.com/law-texts/criminal-penal-code-amendment-act.html>.
- Trafficking in Person Report 2015 : Thailand Tier 3. <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243547.htm>. Diakses pada 30 Mei 2016
- UNAIDS. Thailand AIDS Response Progress Report. Diakses pada 12 Juni 2016, dari http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/THA_narrative_report_2015.pdf.
- UN-Act. UN-ACT : Law and Agreement. <http://un-act.org/background/laws-agreements/>. Diakses pada 29 September 2016.
- Unc.edu. The Bangkok Sex Industri and World Tourism. Diakses pada 19 November 2016, dari <http://www.unc.edu/~pcvelich/bangkok/overview.htm>.
- UNDP. 2013. Human Development Report : Income Gini coefficient. Diakses pada 02 Desember 2016, dari <http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient>.

- UNDP in Thailand. Thailand Population. Diakses pada 03 Desember 2016, dari <http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/countryinfo.html>.
- UNESCO. In Their Own Words : Village Teachers in Rural Thailand. Diakses pada 06 November 2016, dari <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/teachers-voices/thailand/>.
- UNHCR Refworld. 2013 Trafficking in Person Report – Thailand. Diakses pada 24 Maret 2017, dari <http://www.refworld.org/docid/51c2f3824d.html>.
- UNICEF. Child Protection ; Thailand. Diakses pada 28 September 2016, dari http://www.unicef.org/thailand/protection_3343.html.
- UNICEF. Convention on the Rights of the Child. Diakses pada 30 Agustus 2016, dari http://www.unicef.org/crc/index_30229.html.
- UNICEF. Thailand: Children Not in School. Diakses pada 4 November 2016, dari http://www.unicef.org/thailand/education_14936.html.
- UNICEF : Thailand, 2004. The Convention on the Right of Child (CRC). Diakses pada 20 Oktober 2016, dari http://www.unicef.org/thailand/overview_4010.html.
- United Nations Children Fund (UNICEF). Excluded and Invisible: The State of the World's Children, 2006. Diakses pada 30 Maret, dari https://www.unicef.org/sowc06/pdfs/sowc06_fullreport.pdf.
- UNDP. 2013. Human Development Report : Income Gini coefficient. Diakses pada 02 Desember 2016, dari <http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient>.
- UNDP in Thailand. Thailand Population. Diakses pada 03 Desember 2016, dari <http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/countryinfo.html>.
- United Nation. Child Labour. Diakses pada 30 Agustus 2016, dari <http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/childlabour/intlconv.s.html>.
- United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC). Trafficking in Human Being : Global Patterns. Diakses pada 30 Maret 2017, dari http://www.unodc.org/unodc/en/%20trafficking_persons_report_2006-04.html.
- Unwto protect children campaign. Diakses pada 12 Oktober 2016, dari <Http://Ethics.Unwto.Org/En/Content/Protect-Children-Campaign>
- US Department of State. 2008. Human Rights Report: Thailand 2008. Diakses pada 9 oktober 2016, dari <http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eap/119058.htm>

- United States Departement of State. 2013, Juni 19. Trafficking in Person Report : Thailand. Diakses pada 26 Maret 2017, dari <http://www.refworld.org/docid/51c2f3824d.html>.
- U.S. Department of State. 2015 Trafficking in Person Report : Thailand Tier 3. Diakses pada 30 Mei 2016, dari <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243547.htm>.
- U.S. Department State, 2016. Thailand : 2016 Trafficking in Person Report. Diakses pada 21 November 2016, dari <http://m.state.gov/md258876.htm>
- Wattimena, AA. R. 2012. Berpikir Kritis bersama Pierre Bourdieu. Diakses pada 24 April 2016, dari <http://rumahfilsafat.com/2012/02/2014/sosiologi-kritis-dan-sosiologi-reflektif-pemikiran-pierre-bourdieu/>.
- Widiadana, A.R. 2013, Oktober 22. *Pavena Hongsakula: Giant leap against child prostitution*. Diakses pada 2 Februari 2016, dari <http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/22/pavena-hongsakula-giant-leap-against-child-prostitution.html>.
- William, L. 2016. 'Paedos Paradise' We go into Pattaya, the lawless Thai 'wild west' of the world's largest red light district... with 27.000 prostitutes. Diakses pada 21 November 2016, dari <https://www.thesun.co.uk/living/1693057/inside-the-city-in-thailand-with-the-worlds-largest-red-light-district-and-where-men-can-choose-from-27000-prostitutes/>
- Wijaya, W. D. Diskriminasi Perempuan Buddha. Dhammadatta.org. Diakses pada 25 Januari 2017, dari <https://dhammadatta.org/artikel/diskriminasi-perempuan-buddhis/>
- Wonderluhst. 2016. The Impacts of Sex Tourism on Thailand. Diakses pada 22 November 2016, dari <http://wonderluhst.net/the-impacts-of-sex-tourism-on-thailand/>.
- World Tourism Organization [Pdf]. Diakses pada 12 Oktober 2016, dari Http://Www.Ecpat.Net/Ei/Publications/Cst/Code_Of_Conduct_Eng.Pdf
- World Travel Guide. The Secret Lives of Sex Tourists. Diakses pada 17 November 2016, dari <http://www.worldtravelguide.net/holidays/editorial-feature/feature/secret-lives-sex-tourists>.
- WorldTravel&TourismCouncil. 2015. Thailand. Diakses pada 20 Januari 2017, dari <https://www.wttc.org/-/media/files/reports/benchmark-reports/country-reports-2015/thailand--benchmarking-report-2015.pdf>
- Wouk.org. Prostitution in Thailand. Diakses pada 13 Desember 2016, dari http://www.wouk.org/rahab_international/pdf_files/Prostitution%20in%20Thailand.pdf.

Wouk.org. Sex Tourism in Thailand. Diakses pada 17 November 2013, dari http://www.wouk.org/rahab_international/pdf_files/Sex%20Tourism%20in%20Thailand.pdf.

Wright, E. 2015, Agustus 4. The Link Between Poverty and Prostitution. Diakses pada 23 September 2016, dari <http://www.borgenmagazine.com/prostitution-poverty/>.

Youth Career Initiative (YCI) Thailand. Diakses pada 12 Oktober 2016 , dari <http://www.youthcareerinitiative.org/country/thailand/>

